



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH
RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI IV DPR RI
DENGAN DIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN SARANA
PERTANIAN, DIREKTUR JENDERAL TANAMAN PANGAN, KEPALA
BAGIAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN RI, DEPUTI II BIDANG KOORDINASI PANGAN
DAN AGRIBISNIS KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG
PEREKONOMIAN RI, DIREKTUR UTAMA PT PUPUK INDONESIA
(HOLDING COMPANY), DAN KETUA UMUM HIMPUNAN BANK MILIK
NEGARA (HIMBARA)

(BIDANG PERTANIAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN, DAN
KELAUTAN)**

Tahun Sidang	: 2020-2021
Masa Persidangan	: III (Tiga)
Rapat Ke	: 4
Jenis Rapat	: RDP
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/Tanggal	: Senin, 18 Januari 2021
Waktu	: 10.15-17.45 WIB
Tempat	: Kantor/Rumah masing-masing (rapat secara virtual)
Ketua Rapat	: Sudin, S.E. (Ketua Komisi IV DPR RI/F-PDIP)
Acara	: Membahas pelaksanaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dan kartu tani tahun 2020 dan rencana tahun 2021
Sekretaris Rapat	: Drs. Achmad Agus Thomy/Kabag Sekretariat Komisi IV DPR RI
Hadir	: A. Anggota DPR RI: 46 Anggota dari 55 Anggota Komisi IV dengan rincian:

1. Fraksi PDI Perjuangan (F-PDIP)

11 dari 12 orang Anggota

1. Sudin, SE. (Ketua Komisi IV DPR RI)
2. H. Sunarna, S.E., M.Hum.
3. Ir. Mindo Sianipar
4. Ir. Effendi Sianipar,
5. Ono Surono, S.T

6. Yohanis Fransiskus Lema, S.IP., M.Si.
7. Vita Ervina, S.E., MBA
8. Drs. I Made Urip, M.Si.
9. H. Yadi Srimulyadi
10. Dr. H. Sutrisno, S.E., M.Si.
11. Maria Lestari, S.Pd.
12. Riezky Aprilia, S.H., M.H.

2. Fraksi Partai Golongan Karya (F-PG)

6 dari 8 orang Anggota

1. H. Dedi Mulyadi, S.H. (Wakil Ketua Komisi IV DPR RI)
2. H. M. Salim Fakhry, S.E., M.M
3. Budhy Setiawan
4. Ir. Ichsan Firdaus
5. A.A. Bagus Adhi Mahendra Putra., S.H., M.H.
6. Alien Mus, S.H.

3. Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (F-Gerindra)

7 dari 7 orang Anggota

1. G. Budisatrio Djiwandono (Wakil Ketua Komisi IV DPR RI)
2. Ir. KRT. H. Darori Wonodipuro, MM.
3. Ir. Endro Hermono, M.B.A.
4. Renny Astuti, S.H., S.PN.
5. Dr. Ir. Hj. Endang Setyawati Thohari Dess, M.Sc.
6. Ir. H. T.A. Khalid, M.M.
7. Dr. H. Azikin Solthan, M.Si

4. Fraksi Partai Nasional Demokrat (F-NasDem)

4 dari 6 orang Anggota

1. H. Sulaeman L Hamzah
2. Ir. Abdullah Tuasikal, M.SI.
3. H. Charles Meikyansah
4. Julie Sutrisno

5. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB)

5 dari 6 orang Anggota

1. Daniel Johan, S.E. (Wakil Ketua Komisi IV DPR RI)
2. H. Muhtarom, S.Sos
3. Drs. H. Ibnu Multazam
4. Farida Hidayati, S.H., M.Kn.
5. Luluk Nur Hamidah, M.Si., M.P.A

6. Fraksi Partai Demokrat (F-PD)

4 dari 5 orang Anggota

1. H. Guntur Sason, M.Si
2. Muslim, S.H., M.M.
3. Hj. Nur'Aeni, S.Sos., M.Si.
4. Bambang Purwanto, S.ST., M.H.

7. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS)

3 dari 5 orang Anggota

1. Drh. H. Slamet
2. Dr. Hermanto, S.E., M.M
3. H. Johan Rosihan, S.T.

8. Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN)

3 dari 4 orang Anggota

1. H. Muhammad Syafrudin, S.T., M.M.
2. Haerudin, S.Ag., M.H.
3. Slamet Ariyadi, S.Psi.

9. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP)

2 dari 2 orang Anggota

1. Ema Umiyyatul Chusnah
2. K. H. Asep A. Maoshul Affandy, M.Pd.I

B. Pemerintah:

1. Dr. Sarwo Edhy, S.P., M.M. (Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian);
2. Dr. Ir. Suwandi, M.Si. (Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian);
3. Prof. (R). Dr. Ir. Dedi Nursyamsi, M.Agr. (Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Kementerian Pertanian);
4. Ismariny (Asisten Deputi II Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian);
5. Achmad Bakir Pasaman (Direktur Utama PT Pupuk Indonesia Holding Company); dan
6. Supari (Direktur Bisnis Mikro Bank BRI/Koordinator Bidang Pengembangan Bisnis Mikro HIMBARA).

Jalannya rapat:

KETUA RAPAT KOMISI IV F-PDIP (SUDIN,S.E.):

Rapat tidak terekam.

.....Jatuhnya Pesawat Sriwijaya 182 juga korban gempa bumi di Sulawesi Barat termasuk juga banjir di Kalimantan Selatan setelah longsor di Sumedang.

Silakan Pak Slamet memimpin doa supaya tragedi bencana ini cepat berlalu.

Terima kasih.

F-PKS (drh. H. SLAMET):

Bismillahirrahmanirrahim.

Terima kasih Pak Ketua.

Atas seluruh bencana yang melanda negeri kita mulai dari jatuhnya pesawat dan seluruh bencana yang ada banjir, gempa dan lain-lain tentunya ini menjadi peringatan bagi kita semuanya dan mari kita bersama-sama di ruangan yang terhormat ini, kita berdoa sesuai dengan keyakinan dan kita masing-masing sesuai dengan agama kita masing-masing, kepercayaan kita masing-masing. Kita berikan doa terbaik untuk bangsa ini, kita berikan doa terbaik untuk saudara-saudara kita yang sedang diberikan ujian. Mudah-mudahan dalam kesabaran dan kita berikan doa terbaik untuk keselamatan dari seluruh kita yang ada di dalam bangsa ini sehingga bisa. Bagi yang beragama Islam mari kita bacakan Ummul Kitab dan bagi Temen-temen, Bapak-bapak dan seluruh peserta yang hadir dengan kepercayaan lain dengan agama masing-masing. Hibbarokatul Ummul Kitab Al Fatihah. Amin, amin.

Terima kasih.

Wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Kyai Slamet semoga doanya di ijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa.

Bisa kita mulai ya? Sudah cukup belum? bisa kita mulai ya?

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Salam sejahtera bagi kita semua.
Semoga kita semua sehat walafiat.

Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,
Yang terhormat Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian, Dirjen Tanaman Pangan, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Kementerian Pertanian beserta jajarannya,
Yang terhormat Deputi II Bidang Koordinasi Pangan Agribisnis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian,
Yang terhormat Direktur Utama PT Pupuk Indonesia *Holding Company* beserta anak perusahaan,
hadirin yang kami hormati.

Mengawali rapat hari ini, pertama-tama kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan hidayahnya, kita dapat menjalankan Rapat Dengar Pendapat ini dalam keadaan sehat walafiat. Sesuai dengan jadwal acara Rapat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Masa Sidang III tahun sidang 2020-2021 yang telah diputuskan dalam Rapat Konsultasi Bamus tanggal 3 Desember 2020 dan keputusan Rapat Internal Komisi IV tanggal 12 Januari, maka pada hari Senin, 18 Januari Komisi IV menyelenggarakan Rapat Dengar Pendapat dalam rangka membahas pelaksanaan penyaluran pupuk bersubsidi dan penggunaan Kartu Tani tahun 2021 dan rencana tahun 2021.

Bapak Ibu yang kami hormati.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 276 ayat 1 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang tata tertib Rapat Dengar Pendapat ini kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

(RAPAT DIBUKA 10.15 WIB)

Rapat dimulai pada pukul 10.15 WIB dan akan diakhiri pada pukul 14.00 WIB, apabila belum selesai dapat dilanjutkan sesuai dengan Pasal 254 ayat 2 peraturan tentang tata tertib atau atas kesepakatan bersama, dengan susunan acara sebagai berikut:

1. Pengantar Ketua Rapat.
2. Penjelasan Dirjen dan Pupuk Indonesia serta Ketua HIMBARA.
3. Tanggapan Anggota Komisi IV.
4. Jawaban Dirjen, Deputi, Dirut, serta HIMBARA.
5. Kesimpulan Rapat.
6. Penutup.

Pupuk merupakan salah satu komponen yang penting dalam menentukan keberhasilan suatu usaha pertanian baik secara kualitas maupun secara kuantitas. Pupuk merupakan salah satu input pertama dalam meningkatkan produksi pertanian, mengingat pentingnya peran pupuk dalam produksi dan produktivitas. Kami memahami apabila Pemerintah memberikan

porsi anggaran yang besar untuk pembuatan pupuk bagi petani melalui kebijakan pupuk bersubsidi. Oleh sebab itu pupuk merupakan topik yang selalu dibahas dan dikritisi oleh Komisi IV.

Bapak Ibu yang kami hormati.

Setiap kami, Wakil Rakyat pulang ke wilayah masing-masing pasti dikritik masalah pupuk; pupuk langka, iya bermacam-macam, beragam lah. Permasalahan pupuk bersubsidi bagi petani harus dibahas bukan sebagai isu sesaat sebagai penyelesaian parsial. Kalau presiden sudah ngomong semua sibuk seperti kemarin Pak Wandi bilang cambuk bagi kami, kalau atasnya bilang bukan cambuk, itu peringatan, melainkan diposisikan sebagai elemen integral dalam *grand desain* pertanian secara nasional dalam upaya mewujudkan kedaulatan pangan secara umum Komisi IV melihat pangkal masalah utama dalam kebijakan pupuk bersubsidi adalah data kebutuhan pupuk yang riil dan akurat serta distribusi pupuk bersubsidi, sangat disayangkan hal ini berulang setiap tahun tanpa pembenahan yang mendasar.

Bapak Ibu yang saya hormati.

Saya bingung, benar bingung setiap tahun ada RDKK yang diajukan, jadi seolah-olah Pemerintah nggak punya database. Tiap tahun eh *collect data*, data, data dari kecamatan, kabupaten, provinsi ke pusat, emang nggak punya data baku? dalam beberapa rapat sebelumnya Komisi IV bersifat selalu mengingatkan agar kebutuhan pupuk subsidi harus dilakukan dan dihitung secara cermat dengan melakukan perbaikan terkait data spasial lahan, data luas lahan serta validasi data jumlah petani yang berhak menerima bantuan pupuk bersubsidi. Dalam komposisi pemberian pupuk bersubsidi, begitu juga dengan mekanisme penyaluran yang menggunakan Kartu Tani. Komisi IV juga melihat masih terdapat beberapa persoalan, salah satu contoh? jangankan bicara WIFI, kartu itukan harus pakai WIFI. Pak Sarwo Edhy ingat di dekat Pelabuhan Bakahuni sinyal handphone ada nggak? Nggak ada kan? nah itu aja. Itu pelabuhan terbesar di Indonesia dan mungkin pelabuhan tersibuk di dunia, begitu keluar pelabuhan sudah tidak ada signal handphone.

Beberapa informasi yang dari Komisi IV himpun antara lain masalah terdapat beberapa daerah yang mengalami kelangkaan kekurangan pupuk, selain itu jumlah petani memperoleh kartu Tani masih jauh dibawah jumlah e-RDKK. Salah satu contoh provinsi Lampung jumlah petani 687 ribu, *alhamdulillah* yang sudah terima kartu pupuk baru 55.000 sekian, 687.000 jumlah petani yang menerima cuman 55.000. Ini laporan Kepala Dinas Provinsi Lampung waktu itu disaksikan oleh Pak Sarwo Edhy dan Pak Kasdi waktu kunjungan kerja Komisi IV, selain itu Komisi IV mendapatkan informasi bahwa masih terdapat beberapa wilayah termasuk di Jawa yang mengalami *blank spot* atau hilang signal padahal pada bulan Januari 2020 yang lalu wilayah Jawa termasuk yang diusulkan untuk dijadikan *pilot project* karena dinilai sudah memiliki sarana teknologi memadai, tentu saja ini menjadi pertanyaan tanda besar; mengapa sejauh tingkat keberhasilan pelaksanaan

Kartu Tani? kalau di wilayah seperti Jawa yang masih ada mengalami *blank spot* dan beberapa rapat sebelumnya Komisi IV meminta Pemerintah untuk melakukan kajian terhadap usulan alternatif pola penyaluran pupuk bersubsidi, komisi IV ingin mengetahui hasil kajian tersebut Adapun hasil tersebut menunjukkan yang tidak mendukung pelaksanaan Kartu Tani, maka Komisi IV meminta agar penyaluran pupuk bersubsidi dilakukan dengan metode e-RDKK sementara itu Kementerian Pertanian diminta terus membenahi sistem dan operasional kartu tani. Pada saat sistem sudah siap barulah dilakukan uji coba penerapan Kartu Tani. Komisi IV berhadapan Pemerintah dalam menyalurkan pupuk bersubsidi selalu memperhatikan kendala-kendala teknis dilapangan.

Yang saya sayangkan adalah kenaikan harga pupuk tanpa konsultasi, tanpa ngomong. Memang dalam RDP yang lalu, Komisi IV mendukung kenaikan harga eceran tertinggi pupuk tetapi dengan catatan kelebihan kenaikan harga HET diperuntukkan untuk penambahan kuantiti, bukan hanya naik terus gitu aja enggak, nyatanya sekarang sudah naik lagi pandemi pupuknya langka. Demikian pengantar yang kami sampaikan, selanjutnya kami persilahkan kepada Dirjen, Deputi, Dirut Pupuk Indonesia dan Ketua Himbara untuk menyampaikan penjelasannya terkait hal-hal tersebut di atas.

Bapak, Ibu kita Komisi IV bukan mencari siapa salah, siapa menang. Kita duduk kita selesaikan bersama karena ini bukan tugas bapak semua tapi tugas kita juga. Mungkin bapak-bapak mohon maaf jarang ketemu rakyat, kalau kami selalu sebulan minimal dua kali ketemu rakyat. Yang mendapat caci maki ya Pemerintah, siapa Pemerintah?iya Presiden, Presiden sudah kerja capek siang malam memikirkan banyak hal, tiba-tiba masalah pupuk langka. Mungkin kalau Presiden mau datang atau setelah Presiden datang, *haqqul yaqin*, saya yakin pupuk langsung ada tapi beberapa bulan kemudian saya jamin kosong.

Silakan Pak Dirjen PSP.

DIRJEN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN (Dr. SARWO EDHY, M.M.):

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pak Ketua Komisi dan Anggota Komisi IV DPR Republik Indonesia yang kami hormati dan kami banggakan.

Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan pengelolaan pupuk bersubsidi tahun 2021 diawali dengan evaluasi anggaran subsidi pupuk secara series 2014, 2020 di sini lanjut pak, di sini untuk 2020 Pak Ketua dari alokasi 8,9 juta hektar, realisasinya ton 8,9 juta ton, realisasinya sampai dengan saat ini 96,92%. Realisasi penyaluran memang belum final karena masih menunggu proses penyelesaian perhitungan auditor dari BPKP. Kemudian kami sampaikan rata-rata realisasi anggaran subsidi 2014-2019 itu

rata-rata Rp 28,1 triliun dengan penyelesaian kurang bayar lebih kurang 5 triliun pertahun, jadi memang betul apa yang disampaikan Pak Presiden penggunaan pupuk itu rata-rata itu Rp 33 triliun. Kemudian kami sampaikan bahwa untuk 2020 dari 8,9 juta ton itu realisasinya 8.626.163 ton atau 96,92%, ini pun belum final karena masih di audit oleh BPK. Kemudian yang selanjutnya usulan kebutuhan pupuk bersubsidi berdasarkan e-RDCK, lanjut pak, lanjut.

KETUA RAPAT:

Saudara Dirjen.

DIRJEN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN:

Siap pak.

KETUA RAPAT:

Saya tanya dulu, apa harus tiap tahun Kabupaten provinsi mengusulkan RDCK?berartikan gini misalnya contoh-contoh ajalah yang paling gampang, jumlah petani 1 juta itu kan sudah baku atau belum?mungkin 80% baku, 20% tidak, iya sehingga diselidiki saja 20% berarti kementerian sama PHC sama, tidak mempunyai basis data yang jelas, itu aja. Jadi setiap tahun usulannya gampang kok coba cek aja baik kecamatan, kabupaten, provinsi hanya *copy paste* kok. Jadi buat apa setiap tahun ngusulin, setiap tahun ngusulin, coba bikin *big data*. Masa perusahaan PIHC maupun Kementerian Pertanian nggak punya *big data*, ampun. Iya silakan dilanjutkan.

DIRJEN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN:

Iya izin Pak Ketua.

Big data sebetulnya sudah ada di BPSDM, mungkin nanti akan disampaikan kemudian RDCK setiap tahun kita minta karena memang kenyataannya berubah terus pak, contoh misalnya RDCK 2020 itu sebanyak yang mengusulkan 15,9 juta petani dengan volume 26 juta ton, kemudian untuk 2021 itu yang mengusulkan 16,6 juta petani, kebutuhan pupuk yang diusulkan 23,2 juta ton dengan nilai lebih kurang 67,12 triliun. Nanti rinciannya penggunaannya ada di belakang Pak Ketua.

F-PAN (HAERUDIN, S.Ag., M.H.):

Interupsi Pimpinan.

DIRJEN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN:

Iya siap.

F-PAN (HAERUDIN, S.Ag., M.H.):

Izin, saya ingin karena tadi ada proses pemaksimalan distribusi sementara kenyataan di lapangan itu subsidiya tidak ada dan di lapangan kenyataan yang di plastik adalah non subsidi yang harganya mahal itu, saya ini Pak Ketua, Pak Dirjen minta kita datanya benar nggak itu subsidi itu terdistribusi dengan tepat? ataukah subsidi itu dijalan, dipotong jadi nonsubsidi, nah ini menjadi masalah baru lagi Pak Ketua. Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Oke biar dijelaskan dulu sampai tuntas. Lanjutkan.

DIRJEN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN:

Baik pak, jadi kalau berdasarkan e-RDKK 2021 agung anggaran 2021 itu Rp25,276 triliun sedangkan kebutuhan berdasarkan e-RDKK dengan volume 23,2 juta ton senilai Rp67,12 triliun sehingga secara usulan ini kekurangan uang Rp49,9 triliun, ini pak. Kemudian lanjut pak, lanjut kebutuhan pupuk bersubsidi menurut sub sektor pertanian ini rinciannya setelah kami apa namanya rekap; tanaman pangan itu dengan perhitungan 3 musim tanam, rencana tanam itu ada 24,86 juta hektar, kebutuhan pupuk 16 juta ton, kemudian ini rinciannya ada Pak Ketua; Urea berapa? SP36 berapa? contoh tanaman pangan, rencana tanam 24,8 juta hektar untuk 3 kali musim tanam total Urea yang dibutuhkan 3,8 juta ton, SP36 113.000.422 ton, ZA 1 juta ton total NPK 6,3 juta ton, pupuk organik 4,6 juta ton, ini berdasarkan usulan e-RDKK.

Kemudian Tanaman Hortikultura juga sama untuk Urea, SP36, ZA, NPK dan pupuk organik ada totalnya dengan rencana tanam 2,06 juta hektar, kebutuhan pupuk 2,57 juta ton rinciannya ada disebelahnya, perkebunan, peternakan dan perikanan darat juga sama. Jadi memang kebutuhan berdasarkan keinginan di dalam E-RDKK 32,48 juta hektar untuk tanam dan kebutuhan pupuk seperti yang kami sampaikan tadi 23,2 juta ton. Kemudian lanjut, pagu indikatif subsidi pupuk 2021 itu, pagu indikatif 2021 itu berdasarkan SK Menteri Keuangan 1544, 21 Oktober 2020 pagunya adalah Rp 25,276 triliun dengan volume 7,2 juta ton. Ini mungkin yang pertama disampaikan oleh Pak Ketua kenaikan HET itu ke mana nanti bisa kita jelaskan disini.

Kemudian untuk 2020 itu anggarannya Rp29,764 triliun atau dengan volume Rp8,9 juta jadi berkurang lebih kurang 1,7 juta ton berkurang kalau tidak kita kombinasi dengan adanya kenaikan HET dan penurunan HPP. Lanjut jadi iya, jadi 2021 turun kemudian kebutuhan anggaran subsidi pupuk 2021 itu secara ini kami ambil dari rata-rata penggunaan Pupuk Urea 2014-2020; SP36, ZA, NPK, NPK Formula Khusus dan Organik ini kita dapat formulasi lebih kurang 9.123.688 ton dengan jumlah anggaran Rp32,584 triliun sehingga untuk alokasi pupuk bersubsidi secara rata-rata data series itu kekurangan uang lebih kurang Rp7,307 triliun. Untuk menutup kekurangan

Rp7,37 triliun dari anggaran 2021 Rp25, 276 triliun dengan volume 7,2 juta ton ini ke 9,123 juta ton itu diperlukan dana 7,307 triliun. Untuk menutup kekurangan ini dari mana? ini bisa, lanjut pak. Ini kami mencoba mensimulasikan efisiensi dari penurunan HPP lebih kurang 5% itu terdapat efisiensi 2,457 triliun Pak Ketua. Kemudian perubahan formula dari NPK 15-15-15 menjadi NPK 15-10-12 terdapat efisiensi sebesar Rp 2,272 triliun. Kemudian kenaikan HET itu kisaran 300 sampai Rp450 perkg dengan komposisi Urea naik 450 kg, SP36 naik 400 per kg kemudian ZA dan organik naik Rp300 perkg itu kita mendapatkan efisiensi dana Rp 2,578 triliun sehingga untuk kekurangan Rp 7,307 triliun untuk menutup kebutuhan pupuk 2021 menjadi 9,123 juta ton ini bisa diatasi dengan penurunan HPP, menaikkan HET dan apa namanya perubahan komposisi NPK dari 15-15-15 menjadi 15-10-12. Kemudian pertimbangan kenaikan HET pupuk bersubsidi mungkin sudah kami jelaskan waktu RDP yang lalu, dasarnya adalah adanya penurunan, penurunan anggaran 2021 sebanyak lebih kurang Rp 4,6 triliun kemudian adanya usulan petani dari Ketua KTNA kepada Menteri Keuangan.

KETUA RAPAT:

Saudara Dirjen.

DIRJEN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN:

Siap.

KETUA RAPAT:

Sepertinya Kementerian Pertanian lebih mendengarkan KTNA dari pada-pada kami ini?iya begitu?

DIRJEN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN:

Begini Pak Ketua izin.

Jadi memang waktu kami rapat di Menko, ditanya apakah ada salah satu kesimpulan Rapat RDP? kami bilang ada; isinya kami bacakan bahwa dalam kesimpulan tersebut di Komisi IV setuju untuk menaikkan HET untuk menambah volume. Akhirnya di sana karena memang berdasarkan PP 15 2012 itu untuk menaikkan harga, merubah jenis pupuk dan lain sebagainya itu ditetapkan oleh Menteri Pertanian berdasarkan hasil keputusan rapat oleh Menko Perekonomian dengan mengundang instansi-instansi terkait, maka kami pun diundang oleh Deputi Pangan untuk melakukan rapat koordinasi dan disana disimpulkan bahwa sesuai dengan kesepakatan HET itu naik di 2021 sehingga berdasarkan risalah itulah kami menetapkan kenaikan HET pupuk bersubsidi tersebut Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Jadi 15-15-15 jadi 15 -15-12?

DIRJEN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN:

15 -10-12.

KETUA RAPAT:

15-10-12.

DIRJEN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN:

Iya itu berdasarkan hasil kajian dari Badan Litbang karena.

KETUA RAPAT:

Emang Litbang anda lihai?Litbangnya Kementerian Pertanian lihai?hebat?

DIRJEN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN:

Iya saya kurang paham hanya itu kan hasil penelitian para ahli di bidangnya bahwa struktur tanah kita itu sudah kelebihan Unsur P dan K.

KETUA RAPAT:

Jangan sampai seperti kemarin Kalung virus Anti Corona, itukan kita jadi bahan tertawaan semua. Itukan Litbang yang punya kerjaan, itu loh iya?

DIRJEN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN:

Siap Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Saya juga minta berkali-kali di sini, setiap ada peraturan menteri perubahan tolong kami diinfokan. Masa kami tahu naiknya HET dari media-media bukannya dari Kementrian Mitra kami. Kan kita kan bilang mau naik, iya naik silakan, karena kami tahu dikasih 50 triliun pun nggak akan cukup, betulkan?

DIRJEN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN:

Siap pak.

KETUA RAPAT:

Tapi maunya gini loh, saya setuju dengan Presiden 33 triliun pupuk subsidi dicabut tapi, ada tapinya ini? apa solusi bagi petani? petani penggarapkah? petani pemilikkah? petani kecilkah?petani menengahkah? ini yang solusi yang harus dikaji, itu loh.

DIRJEN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN:

Siap.

Iya terima kasih Pak Ketua, kaitan dengan Permentan itu memang kita sudah sepakat di Kementerian Pertanian bahwa yang mengeluarkan itu biro hukum. Kami kemarin sudah menyampaikan ke Sekjen dan sepertinya Pak Sekjen sudah menegur biro hukum, iya akan segera di tindak lanjuti, itu pak ya.

Lanjut kemudian alokasi pupuk bersubsidi 2021 ini jumlah petani yang berdasarkan hasil rasionalisasi Pak Ketua dari 16,6 juta petani itu, kami setelah validasi kira-kira ada 13,9 juta petani yang memang luas lahannya di bawah 2 hektar kemudian luas lahan, luas total luas tanam itu setelah kami validasi dengan di Dirjen Tanaman Pangan ada 27,1 juta hektar kemudian kebutuhan Pupuk Urea ini naik dari tahun sebelumnya apa? 5.411.259.000 ton kemudian SP36 1.165.112 ton, ini juga naik dari tahun 2020. Kemudian ZA juga naik menjadi 1.960.360 ton kemudian pupuk NPK itu naik juga menjadi 2.662.000 ton kemudian NPK formula khusus sama 17.000 ton kemudian pupuk organik 770.850 ton, ini naik ke lebih kurang 50.000 ton kemudian ada pupuk organik cair 1.500 liter. Jadi untuk 2021

KETUA RAPAT:

1 juta 500 mungkin bukan 1.500, 1 juta 500?

DIRJEN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN:

Iya 1 juta 500, iya sorry. Iya 1 juta 500 liter.

Kemudian apa namanya untuk 2021 itu jumlah alokasi pupuk 9.041.475 ton atau lebih kurang 45,28% dari alokasi RDKK yang diusulkan. Lanjut, kemudian arah kebijakan pupuk bersubsidi 2020 ini berkaitan dengan penyaluran pupuk bersubsidi yaitu bagi para petani yang tentunya sesuai dengan aturan yang ada. bagi para petani yang sudah tergabung dalam kelompok tani, kemudian terdaftar pada sistem e-RDKK yang diinput tahun 2020, kemudian Dinas Pertanian Provinsi Kabupaten Kota bertanggung jawab atas alokasi realokasi dari wilayahnya. Jadi mang ini seperti disampaikan tadi RDKK itu mulai dari petani kemudian kelompok tani divalidasi di BPP, kemudian divalidasi di tingkat kabupaten kemudian disampaikan ke provinsi, provinsi sampaikan ke pusat kemudian pusat berdasarkan hasil validasi mengalokasikan permasing-masing provinsi tentunya sesuai dengan usulan berdasarkan e-RDKK yang diusulkan oleh provinsi, kemudian kewajiban provinsi adalah membuat Surat Keputusan kaitan dengan alokasi pupuk bersubsidi per kabupaten kota dan Kepala Dinas Kabupaten Kota membuat Surat Keputusan untuk mengalokasikan pupuk bersubsidi pada setiap desa kecamatan yang ada di wilayahnya. Kemudian penebusan pupuk bersubsidi itu pada wilayah yang siap infrastruktur dengan kartu tani itu tertuang di dalam Pasal 12 Permentan 49 2020 artinya bahwa apabila di suatu kios fasilitasnya belum ada dan para petani tidak memiliki Kartu Tani maka penebusan pupuk

bersubsidi dilakukan secara manual, jadi kebijakannya sama dengan tahun 2020.

Wilayah yang belum siap dengan menunjukkan KTP dan yang belum siap dengan fasilitasnya maksudnya ini dengan menunjukkan KTP dan mengisi formulir penebusan, ini untuk mengisi form 6. Kemudian untuk NPK ini dirubah komposisinya tadi yang sudah dijelaskan karena memang berdasarkan hasil penelitian Badan Litbang, tanah kita sudah jenuh dengan Unsur P dan K, ini kajian Litbang tahun 2017 kemudian kaitan HET tadi sudah kami jelaskan bahwa dengan kenaikan HET 300 sampai 450 per kilogram itu kita mendapat efisiensi anggaran lebih kurang Rp2,7 triliun.

Lanjut, kemudian pola penyaluran pupuk bersubsidi ini memang dari lini 1, lini 2, lini 3 dan lini 4 kami juga mohon izin Pak Ketua, kami sedang mempersiapkan Permentan bahwa agar tidak ada saling menyalahkan itu kami akan menetapkan bahwa di lini 1 itu mungkin monitoring secara pengawasan secara keseluruhan Kementerian Pertanian ikut mengawasi tapi tanggung jawab dari sisi ketersediaan pupuk di masing-masing lini itu di lini 1 menjadi tanggung jawab Kementerian Pertanian kemudian lini 2 gudang provinsi menjadi tanggung jawab Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Provinsi atau Pak Gubernur kemudian di lini 3 Bupati tentunya dibawahnya adalah Kepala Dinas Pertanian Kabupaten dan di lini 4 adalah tanggung jawab Kecamatan atau Camat sehingga diharapkan kalau misalnya ada kekurangan di lini 3 atau kekosongan gudang di gudang distributor atau gudang produsen di lini 3 itu tanggung jawab Kepala Dinas untuk mengambil langkah-langkah tentunya dengan melalui koordinasi dengan pusat sehingga di 2021 ini diharapkan semua kebutuhan pupuk tepat waktu di musim tanam bagi para petani bisa terpenuhi sesuai dengan lokasi yang sudah ditetapkan.

KETUA RAPAT:

Saudara Dirjen, saya tanya yang tanggung jawab itu pengertiannya apa? coba saya mau tahu. Kalau kita lihat disini kan berarti pabrik pupuk tidak punya tanggung jawab, Kementerian Pertanian hanya di pabrik saja tanggung jawabnya sepertinya pabrik iya urusan produsen bukan urusan Kementerian Pertanian harus ingat loh. Iya ini tiba-tiba kalau gudang unit UPP itu lini 2 misalnya itu harus menjadi tanggung jawab provinsi.

D DIRJEN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN:

Jadi ini baru gagasan Pak Ketua, jadi.

KETUA RAPAT:

Iya bilang dong dari awal baru gagasan.

DIRJEN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN:

Kan saya sampaikan tadi diawal bahwa ini rancangan, baru rancangan sehingga saya tadi sampaikan mohon masukan Kalau kira-kira nantinya kurang kurang apa namanya kurang pas, iya tidak jadi kira-kira begitu. Hanya kami berpikiran Kepala Dinas Provinsi wajib mengontrol keadaan pupuk di lini 2 kira-kira begitu pak.

KETUA RAPAT:

Sekarang saya tanya yang menentukan distributor atau agen pupuk siapa?

DIRJEN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN:

PI, Pupuk Indonesia.

KETUA RAPAT:

Berarti yang tanggung jawab PI dong dari pabrik sampai ke petani itu PI yang tanggung jawab termasuk juga pengawasannya. Kalau ada, kalau ada agen distributor, pengecer yang nakal PHC harus turut bertanggung jawab karena selama ini kan kalau ada masalah yang ditangkap distributor bawa ke Polisi, Kejaksaan. Tanggung jawab PHC apa?dalam menunjuk agen distributor kios, kan masih ada *track record* nya. Jangan jadi *cartel* lah, orang saya tahu kok seberapa banyak si A punya ini, termasuk juga mohon maaf ini saya buka aja. Oknum itu ada juga yang di Lapangan Banteng itu di Kemendag jadi distributor pupuk karena ini akan ada urusan dengan Kemendagnya. Nanti ayu dalam kesimpulan nanti tuliskan.

Iya lanjut.

DIRJEN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN:

Baik Pak Ketua. Terima kasih masukannya.

Lanjut, kemudian kaitan dengan implementasi Kartu Tani tahun 2020 ini kami sampaikan Pak Ketua, jadi jumlah kios terpasang EDC sampai dengan 31 Agustus ini datanya belum berkembang. Ini ada, iya 15.300 kemudian kios terpasangnya EDC sampai dengan 30 Desember ini, Rp 28.200 kemudian Kartu Tani tercetak sampai dengan 31 Agustus 9,7 juta kemudian Kartu Tani tercetak sampai dengan 30 November 12,84 juta kartu kemudian Kartu Tani terdistribusi sampai dengan 31 Agustus itu 6,06 juta Kartu Tani kemudian Kartu Tani terdistribusi sampai dengan 30 November itu 7,26 juta kemudian Kartu Tani yang digunakan sampai dengan 31 Agustus itu baru 732.000 kemudian Kartu Tani digunakan sampai dengan 30 November 2020 itu 1,6 juta Kartu Tani. Ini gambaran implementasi Kartu Tani 2020 memang ini harus kerja keras dan kami harapkan memang dari Teman-teman Pupuk Indonesia untuk menginstruksikan kepada distributor dan distributor ke

kios-kios untuk apa namanya menggunakan Kartu Tani bagi para petani yang sudah mendapatkan Kartu tani dan di kiosnya sudah terfasilitasi EDC.

Lanjut, nah ini kalau ini mekanisme pendataan Kartu Tani. Jadi Kartu Tani memang dari para petani kemudian melalui kelompok tani divalidasi ditingkat BPP Kecamatan, di sana ada admin kemudian juga divalidasi oleh dikasih apa namanya Kabupaten, Dinas Kabupaten dikasih penyuluhan kemudian di sana sudah bentuk database, database di sampaikan ke bank, bank pelaksana baik BRI, BNI46 maupun Bank Mandiri, dari sana langsung akses ke kios dan Kartu Tani ke tentunya ke para petani dan para petani menebus pupuk dengan EDC dan Kartu Tani di kios-kios tersebut.

Lanjut, kemudian ini ada permasalahan yang memang masih ada Pak Ketua. Yang pertama, memang sinyal, betul apa yang disampaikan Pak Ketua; di Bakauheuni yang termasuk kota gitu ya. Begitu lewat itu tidak ada sinyal gitu apalagi mungkin di desa-desa.

Yang kedua, memang masih terdapat perbedaan sistem aplikasi data bank sehingga perlu untuk menyelaraskan, kemudian ada keterbatasan pola distribusi Kartu Tani, kemudian ada kalanya kedistribusi Kartu Tani menggunakan momen tertentu, ini, ini temuan saja ini mungkin.

Kemudian kesulitan signal dan kendala lainnya adalah adanya Kartu Tani rusak kemudian tidak aktif, hilang, lupa pin, EDC rusak dan lain sebagainya. Ini kendala-kendala di lapangan.

Kemudian lanjut, implementasi Kartu Tani 2021 ini sesuai dengan Permentan 49 2020 Pasal 3 ayat 5 masih menggunakan kebijakan 2020 sesuai dengan hasil Raker dan RDP dengan Komisi IV bahwa Kartu Tani dilaksanakan bagi kios yang sudah terfasilitasi dan para petani sudah mempunyai Kartu tani dan manakala para petani tidak mempunyai kartu Tani maka pelaksanaan penugasan pupuk bersubsidi secara tertutup dilakukan secara manual. Kemudian penetapan Wilayah kartu Tani berdasarkan hasil kesepakatan Pokja pupuk yang dikoordinasikan oleh Menko Perekonomian. Jadi kaitan dengan apa fokus untuk pelaksanaan Kartu Tani di 2021 ini sesuai dengan hasil rapat dengan Ketua Pokja yang diketuai oleh Ibu Musdalifah beberapa waktu yang lalu untuk 2021 ini khusus fokus di Jawa.

Kemudian lanjut, upaya percepatan implementasi Kartu Tani ini kami juga memohon kepada Himbara untuk segera sinkronisasi data RDKK dan Kartu Tani kemudian percepat cetak, distribusi dan aktivasi Kartu Tani kemudian evaluasi EDC terpasang dan pemasangan EDC baru, ini mohon juga dapat dipercepat terutama di wilayah Jawa. Kemudian dari Dinas Pertanian itu juga kami sudah menyampaikan bahwa agar dipastikan data Kartu Tani sama dengan data RDKK kemudian dipastikan juga Kartu Tani sudah terdistribusi sesuai RDKK kemudian ada inventarisasi lahan yang siap tanam, kemudian para petani dalam penebusan pupuk bersubsidi harus ada pendampingan dari para penyuluh kemudian dari para penyuluh juga kami sudah menyampaikan bahwa harus ada verifikasi dan validasi yang akurat

data petani penerima Kartu Tani dengan RDKK, mengawal distribusi Kartu Tani kemudian mengawal penggunaan Kartu Tani oleh petani dan memfasilitasi koordinasi dengan dinas, bank dan kios bila ada masalah-masalah dilapangan, kemudian kepada PIHC kami juga mengharapkan bahwa memastikan kios pengecer resmi terpasang EDC, memastikan EDC bisa operasional tentunya dengan bantuan para distributor dan kios, juga pengajuan pembayaran subsidi berdasarkan *dashboard* bank. Mungkin itu Pak Ketua, Bapak Ibu sekalian hal-hal yang dapat kami sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Walaikumsalam.

Jadi tadi kalau kita lihat perjalanannya untuk mendapatkan atau mendaftarkan Kartu Tani itu harus penyuluh toh, iya kan? sekarang saya tanya penyuluh di Indonesia ada berapa pak? jumlah penyuluh? bapak Jawab dulu.

KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN (Prof. (R). Dr. Ir. DEDI NURSYAMSI, M.Agr.):

Baik terima kasih.

Mohon izin Pak Ketua. Jumlah penyuluh saat ini kurang lebih 38.

KETUA RAPAT:

Semuanya nih? semuanya?

KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN:

Iya diseluruh Indonesia.

KETUA RAPAT:

38.000 sekian, jumlah desa di Indonesia bapak tahu berapa?

KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN:

Jumlah desa itu kurang lebih 80.000 desa tetapi yang potensi pertanian itu kurang lebih 75.

KETUA RAPAT:

Oke kalau 75.000, sanggupkah sang penyuluh, sang penyuluh iya kan? bahkan 1 penyuluh ada 5 desa, ini kenyataan loh saya ngomong di lapangan seperti itu. Sanggupkah?

KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN:

Iya, idealnya satu penyuluh itu satu desa.

KETUA RAPAT:

Bapak nggak usah ngomong ideal pak. Ini saya Anggota DPR 2009 selalu Pemerintah bicaranya idealnya begini, idealnya begini tapi sampai sekarang hampir 11 tahun nggak pernah ada ideal itu tercapai, enggak ada. Jadi enggak usah ngomong ideal lah pak, kenyataannya memang kurangnya penyuluh akibatnya apa? oh yang gampang *copy paste* lah. Cobalah maka bapak jangan sering-sering ikut menteri jalan-jalan, bapak sering-sering ke lapangan kecamatan ke desa jadi tahu apa yang terjadi di desa, apa yang terjadi di kecamatan. Kalau cuman 2 desa satu penyuluh saya nggak yakin datanya valid. Ini loh kenapa acak-acakan?iya karena semua ini data pak, data itulah. Saya minta tolong, bapak sering-sering ke lapangan ngecek oh ini data, ini data, ini data, ini data, ini.

Iya lanjutkan siapa lagi?

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI/F-PG (H. DEDI MULYADI, S.H.):

Pimpinan. Masalah penyuluh.

KETUA RAPAT:

Iya silakan Pak Dedi.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI/F-PG (H. DEDI MULYADI, S.H.):

Baik terima kasih.

Ini kita harus bisa memahami bahwa masalah penyuluh sekarang beda dengan penyuluh tahun 80. Pertama, memang tidak satu orang bisa dua desa, desa itu ada yang kecil ada yang ada puluhan ribu hektar loh di daerah-daerah tertentu luas sawahnya.

Kedua, status kepegawaiannya, mereka dapat honor itu seadanya dalam setiap bulan, persis guru honorer. Jadi kalau komisi lain cerita tentang guru honorer yang digaji seadanya, iya penyuluh juga sama Ketua, nggak jelas gajinya. Jadi saya ragu juga penyuluh dengan gaji yang tidak jelas ini bisa memvalidasi data pada sebuah areal yang sangat luas apalagi bisa dua

desa dipegang oleh seorang, bisa jadi juga ada 3 desa, bisa jadi juga desa nggak ada penyuluhnya.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Iya silakan lanjutkan siapa yang mau ngomong, tunggu dulu biar dijelaskan dulu.

F-PAN (HAERUDIN, S.Ag., M.H.):

Izin Ketua.

DIRJEN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN:

Mungkin Dirjen Tanaman Pangan Pak.

KETUA RAPAT:

Dirjen Tanaman Pangan dulu, sebentar kang.

F-PAN (HAERUDIN, S.Ag., M.H.):

Ke Pak Dedi? penyuluh sebentar. Sebentar saja 2 menit.

Ketua izin Ketua.

KETUA RAPAT:

Iya apalagi? sama Pak Dedi ngomongnya.

F-PAN (HAERUDIN, S.Ag., M.H.):

Progress dengan pernyataan Ketua dengan Pak Dedi tadi yakin nggak maksimal kerja penyuluh? Jawab dulu sebentar.

Terima kasih Ketua.

KETUA RAPAT:

Nggak perlu dijawab Kang Haerudin, saya jawab nggak yakin, udah.

Lanjutkan.

DIRJEN TANAMAN PANGAN (Dr. Ir. SUWANDI, M.Si.):

Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.

Yang terhormat Bapak Ketua Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI.

Izin menyampaikan kaitan pupuk terhadap produktivitas, kami sampaikan di slide 2 itu perbandingan di 6 negara di Asean. Nah terlihat biaya pupuk per kg output gabah Indonesia nggak jauh beda dengan Vietnam, juga India sekitar Rp 289 perkg gabah kemudian komponen tertinggi di Indonesia adalah sewa lahan dan upah tenaga kerja. Inilah yang menyebabkan tenaga apa biaya produksi padi kita lebih mahal karena terbesar dari upah dan sewa lahan sementara pupuk relatif sama bahkan negara lain seperti Filipina, China itu jauh lebih tinggi.

Lanjut slide ketiga, kalau dilihat juga data FAO 2020 dari kajian IPB 2020 produktivitas padi kita 5,1 sampai 5,24 sedikit dibawa Vietnam tapi jauh dibanding beberapa negara yang lainnya Filipina, Thailand dan lainnya. Lanjut ke slide 5 Bapak, Ibu sekalian bagaimana nah ini contoh biaya produksi jagung 12% untuk pupuk tetapi kalau padi sekitar 9% data BPS dan kajian kami. Kemudian dilihat tingkat partisipasi penggunaan pupuk 100% sudah menggunakan Pupuk Urea dan NPK dan kecenderungan beberapa daerah melebihi dosis, untuk itu sudah ada paket rekomendasi teknologi dari Litbang berapa penggunaan menurut wilayah kecamatan? hasil analisis penggunaan pupuk di tingkat petani untuk penggunaan Urea, SP36, NPK berpengaruh positif ini sesuai dengan yang disampaikan Pak Ketua tadi bahwa pentingnya pupuk terhadap produktivitas dan terbukti berpengaruh negatif dengan elastisitas 0,026 jadi apabila penggunaan pupuk meningkat 10% maka produksi akan meningkat 0,26%.

Secara spesifik khusus untuk SP36 elastisitasnya 0,01, NPK 0,009 lebih besar dibanding Urea dan ZA. Namun demikian ini tidak berlaku apabila di daerah-daerah yang sudah penggunaannya tinggi maka dampaknya tidak begitu signifikan. Lanjut slide 6, ini yang menarik perbandingan pupuk baik volume maupun anggaran terhadap produktivitas dan ternyata 2018 dengan nilai subsidi 31 triliun ini paling tinggi produktivitasnya juga meningkat signifikan lebih tinggi dibanding tahun-tahun sebelumnya.

Lanjut yang terkait dengan produktivitas, hasil penelitian di Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, NTB oleh Litbang kita menghasilkan ada korelasi positif antara subsidi dengan produktivitas dengan tingkat kepercayaan 0,94% di mana di lokasi penelitian misalnya di Lampung itu bisa meningkatkan 1,7%, Jawa Barat 1,4%, Jawa Tengah 0,97 Jawa Timur, 1,1 dan NTB 0,7 relatif sekitar 1% dampak penggunaan pupuk bersubsidi.

Bapak Ibu dan Anggota Dewan,

Kami sampaikan sekarang lagi musim tanam terbesar kemarin Bulan Des 2 juta hektar lebih sedikit dan sekarang kita juga mengejar ini di saat hujan dan petani membutuhkan.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI/F-PG (H. DEDI MULYADI, S.H.):

Pak saya nyela dulu pak.

Saya barusan di telepon wartawan, di pasar saya cek deh, hari ini ada beras impor dari Vietnam dibanderol harganya 9.000 per kg yang impornya Sarinah. Apakah Kementerian Pertanian mengetahui? apakah Kara Balai Karantina mengetahui? karena kalau beras ini dibanderol 9.000 masuk sekarang dan masih pak. Wassalam pak, petani pak, makin jatuh lagi harganya. Ini saya barusan saja pak, mohon juga hari ini juga dijelaskan. Jadi jangan sampai nanti begini udah harga beras jatuh, harga pupuk naik, susah lagi, mau dibunuh petani?

DIRJEN TANAMAN PANGAN:

Terima kasih baik kami jawab.

Tim Kementan terjun langsung ke lokasi beras Cipinang sebagaimana ada laporan masyarakat. Kemudian memang benar ditemukan Beras Yasmin masuk ke apa ke Cipinang. Untuk kami sampaikan bahwa Kementerian Pertanian tidak menerbitkan rekomendasi impor beras, jadi impor beras yang ini adalah bukan dari Kementerian Pertanian kemudian biasanya kalau beras khusus itu penggunaan dan sasarnya juga khusus tidak masuk ke pasar tradisional.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI/F-PG (H. DEDI MULYADI, S.H.):

Izin.

DIRJEN TANAMAN PANGAN:

Satu lagi pak.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI/F-PG (H. DEDI MULYADI, S.H.):

Sebentar, sebentar dulu.

Mohon kalau bapak tidak mengizinkan, saya minta Kementerian Pertanian bikin konferensi pers kemudian mengambil langkah-langkah hukum kalau memang izin impornya beras khusus di bawah.

F- GERINDRA (Ir. H. T.A. KHALID, M.M.):

Pak Ketua.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI/F-PG (H. DEDI MULYADI, S.H.):

Harganya 12.000 perkg itu dan ternyata dia ngimpor yang 9.000 per kg maka berarti ada dokumen yang dipalsukan. Saya minta Kementerian

Pertanian berpihak kepada petani dan punya sikap bukan hanya sekedar tidak tahu, tidak diajak koordinasi, bukan hanya itu. Terima kasih.

F- GERINDRA (Ir. H. T.A. KHALID, M.M.):

Pak Ketua.

Karantinanya ini siapa?kok bisa lolos tanpa rekomendasi pertanian? inikan aneh, oke terima kasih lanjut.

DIRJEN TANAMAN PANGAN:

Izin lapor sudah diproses Bareskrim pada saat kemarin itu juga, jadi sekarang sudah ranah dan sampel produknya sudah diambil lagi proses hukum, itu yang dapat kami sampaikan terima kasih.

F-NasDem (H. CHARLES MEIKYANSAH):

Interupsi pak.

Soal impor ini kalau memang Kementan sudah melakukan penolakan, kita harus tahu juga ini? dimana ini? dan siapa ini ya? dan apa alasannya gitu loh?

Pak Ketua izin kalau memang apa ini sesuatu yang pelanggaran harus ada dalam kesimpulan kita, terima kasih.

KETUA RAPAT:

Pak Wandu sudah selesai? siapa lagi habis ini?

Silakan.

Saya rasa kita dengarkan dulu penjelasan, sambil kita tulis nanti setelah selesai semua baru kita pertanyakan. Kalau dipotong-potong nanti sampai, sampai maghrib gak selesai ini.

Iya silakan.

KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN:

Baik terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.

Yang kami hormati Pak Ketua, Wakil Ketua dan Seluruh Anggota Komisi IV serta rekan-rekan sekalian dari Pemerintah.

Sedikit mungkin saya menambahkan penjelasan mengenai *database* petani dan lahan petani yang diajukan di dalam RDKK pengajuan pupuk subsidi. Jadi kami sebetulnya sudah membangun *database* yang kita sebut sebagai sistem informasi penyuluhan pertanian disingkat SIMLUHTAN. Jadi didalam SIMLUHTAN itu terdapat *database* petani kemudian juga kelembagaan petani, penyuluh dan luas lahannya yang kita sebut kelembagaan petani itu ada Poktan dan Gapoktan. Memang ada sedikit perubahan seperti yang disampaikan Pak Ketua tadi mengenai jumlah lahan dan jumlah petani ini terkait dengan alih fungsi Pak Ketua. Jadi ahli fungsi lahan itu memang menyebabkan ada variasi di dalam lahan dan tentu saja ujungnya kebutuhan pupuk. Jadi saya kira itu kita setiap tahun, dua kali *upgrade* Pak Ketua di dalam SIMLUHTAN itu ya dan memang ada variasi, iya selalu ada perubahan. Nah kemudian juga setiap tahun sebetulnya selain alih fungsikan, Kementan juga ada cetak sawah iya, meskipun tahun lalu tidak ada tetapi tahun-tahun dulu ada. Nah ini untuk menjadi sawah baku itu biasanya memerlukan proses dari petani kemudian kita dorong ya di BPP sampai dengan Dinas Pertanian Kabupaten Kota Provinsi kemudian diajukan ke BPS kemudian juga nanti di validasi oleh Kemen ATR BPN, jadi proses untuk menjadi sawah baku dari cetak sawah baru itu memang perlu waktu.

F-PKS (drh. H. SLAMET):

Interupsi sedikit.

Konfirmasi bisa Pimpinan?

KETUA RAPAT:

Tunggu selesai dulu ya Pak Slamet iya, sedikit lagi.

F-PKS (drh. H. SLAMET):

Masalahnya kaitannya dengan klarifikasi data, hanya tanya aja Pak Ketua.

Boleh pak?

KETUA RAPAT:

Iya.

F-PKS (drh. H. SLAMET):

Saya menarik tadi terkait dengan data SIMLUHTAN, ini apakah terintegrasi dengan AWR atau data yang berbeda pak? saya hanya ingin mengatakan dulu mimpinya menteri punya AWR, nah ini punya data lagi ini. Gimana hubungannya? Apakah itu data diambil dari AWR atau bagaimana pak?

Terima kasih pak.

**KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM
PERTANIAN:**

Baik iya tentu pak, jadi sebetulnya SIMLUHTAN ini adalah bagian data yang berada di AWR. Nah jadi SIMLUHTAN itu disebutnya support database Kementerian Pertanian karena SIMLUHTAN itu kan hanya data petani penyuluh lahan yang ada di dalam Poktan dan Gapoktan. Jadi demikian terima kasih.

KETUA RAPAT:

Selanjutnya pak siapa pak?

**DIRUT PT PUPUK INDONESIA HOLDING COMPANY (ACHMAD BAKIR
PASAMAN):**

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Yang terhormat Ketua dan Wakil Ketua dan Anggota Komisi IV DPR RI yang kami hormati,
Kemudian juga seluruh rekan-rekan dari pertanian; Pak Dirjen PSP, Dirjen Tanaman Pangan, Kepala BPSDM, Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agrobisnis atau yang mewakili dan Pimpinan HIMBARA.

Baiklah perkenankan kami menyampaikan presentasi mengenai masalah penyaluran pupuk dan juga petani. Kinerja penyaluran pupuk bersubsidi tahun 2020 dalam 4 tahun terakhir dapat dilihat dalam kurva diatas bahwa kami menyalurkan selama 4 tahun terakhir mendekati daripada apa yang dialokasikan atau ditargetkan. Alokasi dan HTE pupuk bersubsidi tahun 2021 kebijakan yang diatur dalam Permentan Nomor 49 tahun 2020 tentang alokasi dan HET pupuk bersubsidi sektor Pertanian tahun 2021 adalah petani penerima pupuk bersubsidi tidak ada yang berubah pak bagaimana tahun sebelumnya kemudian kelompok juga tidak ada yang berubah. Alokasi dan HET pupuk bersubsidi Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tadi sudah dijelaskan oleh Pak Dirjen PSP kami ikuti kemudian penggunaan Kartu Tani di wilayah yang telah siap menggunakan Kartu Tani. Jadi kami bisa menggunakan Kartu Tani secara manual ataupun melalui kartu Tani.

Next, kemampuan penyediaan pupuk untuk penyaluran pupuk bersubsidi tahun 2021; stok awal dan produksi untuk Urea adalah sekitar 8,7 juta ton sementara untuk alokasi subsidi sesuai dengan anggaran tahun 2021, alokasi 2021 adalah 4,16 juta ton dan alokasi untuk non subsidi 3,8 juta ton atau total 7,9 juta ton sehingga untuk Urea itu masih ada cadangan untuk tahun 2022 sebesar 782.000 ton, demikian pula untuk NPK stok awal dan produksi 2021 adalah sekitar 3,8 juta ton, untuk subsidi 2,68 juta ton dan nonsubsidi adalah 618.000 ton sehingga total ada 3,3 juta ton sehingga masih ada cadangan untuk tahun depan untuk artinya untuk Januari Tahun 2022 sebesar 571,8000 ton. Demikian pula untuk SP36 masih ada cadangan

sampai 300.000 ton, ZA 129 ataupun hampir sampai 130.000 ton dan organik 194.000 ton.

Next, nah ini yang mungkin juga perlu kami sampaikan bahwa Permentan ini untuk penerbitan, untuk penyaluran pupuk tentunya kami tergantung pada SK Mentan kemudian juga SK Dinas Provinsi dan SK Dinas Kabupaten. Jadi Permentan Nomor 49 tahun 2020 tentang HET dan alokasi pupuk bersubsidi itu terbit tanggal 30 Desember 2020 dan kami terima tanggal 1 Januari 2021. SK Dinas Provinsi dan Kabupaten Kota itu dari, jadi kami gambarkan dari tanggal 1 sampai 5 Januari itu yang kami terima adalah untuk dan ini kami bacakan total aja, dari total 34 provinsi; 32 provinsi sudah menerbitkan SK Dinas Provinsi dan 2 Provinsi belum menerbitkan SK Dinas Provinsi yaitu Provinsi Kaltara dan DKI Jakarta. Dari total 514 kabupaten atau kota yang memiliki alokasi adalah sejumlah 483 kabupaten atau kota, jadi 483 dan yang belum diterbitkan SK Dinas Kabupaten Kota sejumlah 217 Kabupaten sampai dengan tanggal 15 Januari 2021. Nah ini yang menyebabkan kami agak terkendala dalam menyalurkan karena belum menerima SK Kabupaten.

Next, posisi stok bersubsidi saat ini, ini kami menggunakan ada program namanya *distribution training control system*, ini bisa melihat keadaan kondisi stok di masing-masing provinsi kabupaten atau pun bahkan sampai ke bawahnya lagi. Nah Urea di stock lini 3 produsen 525.000 ton dan ketentuan stok minimum adalah 210.959 ton. Jadi kalau kita lihat bahwa kami di provinsi ada 249% melebihi daripada ketentuan. Demikian pula NPK itu 266%, SP36 191%, ZA itu ada 214 % dan organik ada 345 %, ini adalah stok kami di daerah.

Next, nah tentunya kami juga bertanggungjawab untuk fermentasi 6 T yaitu dari pabrik tentunya kami harus bertanggung jawab terhadap mutu, jenis, jumlah, dan waktu. Kemudian untuk ke lini 2 dan gudang lini 3 dan distributor, kami bertanggung jawab untuk mutu, jenis, jumlah, waktu dan tempat dan di lini 4 kami bertanggung jawab atas 6 T dan untuk penyalurannya tentunya ada form manual; KTP dan e-RDKK baru disalurkan kepada petani. *Next*, untuk dalam hal untuk penyaluran untuk efektivitas daripada penyaluran kami telah menerapkan industri 4,0 di mana kami juga mempunyai aplikasi gudang, kemudian ada aplikasi yang digunakan untuk penebusan dari distributor, produsen di lini 3 dan aplikasi yang digunakan untuk penebusan pengecer ke distributor ke lini 4 dan juga BPCS aplikasi untuk memantau pergerakan stok dari lini 1 sampai lini 3 secara virtual, secara virtual dan real time.

Next, dukungan PI dalam implementasi Kartu Tani, nah kalau kita lihat bahwa, Kami menerbitkan kebijakan kepada produsen adalah menjadikan keluruh kios menjadi kios pupuk lengkap. Mewajibkan kios pupuk lengkap menyalurkan pupuk bersubsidi dengan Kartu Tani dan atau ketentuan lain yang ditetapkan oleh KPA Kementan. Melakukan proses penagihan dengan *dashboard* bank dan melakukan rekonsiliasi untuk penyesuaian dengan data manual.

Melakukan sosialisasi bersama Kementerian Pertanian dan himpunan Bank Negara ataupun Himbara.

Mempersiapkan proses dan ketentuan penagihan piutang dengan *dashboard* bank berbasis penyaluran menggunakan Kartu Tani.

Next, jumlah kios yang menjadi tanggung jawab dari Pupuk Indonesia adalah 28.656 kios di mana kami harus menjamin bahwa ini adalah menjadi kios lengkap dan ini sudah kami penuhi. Dari 28.656 kios yang dapat melayani Kartu Tani atau kios terpasang EDC aktif adalah sebesar 12.477 kios dan yang belum dapat melayani Kartu Tani yaitu kios terpasang EDC tidak aktif adalah 2.165 kios, kios belum terpasang EDC 14.014 kios dan atau total seluruh yang belum efektif adalah 16.179 kios. Next, nah kebijakan dari penebusan pupuk bersubsidi menggunakan Kartu Tani dan manual berdasarkan Permentan 49 disini bahwa kami bahwa menyampaikan bahwa penyaluran pupuk bersubsidi bagi wilayah yang belum menggunakan Kartu Tani dapat dilakukan penembusan manual dengan menyampaikan fotokopi KTP dan mengisi form penembusan dan ini sudah jauh lebih praktis daripada yang tahun lalu. Next, nah ini suratnya dari Kementrian Pertanian dan juga dari kami ke distributor. Next dan yang mungkin juga perlu kami sampaikan upaya-upaya efisiensi untuk menurunkan HPP subsidi bahwa Pupuk Indonesia telah membangun 3 Pabrik Amoniak baru yang lebih efisien menggantikan pabrik lama yang baru antara lain ; Kaltim V, Pusri 2B dan Amoria PKG. Kemudian kami juga tidak melakukan rekrutmen sehingga kami melakukan *zero growth rekrutmen* untuk karyawan dan penataan organisasi dan SDM melalui sentralisasi pemasaran dan distribusi.

Kemudian juga kami melakukan pinjaman bersama dengan profil holding untuk mendapatkan suku bunga yang lebih kompetitif, kemudian melakukan penerbitan obligasi berkelanjutan untuk manajemen *cashflow* dan mendapatkan dana bunga yang lebih rendah daripada pinjaman bank. Kemudian berkoordinasi dengan Pemerintah RI untuk mendapatkan pasokan gas bumi dengan harga yang kompetitif dan sekarang sudah kami dapatkan harga 6 dolar rata-rata kecuali di Pupuk Iskandar Muda masih di atas 6,61. Kemudian kami juga telah melakukan sentralisasi pengadaan untuk meningkatkan daya tawar dan nilai efisiensi dan juga dengan support dari DPR dan koordinasi dengan Kementan dan Kemenku untuk percepatan pembayaran piutang subsidi dan tagihan tahun berjalan. Kemudian juga pabrik dioperasikan secara efisien dengan standar yang tinggi dan diakui oleh nasional maupun internasional, kami mengikuti SNI dan ISO 9001 kemudian mendapatkan *profend* bahkan ada yang mendapatkan *profend* emas juga dan ISO 14001 kemudian juga kami mengikuti *IFA Protect Resisten* sebagaimana diakui oleh Organisasi Pupuk Internasional dalam *SHE manajemen, ISO 15001* mengenai manajemen energi dan juga kami melakukan penilaian melalui *ball grid excelent* untuk melihat posisi perusahaan apakah benar kami sudah efektif atau belum.

Kemudian program penataan distribusi dan gudang bersama, kemudian juga melakukan program asuransi bersama untuk mendapatkan premi yang

efisien dan kalau dilihat dari kurva memang dari grafik diatas bahwa HPP pupuk NPK subsidi maupun Urea itu mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya. Next, nilai piutang subsidi sampai dengan saat ini yang total piutang, piutang tahun 2019 adalah 3,783, perkiraan piutang 2020, an auditid 1,9 sehingga total piutang adalah sekitar Rp 5,7 triliun. Demikian Pak Ketua terima kasih atas kesempatannya.

KETUA RAPAT:

Iya selanjutnya siapa pak?

ASDEP PRASARANA DAN SARANA PANGAN DAN AGRIBISNIS (ISMARINY):

Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.

Saya mewakili Ibu Muzdalifah pak, saat ini beliau sedang kena Covid tapi *insya Allah* dalam beberapa hari ke depan sudah negatif sedang menunggu tes tes terakhir saja supaya bisa jadi negatif. Perkenalkan nama saya Ismariny, saya Asdep Prasarana dan Sarana Pangan dan Agribisnis. Kebetulan saya baru dua bulan dan kemudian saya sudah melaksanakan beberapa, berapa pertemuan untuk, untuk mengkoordinasikan permasalahan tentang penyaluran pupuk bersubsidi dan Kartu Tani ini. *Next, next* saja karena sudah banyak yang dibahas, mungkin saya akan lihat beberapa, beberapa slide saja. *Next* mbak, *next* lagi, *next* lagi, iya di sini kalau kita lihat memang pupuk itu ada 10% dari total usaha tani yang kemudian harus dibiayai oleh, oleh pupuk tapi kalau kita lihat yang terbesar itu ada tenaga kerja dan sewa lahan. Mungkin kebetulan saya bertemu dengan Bapak DPR mungkin untuk sewa lahan pak, ada masukan bagaimana kalau petani ini mungkin ada hukumnya yang kemudian membolehkan petani untuk tidak sewa lahan tapi bagi hasil? karena ini kan bisnis yang "juga agak beresiko" *next* saja langsung, *next* saja langsung karena semua sudah dipaparkan oleh dari Kementerian Pertanian tadi.

Next, ini untuk Kartu Tani pak, kebetulan di tempat kami ada Pokja, kebijakan pupuk bersubsidi, kebetulan kami sudah membuat *roadmap* ini untuk penerapan Kartu Tani, dimana di 2020 itu targetnya adalah implementasi-implementasi di Jawa dan Madura itu 60% untuk kartu Tani tapi memang kemudian kenyataannya kita tidak bisa mencapai ini. *Next, next* boleh langsung *next* saya melaporkan apa yang sebagai target dari Pokja ini ternyata dari target 65% hanya 12% yang kemudian bisa menggunakan Kartu Tani itu pak.

Next, nah ini beberapa kendala pasti ada kendala yang lain cuma pada saat menganalisis, kami melihat bahwa ada kurangnya perhatian Pemerintah Daerah terhadap implementasi Kartu Tani karena di beberapa daerah yang kepala daerahnya itu mempunyai perhatian ini implementasi Kartu Tani ini berdampak besar pak dan memang persentasenya besar sebagai salah satu contohnya itu ada di Kabupaten Batang dimana implementasi Kartu Tani di

sana sudah hampir 100%, kemudian juga seperti di Lampung meskipun Kartu Tani belum ada tapi karena ada perhatian dari Kepala Daerahnya terhadap perkembangan pertanian, mereka membuat Kartu Petani berjaya dimana mengkombinasikan Kartu Tani dengan aplikasi sehingga ini mungkin juga bisa jadi masukan dalam distribusi pupuk nanti mengkombinasikan antara Kartu Tani dengan aplikasi di Android karena ternyata di luar dugaan saya meskipun kita menganggap bahwa ada League Of Technology dari para petani ternyata mereka kalau untuk Android lumayan cepet untuk, untuk sosialisasinya. Kemudian Bagaimana di Lampung itu mensosialisasikan kartu tani dan aplikasinya itu memang kemudian kita membutuhkan penyuluh-penyuluh pertanian yang lain dari biasanya, gitu. Mungkin yang muda, yang kemudian melek teknologi, yang mempunyai internet terhadap teknologi untuk kemudian bisa mensosialisasikan Kartu Tani di pedesaan.

Next.

KETUA RAPAT:

Izin, teman-teman saya tanya sedikit tadi ibu mengatakan Lampung, kebetulan saya asal Lampung.

Kartu Petani Berjaya, apa enggak tumpang tindih dengan Kartu Tani yang dikeluarkan oleh Himbara?

ASDEP PRASARANA DAN SARANA PANGAN DAN AGRIBISNIS:

Tidak pak bisa dijadikan komplementer karena pada saat bicara aplikasi di situ juga ada *marketplace*. Jadi kita bisa melihatnya sebagai tumpang tinggi tapi kita bisa melihatnya itu sebagai saling melengkapi atau bisa jadi apa yang sudah dilakukan di Lampung tadi itu bisa jadi contoh-contoh bagus untuk mungkin ditiru.

KETUA RAPAT:

Ibu tahu dalam pengelolaan Kartu Petani Berjaya, Pemerintah Provinsi Lampung APBD nya berapa untuk, untuk Dinas Pertanian?

ASDEP PRASARANA DAN SARANA PANGAN DAN AGRIBISNIS:

Tidak ada kan pak.

KETUA RAPAT:

Untuk APBD hanya dianggarkan 17 miliar, ini provinsi Lampung. Di KPB itu dikatakan nanti dikasih pinjaman KUR untuk nebus pupuk kemudian menjamin pembelian hasil produksi petani. Kalau harga singkong 600, saya sudah rugi nggak ada yang bertanggung jawab, apa mau Pemerintah Provinsi Lampung menanggung?kan nggak itulah bu. Jadi maksud saya, kenapa sih enggak satu kartu aja, Kartu Tani? itu cukup sudah. Masalah KPB itu tidak

ada sangkut-pautnya dengan pupuk subsidi, ini kan seolah-olah nanti Pak Sarwo Edhy cek tuh Asuransi Pertanian. Asuransi Pertanian kan bukan KPB bu? bukan Kartu Petani Berjaya tetapi itu di pusat. Inikan diklaim oleh KPB bahwa nanti dapat asuransi pertanian apalah, apalah terkecuali kekurangan yang disubsidi oleh Pemerintah Pusat ditanggung oleh Pemerintah Daerah. Nanti coba Ibu buka masalah Kartu Petani Berjaya, iya?

ASDEP PRASARANA DAN SARANA PANGAN DAN AGRIBISNIS:

Siap pak.

Kemarin kebetulan saya mengikuti sosialisasi dari KPB dan sebenarnya KPB ini bukan, bukan, bukan kartu tetapi dia model aplikasi di aplikasi di Android gitu loh pak, jadi lebih cepat di *market place* sebenarnya. Itu saya hanya untuk apa mungkin ke depannya untuk pengguna Kartu Tani tadi, kita bisa menggunakan contoh seperti itu untuk mempercepat juga, juga untuk memantau keberadaan dari pupuk-pupuk bersubsidi ini apakah sudah tiba di kios? apa atau sedang apa, distribusinya sudah sampai di mana? kira-kira seperti itu pak.

Saya bisa lanjutkan ya pak?

KETUA RAPAT:

Ada lagi Bu?

ASDEP PRASARANA DAN SARANA PANGAN DAN AGRIBISNIS:

Next terakhir,. iya cepat saja. *Next* lagi, *next* lagi.

Nah ini pak mungkin catatan saja pak seperti tadi, saya menghitung sederhana untuk kebutuhan pupuk per hektar sebenarnya untuk, untuk apa untuk tanaman pangan itu untuk satu hektar sekali masa tanam itu menggunakan Urea 200 kilo dan menggunakan NPK 300 kilo dan pupuk organik 500. Jadi pada dasarnya dengan kenaikan HET yang ada sekarang itu, kira-kira kenaikannya itu untuk satu kali masa tanam itu 240.000. Jadi kalau dua kali masa tanam, kenaikan dari HET tadi berdampak 480.000 pertahun, perhektar tapi sepertinya kan di sini *concer* nya bukan pada kenaikan harga tapi pada kelangkaan dari pupuk tadi ya pak lebih seperti itu karena seharusnya kan dengan kenaikan dari HET tadi volumenya bertambah dengan volume bertambah itu harusnya ketersediaan pupuk di kios-kios itu lebih, lebih terjamin.

Next, ini kebetulan kemarin sebagai tindak lanjut melaporkan pak, tindak lanjut dari Rakortas tentang kenaikan HET tadi Kementerian Keuangan kemudian minta untuk di petani ini di kompensasi, di kompensasi dalam bentuk Bansos atau dalam bentuk BLT Dana Desa. Nah kemudian kemarin saya sudah mengadakan Rakornis, nah di Rakornis tadi ada beberapa alternatif untuk kompensasi dari kenaikan dari HET tadi; bisa melalui Bansos

melalui Kementerian Sosial dan ini sepertinya prosedurnya lebih memungkinkan karena selama ini Bansos Kemensos ini juga mengkompensasi subsidi dari energi, dari SDM, bisa juga menggunakan BLT Dana Desa hanya ada terdapat beberapa kendala.

Nah kemudian ada masukan dari Kementerian Pertanian agar kelebihan dari HET tadi dikembalikan lagi untuk menjadi tambahan pupuk bersubsidi sehingga menambah volume dari pupuk bersubsidi tadi dan kemudian lebih baik lagi jika mekanisme dari penyaluran kompensasi ini, itu melalui Kartu Tani sehingga bisa menjadi pendorong untuk penggunaan Kartu Tani dan kemudian untuk mengurangi dampak-dampak dari kenaikan harga eceran tertinggi tadi, saya setuju tadi sudah di bicarakan, dimana kemudian seharusnya kenaikan dari produksi pangan kita itu harus ditunjang oleh modernisasi pertanian dan kemudian juga salah satunya dengan kita takutkan bahwa dengan pengurangan dari kenaikan HET ini tadi kemudian bisa berdampak pada ketahanan pangan kita dan produktivitas petani. Karena itulah mungkin salah satunya itu adalah dengan pengembangan *food estate*, oh ada catatan satu pak kalau kita perhatikan dari e-RDKK, e-RDKK kebutuhan dari pupuk kita itu 26 juta ton. Pada saat ada pertemuan dengan KSP, PIHC menyatakan bahwa produksi mereka per tahun itu 13 juta ton. Jadi kalau kita lihat supply demand dari kebutuhan dan produksi kita secara nasional tanpa dari BUMN itu memang sudah terlihat bahwa ada gap 13 juta ton per tahun pak. Mungkin itu juga yang menjadi salah satu penyebab bagaimana kelangkaan ini mudah sekali untuk terjadi dan untuk dijadikan, kira-kira seperti itu.

Next, next mas mba, oke ini hanya upaya-upaya untuk, untuk apa, untuk menaikkan Kartu Tani. Mungkin saya ada menambahkan informasi bahwa di sini juga ada tata kelola yang kemudian harus dibenarkan, harus di, harus disempurnakan karena data pak dari bawah e-RDKK datang ke Kecamatan kemudian ke dari Kecamatan ke kabupaten kemudian ke Kementerian Pertanian jadilah e-RDKK dengan 26 juta sekian kebutuhan. Kemudian setelah ditetapkan berapa, berapa besar subsidi? itu hanya setiap tahun hanya 30% sekitar itu kemampuan subsidi kita untuk memenuhi permintaan dari e-RDKK. Data itu kemudian diberikan kepada Pemerintah Daerah Tingkat 1 kalau kita lihat di Kepmentan 49 tahun 2020 kemarin, di situ ada arahan untuk kemudian Pemerintah Daerah Tingkat 1 membuat lagi rinciannya Ke Pemerintah Daerah Tingkat 2, dari daerah tingkat 2 harus memiliki rincian lagi untuk tiap kecamatan sehingga datanya yang sudah masuk di e-RDKK tadi itu sudah tidak valid lagi untuk penyaluran dari pupuk dan tadi saya diskusi dengan Bapak Himbara ternyata data itupun, saya juga sudah kroscek dengan beberapa kesempatan diskusi, data itu belum masuk. Jadi mungkin itu tadi kenapa kemudian saya rasa perlu untuk kemudian kita melakukan audit teknologi mungkin ya dalam melihat bagaimana sistem yang dibangun ini berjalan gitu. Kira-kira itu sih pak penyampaian dari kami, terima kasih.

Wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.

KETUA RAPAT KOMISI IV F-PDIP (SUDIN,S.E.):

Walaikumsalam.

Saya setuju tadi ada kata-kata ibu dijadikan kelangkaan, gitu ya nanti saya kasih tahu.

Pak dari Himbara silakan terakhir.

DIREKTUR BISNIS MIKRO BANK BRI/KOORDINATOR BIDANG PENGEMBANGAN BISNIS MIKRO HIMBARA (SUPARI):

Terima kasih Pak Ketua.

Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.

Pak Ketua, Pak Wakil Ketua, dan seluruh Anggota Komisi IV yang kami hormati.

Bapak izin kami dari BRI mewakili Himbara untuk *on-site* dan hadir hari ini juga secara online Pak Ketua Pak Sis Apik dari Direktur Kelembagaan BNI dan juga Pak Rohan dari Direktur Kelembagaan Mandiri. Nanti sekiranya ada hal-hal yang perlu penjelasan lebih lanjut, nanti kami juga akan dibantu oleh Pak Sis Apik dan Pak Rohan.

Bapak izin saya mulai dari arahan dan apa hasil akhir RDP masa masa sebelum sekarang ini yang lalu bahwa kami diminta untuk bagaimana melakukan sosialisasi khususnya di wilayah yang ditetapkan sebagai valuting bapak. Hasilnya sangat bagus bapak sebelum bulan September itu rata-rata transaksi itu hanya sekitar 160.000 transaksi perbulan. Selama 3 bulan terakhir itu sudah 1,1 juta transaksi sebulan, jadi isu yang diangkat terkait dengan Kartu Tani memang betul adalah apa ya?bagaimana kita bisa memintarkan itu para petani ini dengan teknologi terutama teknologi transaksi-transaksi yang sifatnya digital dan itu menjadi concern kami karena kami juga punya peran untuk melakukan inklusi masyarakat semakin dalam.

Bapak, Ibu sekalian.

Tadi juga disampaikan oleh Kementan bahwa ada kenaikan petani yang apa menyampaikan kebutuhan pupuk bersubsidi dari 12 juta menjadi 16 juta. Untuk yang sampai dengan 12 juta, kami saat ini sedang ngebut Pak Ketua untuk pengadaan kartu 3.500.000. Kalau 3.500.000 nanti sudah bisa kamu penuhi, maka seluruhnya kebutuhan petani untuk RDKK 2020 kemarin tidak terpenuhi, nah sekarang ada tambahan kurang lebih 4 juta lagi yang tadi disampaikan sebesar 16 juta nanti kami akan segerakan untuk rapat, tentunya dikoordinasikan oleh Kementan untuk segera memenuhi kebutuhan ini. Inilah proses eksekusinya bapak dari 12 juta, 7 ribu sudah terdistribusi. Tentunya selama tahun 2020 memang kami ada kendala distribusi khususnya terkait dengan pandemi. Kemudian juga tadi disampaikan dari Kementan bahwa

terkait dengan *awareness* dari Bapak, Ibu di Pemerintahan Daerah itu juga menjadi memberikan kontribusi untuk proses distribusi ini. Nah kemudian kartu yang digunakan ini akan banyak terkonsentrasi di wilayah-wilayah yang menjadi *piloting*. Di depan tadi sudah saya sampaikan Bapak dengan sosialisasi kepada mereka para petani kelihatannya ada progress yang cukup bagus.

Bapak, Ibu semuanya bahwa kami sudah banyak bapak-bapak melakukan hal seperti ini karena kami Bank Mikro begitu, maka proses mendigitalisasi masyarakat mikro itu memang sebuah Journey yang menurut hemat kami memerlukan waktu dan oleh karenanya Bapak, kami berkolaborasi dengan Kementerian Pertanian dalam rangka kolaborasi *resources* bapak. Tadi disampaikan ada 38.000 penyuluh gitu, kami ada 28.000 Mantri. Nah khusus Mantri tahun ini kami sudah apa ya revitalisasi dengan 1 Mantri 2 Desa Bapak. Mereka dibekali teknologi khususnya terkait dengan bisnis proses mereka penyalur pinjaman Bapak dan itu tentunya nanti akan sangat apa berkorelasi dengan apa aktivitas dan utilisasi Kartu Tani. Mudah-mudahan bapak *journey* ini semua bisa kita lalui dan setidaknya mungkin kalau tadi *roadmap* nya dari Kemenko seperti itu, mudah-mudahan nanti dengan kolaborasi yang semakin intensif, kami bisa bersama-sama untuk realisasikan sehingga proses atau bisnis proses di subsidi pupuk ini menjadi sangat efisien.

Bapak izin, kami juga ada berapa yang harus kami segera selesaikan terkait dengan setting kuota dengan harga baru. Kami sudah selesai Bapak untuk setting kuota di seluruh apa KPL dan juga di sentra apa pengelolaan data di Himbara. Satu yang perlu waktu adalah untuk setting jenis pupuk baru bapak, sekarang ada pupuk cair itu, tentunya kami harus menyiapkan fitur itu dan diperlukan waktu kurang lebih 2, 3 bulan karena kami harus juga menginjek di 20 ribu EDC, kira-kira seperti itu dan mudah-mudahan ini nanti bisa tidak mengganggu kebutuhan pupuk karena di tempat yang *piloting* itu masih dimungkinkan untuk penebusan secara offline.

Kemudian juga *dashboard* bapak, menurut hemat kami nanti juga mohon izin bapak, koreksi dari Pak Ketua dan seluruh Anggota Komisi IV *user experience* nya bagus Bapak, nanti bisa dicek di Teman-teman PIHC, Teman-teman Kementan gitu bahkan sampai dengan teman-teman di tingkat provinsi. *User* sudah kami berikan sehingga mereka bisa mengakses ketersediaan pupuk, kemudian sudah berapa lahan bisa ditanami dengan komoditi apa? sampai dengan nanti kira-kira panennya kapan? kira-kira seperti itu *dashboard* nya dan *alhamdulillah user experience* nya cukup baik, namun kami tidak akan berhenti untuk terus meng handle sistem ini.

Berikutnya Bapak terkait dengan EDC benar tapi yang disampaikan oleh Pak Dirut PIHC, kami tercatat ada kurang lebih 3.800 bapak KPL yang apa blankspot, nanti kita coba dengan teknologi apa yang bisa mengcover seperti ini. Nah rinciannya seperti ini bapak, di BRI berapa? di Mandiri berapa? di BNI berapa? ada dan sudah terpetakan dan data ini presisi itu kalau nanti kita bisa selesaikan ini maka sesungguhnya isu KPL yang belum

cukup itu sudah semakin sedikit. Demikian kira-kira bapak yang ingin kami sampaikan, tapi yang jelas kami ini bagian dari *support system* secara utuh dari pola penyaluran pupuk bersubsidi, maka di ujung sana yang kami perlukan adalah validitas data RDKK. Sepanjang validitas data RDKK itu valid, maka kami akan semakin lebih mudah untuk menservis kebutuhan petani, kebutuhan Kementan dan juga kebutuhan PIHC. Demikian bapak terima kasih kurang lebihnya mohon dimaafkan dan selanjutnya kami mohon arahan lebih lanjut.

Wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Waalaikumsalam.

Terima kasih atas penjelasannya yang telah disampaikan.

Selanjutnya kami persilahkan Anggota Komisi IV untuk mengajukan pertanyaan atau tanggapannya.

Sebelumnya baik dari Kemenko maupun PIHC, dari Himbara, saya sangat setuju sekali dengan Kartu Tani untuk ketertiban, untuk tidak ada penyimpangan tapi dengan satu catatan; dijalankan apabila wilayah tersebut sudah dapat meng *cover* semuanya. Contoh Kecamatan Palas, Kabupaten Lampung Selatan itu signalnya sama sekali nggak ada, jangankan wi-fi, telepon aja nggak ada. Itu salah satu contoh, kalau memang sudah semua perangkatnya siap, sudah tepat, sudah semuanya, EDC nya sudah, Kartu Tani nya sudah, nah sekarang kendalanya adalah mereka punya Kartu Tani, kan sebelumnya mereka harus menyetorkan uang, kan gitu ya pak yang dari Himbara kan pak?

DIREKTUR BISNIS MIKRO BANK BRI/KOORDINATOR BIDANG PENGEMBANGAN BISNIS MIKRO HIMBARA:

Izin Pak Ketua.

Untuk Kartu Tani, kami berlakukan produk type tersendiri bapak, jadi tidak ada setoran awal, tidak ada biaya-biaya apapun termasuk biaya administrasi bulanan bapak.

KETUA RAPAT:

Kalau untuk nebus pupuk cukup bawa kartu tanpa punya saldo?

DIREKTUR BISNIS MIKRO BANK BRI/KOORDINATOR BIDANG PENGEMBANGAN BISNIS MIKRO HIMBARA:

Harus diisi bapak, harus ada tabungan.

KETUA RAPAT:

Iya itu tadi.

DIREKTUR BISNIS MIKRO BANK BRI/KOORDINATOR BIDANG PENGEMBANGAN BISNIS MIKRO HIMBARA:

Karena konsepnya tabungan bapak.

KETUA RAPAT:

Iya itu tadi yang saya maksudkan bapak.

Kalau sebelum nebus pupuk, dikartu ini harus ada saldo gitu toh? betul nggak pak? iya membeli pupuk itu pakai kartu tapi di kartunya harus ada saldo, kalau nggak ada saldo ya *wasallam*. Kendalanya adalah kalau dia punya kartu, duitnya nggak cukup. Misal dia harus membayar Rp 5.000.000, uangnya cuma Rp3.000.000 berarti kan dia kurang lebih hanya bisa menembus 3 juta. Kekurangan ya ini, inilah terjadi permainan.

Mohon maaf banyak kios yang main di sini, contoh terjadi yang lalu-lalu sebelum ada Kartu Tani, sebelum ada e-RDKK. Datang Ketua Gapoktan kekios; mau tebus pupuk dong, berapa jatah kamu? 3 ton. Kapal pupuknya belum sampai, taruh aja duitnya dulu 10 juta untuk sekian tadi *indent*, 10 juta. Kapan kapalnya datang? *insya Allah* 2 minggu lagi. Begitu datang pembagiannya enggak cukup. Jadi dari alokasi anda 5 ton, cuman ada 1 ton; 4 ton nya kapan? *insya Allah* nanti kapalnya datang lagi, dua minggu lagi, 3 minggu lagi. Datang ada 2 ton lagi pak, berarti masih kurang toh, Ketua Gapoktan ini akan dituduh oleh Anggotanya bawa duitnya kamu pakai untuk yang nggak-nggak, kamu korupsi duitnya ini, sudah minta balik.

Nah minta balik berarti dikios itu masih ada stok yang tadi tidak diambil, inilah permainan kios dan ini waktu itu saya bukan mengada-ada, waktu sama Dirjen PSP yang lama, Pak Gatot. Terjadi banyak begini, begini, itu tanggung jawab siapa? kalau kata Pak Edi itu, Sarwo Edhi itu bilang KP3. Nggak bisa pak, yang menjadi tanggung jawab itu Pabrik Pupuk karena yang menunjuk adalah dia.

Iya silakan Teman-teman Anggota Komisi IV, Pak Budi.

KETUA RAPAT (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Terima kasih Pak Ketua.

Berikutnya kita akan berikan kesempatan kepada Para Anggota Komisi IV untuk memberikan masukan, catatan dan mungkin pertanyaan berdasarkan Hasil Rapat Pimpinan beserta Kapoksi kita akan mendahulukan para juru bicara yang sudah ditentukan fraksi masing-masing. Kesempatan

pertama kita berikan kepada Kang Haerudin juru bicara dari Fraksi Partai Amanat Nasional.

Kang Haerudin waktu dan tempat kami persilakan.

F-PAN (HAERUDIN, S.Ag., M.H.):

Terima kasih Pimpinan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sampurasun Kang Dedi? Sing damang, sing Rahayu. Amin.

Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami dari Fraksi PAN. Pertama ingin kami sampaikan pak dari keseluruhan pembicara ini, tentu kita ingin menyimpulkan beberapa hal. Tentu kita kalau ditanya hari ini Kartu Tani pasti kita menjawab gagal, kalau ditanya hari ini distribusi apakah lancar? pasti tidak lancar. Kalau ditanya hari ini, apakah petani langka pupuk? pasti jawabannya langka pupuk, itu faktanya. Sementara sederet apa yang disampaikan semua sempurna, seolah-olah petani kita sudah mendapatkan pupuk. Ingin kami sampaikan pak, memang lebih bijaksana kalau saya sampaikan itu Kart Tani itu ditunda sementara sampai sarana-prasarana siap. Jangan *trial and error*, jangan coba-coba, yang dikorbankan petani kita pak. Kita pernah pertemuan 1 kali dan di undang oleh 1 *user*, 1 anak perusahaan tentang persoalan. Yang disampaikan PI malah ngomongnya tentang efektivitas tanam dengan cara baru, kita sedang bicara distribusi karena telah, sedang dan akan, ini musim penghujan masih panjang sementara kondisi petani kita langka pupuk. Hari ini memang sedang panen subsidi, non subsidi, artinya rakyat kita sedang megap-megap, mencari pupuk yang ada yang mahal-mahal yang non subsidi, itu pun nambah lagi harganya.

Maka tadi saya ingin pernyataan dari Profesor Dedi, benar nggak penyuluh itu kerjanya? saya tidak ingin jawab sama Pak Ketua karena ini pernyataan politik, karena ini forum politik. Percaya nggak dengan penyuluh kita hari ini, akan begini a,b,c akan sempurna? saya ingin pernyataan ya atau tidak? kalau tidak, kita perbaiki. Kalau benar, kenapa begini?nah ini ingin kita sampaikan bahwa banyak alasan pupuk kita harus sementara, sementara sebelum sarana prasarana disiapkan. Mungkin ibu melihat Jawa itu bu apa di perkotaan? Jawa tuh lihatnya di kampung, jadi kalau tadi 60% hanya 12% ibu pasti sadar bu; mana generasi Y, mana generasi X, mana yang Z. Yang Y karakternya apa terhadap teknologi?yang X seperti apa karakter terhadap teknologi? generasi petani gak ada bu seperti sekarang, menurun. Yang ada para yang tua-tua itupun buruh tani bukan petani.

Saya jujur punya lahan sawah dikampung 1 hektar, saya daftar Kartu Tani bu dan yang garap sawah saya nggak bisa daftar bu karena dia nggak punya surat bu, nah itu kejadian di mana-mana. Dengan cara manual kita bisa bijaksana, mereka garap sawah siapapun bisa mendapatkan pupuk subsidi. Pupuk subsidi bukan untuk orang kaya bu, ini untuk orang miskin.

Petani kita yang miskin, yang petani kita itu daftarnya adalah ada penggarap, petani biasa, petani menengah, bukan pengusaha petani bu. Nah ini biar paham yang dari Ibu Deputi ini karena kita enggak boleh *trial and error*. Yang kedua Pak Sarwo Edhy tentu kita ingin minta kebijaksanaan jangan sampai ada kecenderungan, kita memaksakan bisnis sistem e-Kartu Tani. Yang hari ini yang harus dibela oleh kita adalah petani, yang harus diurus oleh kita adalah petani; bagaimana pupuk subsidi ini sampai pada yang haknya secara baik? setiap sistem pasti ada kelemahan, ada kelebihan tapi yang lebih darurat sistemnya hari ini iya luar biasa berkepanjangan langka pupuknya itu. Ini yang ingin kami sampaikan untuk Pak Sarwo Edhy, mohon dengan sangat, memang kita butuh bijaksana. Pak Presiden memaksakan e-Kartu Tani, kalau sarplas kita tidak siap. Ini 2021.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI/F-PG (H. DEDI MULYADI, S.H.):

Pimpinan intrupsi dulu.

Sebentar bapak mau lengkapi yang bapak mumpung masih ingat pak. Sebentar.

F-PAN (HAERUDIN, S.Ag., M.H.):

Pimpinan kan bisa segala hal.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI/F-PG (H. DEDI MULYADI, S.H.):

Iya boleh. Ini kalau di wilayah, ini daerah Jawa Barat pak itukan sawah terbentang luas dari arah Bekasi sampai Cirebon. Itu pemilik lahannya memang rata-rata 5 hektar ke atas tapi mereka tidak garap sawah, disewakan dengan uang sewanya adalah 1 hektar 2 ton dibayarnya. Pertanyaannya adalah apakah yang nyewa itu masih punya Kartu Tani atau tidak? tidak akan punya karena dia bukan pemilik lahan. Saya ngelengkapin Bapak pak karena Bapak lagi bagus banget.

F-PAN (HAERUDIN, S.Ag., M.H.):

Hatur nuhun Kang Dedi. Tetap Raja Purwakarta.

Saya lanjutkan Pak Pimpinan sebentar ya, mungkin beberapa hal yang ingin saya sampaikan.

Yang selanjutnya pak, kita ingin pada proses yang tadi perencanaan pola gudang. Ini pola gudang ini kita kan di PI, ingin kami sampaikan harus lebih berhati-hati, pengelolaan gudangnya. Pupuk itu dari mulai proses produksinya, bongkar muatnya, ekspedisinya sampai pada tingkat sosialisasinya dikasih ongkos pak dari 25,8 itu dari subsidi pupuk, karena kebetulan kita di Banggar dan kita mendorong dan tentu itu semua ada uangnya dan negara menyiapkan dan rakyat menyiapkan. Ini saya kepada Pak Bakir, Mr Bakir bukannya bukan tidak ada uang hari ini, rumit ruwet,

segala sistemnya ruwet. Nah ingin kami sampaikan Pak Bakir lelang sentralisasi di PI hari ini; lihat Kujang, lihat Petro, lihat Pusri, bagaimana lingkungannya?jangan sampai Orang Karawang, Orang Gresik terima sampah, hargai mereka.

Saya ingin ingatkan Gresik itu, Petro itu dia punya hutang janjinya kepada Desa Gresik Bedol Desa, karena 1 Desa diambil oleh pupuk pakai areal pabrik itu. Pak Nugroho pasti tahu dan mereka butuh air, yang sampai hari ini belum dikasih. Saya khawatir Orang PI yang tadinya tidak tahu pupuk semena-mena berpikinya, makannya saya ingin ingatkan pada mana Pak Pusrizal itu, nah ini saya ingatkan jangan sampai hanya orang besar yang dapat angkut tadi sementara mereka yang di lingkungan yang punya perusahaan sekian-sekian yang biasa hidup bermitra dengan user itu, dengan unper itu mereka jadi mati gara-gara sistemnya yang sentralisasi. Tidak mungkin mereka bisa beradu dengan, dengan kompetisi yang di Jakarta, Pak Rizal bukan orang pupuk, catat itu jangan mematikan anak bangsa sendiri dengan cara sok pintar kita itu, kalau nggak saya minta Panja dipercepat Panja Pupuk itu.

Nah ini yang harus dicatat oleh Pak Bakir, kalau enggak ini akan berkepanjangan jadi masalah kita, yang dikorbankan anak bangsa kita kok. Nah makanya tadi masalah sistem pergudangan ke Pak Sarwo Edhy hati-hati dengan cara ini, jangan banyak coba-coba pak, yang dikorbankan petani kita, bukan duit kita kok, duit rakyat yang diamankan pada kita.

Saya secara pribadi selalu bersemangat mendorong teman-temannya jadi distributor dimanapun, dan siapapun yang penting anak bangsa. Mereka punya hak atas pendapatan bangsanya, atas ruang produksi yang produktif yang ada di bangsanya sendiri. Tak ada urusan bagi saya dituduh apa pun juga bagi teman-teman yang lain, kenapa? karena mereka punya hak yang selama ini mereka tidak punya hak termasuk hari ini saya ingin mengingatkan seluruh anak perusahaan yang tergabung dalam PI ingat di lingkungannya masing-masing, jangan sampai Iskandar Muda membuang sampahnya di Aceh, Pusri di Palembang, Petro di Gresik, Kujang di Cikampek. Mereka hanya sebagian asapnya dan sampahnya sampah sosialnya saja, dan itu jadi catatan untuk ke depan untuk Pak Bakir karena ini amanah yang bukan hanya mengurus pupuknya tapi dampak dan produktivitasnya ke depan. Pak Pimpinan ini barangkali yang ingin kami sampaikan, mudah-mudahan aspirasi dari kami Fraksi PAN memohon untuk sementara e-Kartu Tani untuk kita tunda sampai sarana dan prasarana siap untuk kita *take off, insya allah* petani kita tetap terbela.

Terima kasih.

Wassaalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Kang Haerudin.

F-PAN (H. MUHAMMAD SYAFRUDIN, S.T.,M.M.):

Tambahan Ketua sebelah kanan. Sedikit.

KETUA RAPAT:

Pak Rudi nanti dulu Pak Rudi ya.

Kita akan dahulukan juru bicara fraksi dulu sesuai ketentuan kesepakatan, nanti kami akan berikan dekresi, nanti Pak Rudi bisa bicara.

F-PAN (H. MUHAMMAD SYAFRUDIN, S.T.,M.M.):

Oke nggak papa.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Rudi.

Berikut kami persilahkan juru bicara dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Doktor Slamet.

F-PKS (Drh. H. SLAMET):

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.

Yang saya hormati Pimpinan Komisi IV beserta rekan-rekan Anggota Komisi IV,

Kemudian para mitra yang hari ini hadir.

Beberapa hal yang ingin kami sampaikan, *insya Allah* tertulis nanti diserahkan hanya saya saja untuk beberapa pertanyaan dan juga itu. Yang pertama saya awali dari 1 pernyataan yang luar biasa diakhir *slide*, dipernyataan Pak Menteri ini, Surya kali ini kita distribusikan pupuk dengan NIK *by name by address* dan ini penting untuk dilakukan agar kebutuhan semua warga negara terpenuhi, kebutuhan pupuk *by name by address* kemudian ditunjukkan dalam e-RDKK dan kita lakukan validasi yang panjang dan berat dan itulah yang buat kita mendapatkan 94% data valid untuk penerima pupuk bersubsidi. Jadi ini pernyataan Pak Menteri, *vote* Pak Menteri yang diambil oleh Pak Sarwo Edhy sehingga ini menjadi catatan bagi kita semuanya bahwa ini adalah sesuatu yang baik secara pernyataan tetapi secara praktek kemudian perlu kita evaluasi, ini saya kaitkan dengan ini Pak Dirjen terkait apa keterus terangan dari Pemerintah selayaknya kemudian Pemerintah hari ini menyatakan kepada rakyat bahwa memang pupuk subsidi kalau Pemerintah nggak punya uang, katakan saja tidak punya uang daripada kemudian berbelit-belit. Kalau memang alokasinya hanya 30% dari RDKK sampaikan kepada rakyat, tidak perlu kita malu karena inilah sumber konflik, iya? PPL kita yang ada di lapangan kita semuanya yang tadi disampaikan oleh Pak Ketua, kita selalu ketemu dengan rakyat termasuk kepada PPL.

Mereka itu menjadi *bumper*, dikomplain oleh petani yang ada disekitarnya terkait dengan kelangkaan pupuk, iya? jadi yang terjadi permasalahan bukan masalah harga tetapi kelangkaan ini, saat dia butuh; baik itu yang subsidi maupun non subsidi ada di lapangan kurang pak.

Nah katakan sejujurnya kepada Pemerintah bahwa Pemerintah tidak punya duit hanya mampu mensubsidi 30%, ini akan lebih *fair* daripada kemudian rakyat kita yang kemudian punya di PHP oleh Pemerintah. Nah ini menjadi penting supaya apa? rakyat tidak menjadi korban PHP yang pada akhirnya ini menjadi apa menjadi blunder bagi kita semuanya di saat kemudian juga mohon maaf. Jadi disaat memang kita ingin meningkatkan produksi pertanian, itu yang pertama.

Yang berikutnya kami juga ingin mendapatkan tanggapan dari Pemerintah terkait dengan pernyataan Presiden hasil Rakernas dari apa? saat Rakernas Pembangunan Pertanian 2021, dimana Presiden menyatakan apa sih timbal balik dari subsidi pupuk itu? justru hal ini yang kemudian ingin saya sampaikan, saya ingin tanyakan kepada pihak Kementerian, pihak Pemerintah ketika kemudian saya catat dari subsidi Pemerintah terkait dengan pupuk, di Pemerintahan sebelumnya itu tertinggi hanya 21 triliun misalnya 2005 2,5 triliun, 2006 3,1 triliun. Pemerintah sekarang dua periode kedua Pak Jokowi ini dari 2015 ada 31,3 triliun, 2016 30 triliun, 2017 31 triliun dan terakhir 2019 29 triliun artinya trend subsidi apa? subsidi untuk pupuk ini naik tetapi kalau kemudian kita ukur hasil dari produktivitas kita, kan turun pak? jadi data kita kan menunjukkan seperti itu, jadi ada peningkatan produksi yang tidak maksimal, tidak berbanding lurus dengan subsidi.

Oleh karena itu ini justru menjadi pertanyaan saya sekaligus menjadi pertanyaan PKS; uang yang sudah digelontorkan, kenapa tidak bisa meningkatkan produktivitas itu? kemana ini? kalau ada potensi-potensi terkait dengan kecurangan atau korupsi di situ layaknya kemudian Pak Jokowi memberikan instruksi khusus turun ke KPK untuk kemudian menyelidiki ini. Jadi ini pertanyaan Pak Jokowi kepada dirinya sendiri yang harus dijawab oleh Kementerian Pertanian dengan aksi nyata ini pak. Ini yang kemudian perlu ditanggapi oleh Kementerian.

Berikutnya terkait dengan saya menyoroti hasil kajian dari pusat studi ekonomi dan kajian pertanian Kementan di mana ada kecenderungan penggunaan pupuk dipetani kita itu overdosis, inikan hasilnya seperti itu pak. Nah itu ada di 51% petani dinyatakan disitu menggunakan pupuk overdosis, nah pertanyaan saya kepada Kementerian; kira-kira peran Pemerintah tentunya dalam hal ini adalah Kementan dengan turunannya untuk kemudian memberikan penerangan, memberikan edukasi kepada petani apa yang sudah dilakukan? ini tentunya saat ini saya kaitkan dengan peran PPL.

Tadi disampaikan oleh Pak Kepala Badan, di mana PPL hari ini kurang tetapi di saat yang sama juga ada perlakuan yang tidak adil pak mohon maaf. Bagaimana kemudian XPMT, XPPL yang sudah dikontrak oleh Kementerian pusat waktu itu sudah mengorbankan dirinya mengabdikan sekian

lama tidak ada kejelasan. Ini juga menjadi, jadi saat kita harus mencerdaskan petani kita, di saat yang sama sebagai ujung tombak untuk kemudian memberikan edukasi ke petani juga diabaikan oleh Kementan sehingga ini dua hal yang nampaknya apa sangat bertentangan, sehingga saya ingin mendapatkan gambaran, apa yang kemudian langkah-langkah yang dilakukan oleh Kementan dalam rangka itu? karena hasil penelitian itu menunjukkan bahwa ketika overdosis, ya semuanya mau pertanian mau obat apa saja ketika overdosis tentunya akan ada efek negatifnya, itu.

Yang keempat yaitu terkait dengan HET, jadi tadi saya hanya ingin klarifikasi ada dokumen yang menyatakan Komisi IV mendukung terhadap kenaikan HET tetapi seingat saya, mohon nanti diklarifikasi itu adalah pernyataan sebelum Covid, setelah Covid terjadi refocusing dan penurunan itu maka kalau tidak salah, mohon nanti di klarifikasi yang inget, itu untuk kenaikan mohon maaf kenaikan HET itu di batalkan. Cuma salahnya waktu itu minta di drop dari kesimpulan bukan harusnya kan kesimpulannya tidak dinaikkan tapi di drop, nah ini seingat saya seperti itu mohon nanti di klarifikasi dan itu berlaku di tahun 2020. Kenapa kesimpulan di tahun 2020? dipakai di 2021. Nah ini nanti mungkin kalau saya salah mohon diluruskan tapi mungkin perlu diklarifikasi bagi temen-temen yang ingat.

Kemudian terkait dengan juga upaya percepatan implementasi kartu pak, saya butuh hal yang riil ini di slide ini, nampaknya ini masih normatif terkait, iya? dengan Himbara, apa yang akan dilakukan terkait dengan percepatan implementasi Kartu Tani? sinkronisasi data RDKK dan Kartu Tani, Dinas Pertanian ini yang didahulukan. Saya butuh jawaban hari ini, *timeline* yang harus pasti pak. Jadi tidak jawaban normatif tetapi mau dikerjakan kapan? dan apa yang akan dikerjakan terkait dengan program-program ini? Jadi ini saya kira penting untuk kita membuat pegangan, inikan normatif saja mau dikerjakan 2024 juga kita nggak paham ini karena nggak ada *timeline* nya. Oleh karena itu saya butuh *timeline* yang jelas untuk program ini. Itu mungkin yang apa yang disampaikan dari Fraksi PKS dan saya sampaikan terima kasih atas kesempatan dan ini pertanyaan tertulisnya yang akan saya sampaikan secara resmi baik kepada Pimpinan Komisi maupun kepada Pertanian.

Terima kasih.

Wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Walaikumsalam.

Silakan Pak Slamet disampaikan.

Selanjutnya untuk bersiap-siap kepada juru bicara Fraksi PDI Perjuangan Pak Sutrisno.

Terima kasih Pak Slamet, silakan Pak Sutrisno.

F-PDIP (Dr. H. SUTRISNO, S.E., M.Si.):

Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.

Sampurasun.

Pimpinan dan para Pejabat Eselon I, Direksi Pupuk Indonesia dan jajarannya.

Langsung pada persoalan pak, yang pertama terkait dengan kenaikan HET pupuk bersubsidi yang tentunya jangkauan di luar, didalam kita sendiri pun masih berbeda pendapat. Ini semua berawal daripada penurunan plafond anggaran tahun 2021 yang hanya dianggarkan 25,276 triliun, manakala ini dikonversi dengan HET lama hanya akan diperoleh kuota pupuk 7,2 juta ton. Pada saat tahun 2020 dengan 26,6 triliun dengan juga alokasi pupuk 7,9 juta ton, kondisi petani terjadi gejolak. Manakala kondisi 7,2 juta ton tidak ada kebijakan pasti gejolak akan lebih terjadi daripada yang terjadi di tahun 2020.

Oleh karena itu mensikapi apa yang dijelaskan oleh Dirjen PSP dari kemarin pada saat RDP yang kemarin dan sekarang ternyata kenaikan HET itu adalah dengan maksud untuk meningkatkan kuota dari 7,2 juta ton menjadi 9,1 juta ton, artinya apa? kesempatan rakyat petani untuk mendapatkan pupuk menjadi lebih luas, lebih besar. Harapannya adalah di tahun 2021 ini karena kuota pupuknya juga mencukupi tidak akan mengulangi kejadian di tahun 2020, manakala itu kondisinya tentunya kita sudah sepatutnya memberikan apresiasi pada kebijakan Pemerintah ini karena orientasi daripada kenaikan HET itu adalah untuk memperluas jangkauan petani mendapatkan pupuk bersubsidi.

Yang dipersoalkan oleh saya adalah hilangnya pupuk 3,1 juta ton di tahun 2020 yang bersumber dari 1,1 juta ton yang bersumber dari APBNP 3,1 triliun. Tentunya orientasi objek data ini dari dapil saya. Jawa Barat dengan adanya tambahan pupuk dari APBNP itu dijatahkan 177.000.499 apa namanya ribu ton dan Majalengka dapil saya diberikan 12.225 ton. Kenyataannya sampai dengan akhir tahun pupuk tidak ada, itu yang menjadi pertanyaan saya; kemana pupuk itu? dan Pak Dirjen PSP, Pimpinan saya mendapatkan 4 desa itu mendapat pupuk bersubsidi dari luar dijual 450 perkg itu bersumber dari Subang dan Indramayu. Ternyata bukan hanya 4 desa, sekarang berkembang banyak desa yang mendapatkan pupuk itu. nah ini mohon Pak Pimpinan agar kita juga bisa mengawasi, kita juga bisa mengetahui untuk masukan direkomendasi kita agar Kementerian Pertanian melaporkan alokasi 1,1 juta ton dari APBNP itu untuk ke mana saja? agar kami Anggota Dewan ini bisa mengontrol di lapangan.

Yang kedua, yang kedua terkait dengan permasalahan pupuk bersubsidi dan Kartu Tani. Kalau kita menyikapi perkembangan penyiapan anggaran maupun juga plafon kuota pupuk yang disampaikan Dirjen PSP dari 2014 sampai hari ini, itu kuotanya sesungguhnya stabil aja antara 8 sampai

8,9 juta ton termasuk permasalahannya adalah kenapa 2019 kesana tidak pernah ada gejolak sebagaimana yang terjadi di tahun 2020 ini. Gejolak itu terjadi karena penyebabnya adalah petani didorong untuk menggunakan Kartu Tani, saat itu aturannya September harus menggunakan Kartu Tani, inilah yang membuat skeptisnya para petani karena para petani pada umumnya belum siap dengan Kartu Tani. Nah oleh karena itu Pak Dirjen, para Pejabat Eselon 1 boleh saya mengatakan, iya?hadirnya Kartu Tani ini tidak akan memecahkan persoalan kelangkaan pupuk dan tidak hadirnya pupuk kepada petani. Statement ini alasannya adalah ada alasan yang permanen, seandainya Kartu Tani itupun juga sudah baik, kondisi ini tidak akan bisa dihindari.

Itu dari keluarnya aturan HET, HET yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertanian turun ke gubernur tidak serta merta hari itu atau 1,2 hari akan segera turun ke kabupaten. Begitu pun juga kabupaten, pejabat yang bertanggung jawab pada masalah itu masih bikin Nota Dinas kepada Kepala Dinasnya. Kepala Dinas meneruskan kepada bupatinya itu, ini pun perlu waktu, artinya apa? waktu petani harus menggunakan pupuk karena belum keluarnya SK itu mangkanya para petani juga tertunda karena pupuknya belum bisa di, dialirkan itu yang pertama.

Alasan permanen yang kedua, alasan permanen yang kedua; kita perlu memahami bahwa proses penanaman padi ada di hulu dan ada di hilir. Waktu tanam di hulu dan di hilir ini sangat berbeda. Yang di hulu itu menanamnya musim tanam nya ada di tahun anggaran yang sebut saja tahun MT 2,20,21 ada di tahun 2020, dari mana sumber pupuknya?sedangkan anggaran untuk tahun 2020 sudah dimanfaatkan oleh MT1, MT 2 dan MP3. Nah yang tadi berkembangnya pupuk dari luar dijual secara gelap, itu bersumber dari hilir, karena dihilir itu baru akan menanam di awal Januari ini. Pupuk tahun 2020 sudah hadir mau dikemanakan itu? ini keterkaitan pada masalah penganggaran, pada APBN karena kita tidak bisa memanfaatkan anggaran APBN 2020 untuk 2021 sehingga pupuk itu mau dikemanakan.

Berikutnya itu dari dari dari teknik pengolahan, semua lini bermasalah dari mulai perencanaan. Sampai hari ini saya baru saja ketemu sama kelompok tani masalah yang kemarin, masih banyak saya dihadirkan bahwa kelompok tani, mereka belum punya Kartu Tani, mereka belum mengajukan Kartu Tani, mereka tidak paham bahwa untuk mendapatkan pupuk itu harus masuk kelompok, mereka tidak paham bahwa untuk mendapatkan pupuk itu harus masuk, harus bikin RDKK itu. Mereka tidak paham setelah ada RDKK, mereka harus punya Kartu Tani, tugas siapa itu untuk mengajak mereka membuat itu?yang terjadi adalah RDKK itu bukan dibuat oleh Kelompok Tani tapi yang membuat adalah Penyuluh karena desakan waktu tekanan dari Bupati, tekanan dari pada Kepala Dinas akhirnya *copy paste* mengambil data yang kemarin karena dibatasi waktu, tidak disiapkan, itu dari sisi perencanaan, yang kemudian kemarin saya bertemu dengan Kelompok Tani. Pak, Kelompok Tani saya menyebar kemana-mana, kepengecer kemana-mana, kami harus mengumpulkan dulu. Jadi koordinasi pemanfaat itu juga tidak, tidak, tidak berjalan.

Dalam konteks perencanaan, di lapangan Pak Dirjen saya berkomunikasi dengan para-para petani, mereka tidak tahu bagaimana komposisi pupuk berimbang? berapa harusnya Urea? berapa harusnya NPK? Berapa harusnya ZA? inilah penyebab membengkaknya anggaran subsidi, iya salah satunya. Manakala kita ingin melakukan efisiensi, meningkatkan produktivitas ini yang harus mendesak untuk diformulasikan, kemana Balitbang? petani semua ilmu *katon*, kalau udah padinya menguning ditambahin pupuk Urea, Urea, Urea dan Urea. Jadi dalam rangka mengurangi beban APBN ini mutlak mendasar harus segera dilakukan; bagaimana formula pemupukan yang terbaik?

Kemudian yang berikutnya; permasalahan Himbara. Saya kemarin ketemu dengan Kelompok Tani di Sumedang, tanaman padi sudah jalan. Mereka mendatangi Bank Mandiri membuat kartu Tani dijanjikan nanti bulan Februari Kartu Taninya akan keluar. Nah kalau kondisi seperti ini padi sudah jalan terus, petani bilang; ada tidak ada pupuk bisa tidak bisa saya beli pupuk, padi harus saya tanam tidak ada pupuk bersubsidi akhirnya saya membeli pupuk non subsidi. Saya katakan berarti beban saudara itu akan akan bertambah, tidak apa-apa pak. Produksi padi yang dipupuk dengan pupuk non subsidi lebih tinggi daripada produksi yang dipupuk dengan subsidi, apa artinya? formula pupuk subsidi berbeda dengan formula pupuk non subsidi, nah ini juga perlu-perlu kejelasan. Kalau ini kondisinya berarti petani hanya sebagai alat, dibohongin pakai pupuk bersubsidi tapi kondisi formulasinya itu berbeda dengan pupuk non subsidi. Nah ini mohon juga menjadi pertimbangan Pimpinan, jangan sampai rakyat jadi korban terus ini. Pantasan kalau, kalau Pak Jokowi bertanya-tanya mana, mana nilai-nilai manfaatnya buat negara karena hanya sebuah nama pupuk tapi formulasinya kurang tidak menyentuh untuk meningkatkan produktivitas.

Kemudian produsen, ini penyebab utama kenapa keributan pupuk di tahun 2020 ada perintah dari produsen kita bulan September untuk tidak mengeluarkan pupuk bersubsidi, ini salah satu penyebab kenapa terjadi keributan. Nah oleh karena itu kalau kita mau lancar pupuk penyediaan pupuk distribusinya harus tepat, harus jumlahnya pun juga harus tepat, apa lagi persoalannya nanti ke depan akan terjadi keributan. Seorang petani tidak bisa membeli pupuk di pengecer lain manakala dipengecer itu tidak tersedia pupuknya, apa artinya? agar masalah itu tidak terjadi, setiap toko pengecer harus *standby* pupuk. Persoalannya tidak semua pengusaha mau menjadi pengecer, dimanakala tidak terjadi pengecer, ada pengecer nan jauh di sana, ini persoalan juga.

Kemudian pada pengecer, pengecer tidak bisa berbuat apa-apa karena lambatnya e-RDCK yang disampaikan kepada pengecer. Kenapa itu terjadi? ini Pak Dirjen kondisi politik pemerintahan kita di era otonomi daerah sekaya apapun, segudang apapun kebijakan Pemerintah Pusat manakala tidak bisa menyambung dengan Pemerintah Daerah otonom tidak akan berhasil. Artinya apa? koordinasi yang baik dengan Pemerintah Daerah Otonom harus dijalankan dengan baik.

Kemudian berikutnya segala macam persoalan yang terjadi kata kuncinya ada “di tangan penyuluh”, “ada di tangan penyuluh. Baik buruknya nanti pelaksanaan pengembangan produk padi disana, baik buruknya petani ada di tangan penyuluh. Penyuluh di kabupaten kota di daerah otonom tidak bisa berbuat apa-apa manakala Kepala Daerahnya tidak peduli, iya akan *bablas angine*. Oleh karena itu solusinya adalah tarik saja Pak Dirjen penyuluh itu jadi komponen dari Kementerian Pertanian agar perintah-perintahnya itu bisa langsung diturunkan, kementerian punya tangan-tangan di daerah, iya? termasuk kendala-kendala Bansos-bansos itu Pimpinan, itu juga ada di sana. Kalau ada penyuluh kan bisa lewat penyuluh nantinya yang akan mengesahkannya, ini dicoba sebagai sebuah solusi mohon menjadi pertimbangan dari kesimpulan kita, oleh karena itu tadi pupuk berformula, pupuk berimbang harus dilakukan.

Saran-saran kami, saran kami ini, saran kami sebagaimana yang tadi juga disampaikan oleh dari PAN itu Komisi IV tidak, tidak berarti tidak mendukung, mendukung adanya produknya Kartu Tani tapi agar Kartu Tani ini tentunya sebagaimana juga sudah masuk diakomodir sebelumnya untuk dikaji ulang karena bukan satu-satunya untuk mengatasi persoalan. Kami menangkap Kartu Tani inikan karena betapa sulitnya KPK, betapa sulitnya BPK untuk memproteksi dimana pembiasan pupuk bersubsidi itu? maka dipakailah Kartu Tani. Kalau itu yang memang ingin dicapai, rakyat petani tidak terkendala, iya? Kartu Tani sebagai identitas. Jadikan Kartu Tani itu sebagai identitas iya? untuk menembus pupuk, bisa sebagai mendendangkan dengan surat, surat sekarang disertai dengan KTP. Itu saja dilakukan akan teramankan karena tidak akan mungkin lagi orang lain memanfaatkan peluang yang diberikan oleh apa namanya, oleh Kartu Tani itu karena akan diamankan oleh masing-masing petaninya atau ada solusi lain?iya? tidak harus dalam bentuk pupuk bersubsidi, bisa saja kayak Bansos Rupiahnya disampaikan kepada, kepada masyarakat sehingga petani bisa, bisa mengambil pupuk dari mana saja. Itu saya kira udah selesai itu, iya mudah-mudahan dari Pak Satgas dapat menambahkan biar dipersilahkan.

Oh iya menghitung kembali kebutuhan pupuk pak, ini yang membuat permasalahan bengkoknya beban dan beban APBN. Hitung dengan cermat kebutuhan pupuk yang valid, tentukan variabelnya gampang tuh, variabelnya adalah saya mohon dijawab ini pak apa namanya apa Pak Dirjen PSP atau Pak Dirjen Tanaman Pangan ini, iya?karena ini sangat menentukan luas lahan baku sawah itu berapa sih?iya?ini yang, yang menjadi persoalan, jangankan rakyat petani jangankan penyuluh, Pak Dirjen Tanaman Pangan saja di dokumennya apa namanya Dirjen PSP memperkirakan apa namanya tanaman 3 kali padahal sangat jarang petani menanamnya tiga kali, kalau itu dilakukan artinya apa?volume pupuk bersubsidi akan tinggi dan itulah sebabnya terjadi pembiasan pupuk kemana dialirkan karena tidak digunakan oleh petani.

Lahan dari, dari BPS, data BPS itu adalah lahan realnya ada 7,1 juta hektar, itu real dari BPS, tinggal berapa kali menanam? dua kali dikalikan 2, kalau tiga kali dikalikan 3, ini sudah melebihi dari pada itu, ini yang

menyebabkan membengkaknya pupuk bersubsidi. Marilah dalam kondisi beratnya beban negara, memperhitungkan anggaran, kita melakukan efisiensi anggaran ya agar tentunya dana-dana yang ada bisa dimanfaatkan untuk masalah Covid, pemulihan ekonomi nasional. Terima kasih Pak Pimpinan.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Sutrisno.

Selanjutnya kami persilakan juru bicara dari Fraksi Partai Gerindra, Pak Azikin Solthan.

F-GERINDRA (Dr. H. AZIKIN SOLTHAN, M.Si.):

Terima kasih Pimpinan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Salam sejahtera untuk kita semua.

Shalom.

Namo Buddhaya.

Salam Indonesia Raya.

Yang kami hormati Pimpinan para Pejabat Eselon I, Direktur Utama PT Pupuk Indonesia *holding company*, Ketua Umum Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

Perkenankan kami menyampaikan pertanyaan dan masukan Fraksi Partai Gerindra dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi IV membahas pelaksanaan penyaluran pupuk bersubsidi dan penggunaan Kartu Tani tahun 2020, rencana tahun 2021. *Alhamdulillah* kita panjatkan kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala, hari ini kita diberikan kesehatan untuk hadir bersama dalam rangka membahas pelaksanaan penyaluran pupuk bersubsidi dan penggunaan Kartu Tani 2020, rencana Tahun 2022.

Sebagaimana kita ketahui bahwa pupuk merupakan salah satu faktor produksi penting dalam usaha tani dan upaya pengelola pengadaan, penyaluran serta penggunaan pupuk telah diatur, dilaksanakan dan diawasi oleh Pemerintah. Namun permasalahan penyaluran pupuk bersubsidi masih saja terjadi di mana-mana.

Komisi IV DPR RI sudah berkali-kali melaksanakan rapat untuk mensupport dan mendukung penyelesaian masalah pupuk namun permasalahan yang sama terus berulang dan Presiden Joko Widodo dalam Rapat Kerja Nasional Pembangunan Pertanian di istana juga menyeroti masalah pupuk.

Berikut, berikut beberapa catatan dari Fraksi Partai Gerindra untuk Dirjen PSP. Pertama, bila masalah pupuk terus menerus berulang, kami menyarankan agar skema subsidi pupuk diganti dengan skema subsidi harga pangan sehingga dapat langsung dirasakan oleh petani.

Kedua, Sosialisasi yang massive tentang aturan pupuk, pupuk subsidi dan Kartu Tani sangat penting sehingga di lapangan tidak menciptakan kebingungan bagi petani.

Ketiga, banyak prasangka dan curiga yang terjadi di masyarakat mulai tepat sasaran, dislewengkan sampai kecurigaan terhadap oknum petugas yang nakal, kemana masyarakat harus melapor? apakah Pemerintah menyiapkan call center atau posko pengaduan?

Keempat, bagaimana proses pengawasan penggunaan pupuk subsidi didistributor dan pengecer? sehingga penyalurannya tepat sasaran.

Sejauh mana tingkat efektivitas Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida atau KP3 dilapangan sehingga pupuk tepat sasaran dan tidak ada penyelewengan? apakah semua daerah sudah memiliki KPPP?

Selanjutnya terkait Program Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) yang sudah berlangsung lama. Kami minta data valid tingkat keberhasilannya sehingga petani tidak lagi bergantung kepada pupuk subsidi. Bagaimana Dirjen PSP menangani kendala di berbagai daerah hingga Januari 2021 para petani yang sudah memiliki Kartu Tani masih kesulitan untuk mendapatkan subsidi pupuk bahkan banyak mendapatkan penolakan karena salah input.

Selanjutnya Dirjen Tanaman Pangan. Dirjen Tanaman Pangan menargetkan musim tanam pertama Oktober 2020 sampai dengan Maret 2021 mencapai 8.206.131 hektar dengan hasil 20 juta ton beras, kami minta penjelasan berapa hasil yang sudah dicapai?

Dalam bahan yang dipaparkan Dirjen Tanaman Pangan disebutkan terkait kajian dampak subsidi pupuk, salah satunya yakni partisipasi penggunaan pupuk mencapai 100% utamanya; Urea, NPK meskipun adanya partisipasi tersebut telah memicu pula kecenderungan di beberapa daerah dalam penggunaannya yang melebihi dosis rekomendasi; upaya apa yang dilakukan? dan daerah-daerah mana saja yang penggunaannya melalui melebihi dosis rekomendasi?

Selanjutnya Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian. Pupuk langka, bagaimana langkah penyuluh dan sejauhmana efektivitas langkah yang diambil selama Covid 19?

Bagaimana strategi verifikasi terhadap rencana *definitive* kebutuhan kelompok atau RDKK yang dilakukan oleh para penyuluh?

Sejauh mana proses pendataan petani? apakah semua petani sudah terdata baik sebagai petani pemilik atau penggarap? Berapa persentase Kartu Tani yang sudah di distribusikan atau digunakan? apakah infrastruktur pendukungnya sudah siap semua di seluruh daerah? sejauhmana peran penyuluh dalam persoalan Kartu Tani? kami minta data keberhasilan dari penggunaan Kartu Tani.

Selanjutnya Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agrobisnis Kemenko Perekonomian. Kemenko Perekonomian diharapkan menjadi Garda terdepan dalam persoalan koordinasi lintas sektoral dibidang pangan namun masalah pupuk selalu berulang, apakah tidak ada formulasi dari Kemenko untuk menyelesaikan masalah ini sehingga tidak terus berulang?

Dalam melakukan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pengolahan, dan penyaluran pupuk bersubsidi pada tanggal 30 September 2019 Menko Perekonomian membentuk Pokja Kebijakan Pupuk Bersubsidi, bagaimana kondisi dari Pokja saat ini? kendala apa yang dialami selama menjalankan tugas?

Selanjutnya Direktur PT Pupuk Indonesia *Holding Company*. Dalam forum ini mohon PT Pupuk Indonesia dapat menjelaskan bagaimana seharusnya penyaluran pupuk subsidi ini agar masalah kelangkaan pupuk tidak terus berulang dan apakah rencana definitif kebutuhan kelompok dan Kartu Tani bisa efektif dan bila tidak kami minta jawaban dari bapak?

PIHC menjadikan seluruh kios menjadi Kios Pupuk Lengkap atau KPL, bagaimana proses KPL di berbagai daerah? seberapa efektif penerapan Kartu Tani dengan menjadikan seluruh kios menjadi KPL ditahun 2020? apakah terdapat kendala yang dihadapi? dan bagaimana menyikapinya untuk tahun 2021?

Berkaitan dengan hasil Rapat Dengar Pendapat tanggal 5 Oktober 2020 yakni Komisi IV DPR meminta Kementan untuk segera menyelesaikan kurang bayar pupuk bersubsidi kepada PIHC bagaimana realisasinya?

Selanjutnya Ketua Umum Himpunan Bank Milik Negara. Pembangunan pertanian harus visioner dan integratif, sejauh mana efektivitas Kartu Tani dalam penyaluran pupuk bersubsidi? karena disisi lain Kartu Tani masih diperlukan oleh petani.

Dalam RDP yang dilaksanakan tanggal 5 Oktober 2020 Himbara memaparkan terkait implementasi Kartu Tani hingga tahun 2021 yang menjadi kesiapan Himbara ialah menjadikan dashboard transaksi untuk penagihan subsidi pupuk oleh Pupuk Indonesia.

Kementan, bagaimana evaluasi dan implementasi Himbara di tahun 2020 dan persiapan yang dilakukan untuk tahun 2021?. Salah satu peran Himbara ialah melakukan pembukuan rekening dan distribusi Kartu Tani berdasarkan data RDKK, hal tersebut didukung dengan penyediaan mesin

EDC di Kios Pupuk Lengkap. Bagaimana Himbara dapat memastikan dan mengawasi bahwa para pemilik KPL dapat menggunakan mesin EDC dengan baik? mengingat kondisi Pandemi Covid 19 tidak dapat melaksanakan pengawasan secara berkala.

Pimpinan dan Anggota Komisi IV yang saya hormati.

Demikian masukan dan pertanyaan yang kami sampaikan, besar harapan kami di tahun 2021 terwujudnya peningkatan kesejahteraan petani dan permasalahan pupuk dapat diselesaikan. Atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, Januari 2021

Komisi IV Fraksi Partai Gerindra,
Ketua,

Wakil Ketua,

G. Budisatrio Djuwandono

Ir. KRT H. Darori Wonodipuro, M.M.

IPU Kapoksi,

- Dr. H. Azikin Solthan, M.Si
- Ir. Endro Hermono, MBA
- DR. Ir. Hj. Endang Setyawati Thohari DESS, M. Sc.
- Ir. H.T.A. Khalid, M.M.
- Renny Astuti, S.H., S.PN.

Dan selanjutnya kami izin Pimpinan untuk menyerahkan langsung berkas ini kepada Pimpinan dan segenap Anggota Eksekutif khususnya Eselon I dan peserta rapat.

KETUA RAPAT:

Silakan Pak Azikin.

Berikutnya untuk bersiap-siap Juru Bicara Fraksi PKB Ibu Luluk Nurhamidah. Silakan Ibu Luluk.

F-PKB (LULUK NURHAMIDAH, M.Si.):

Iya terima kasih Pimpinan.

Bapak, Ibu Anggota Komisi IV dan juga Peserta RDP yang pada hari ini hadir dari Pihak Pemerintah kemudian juga dari Himbara, juga dari Kemenko.

Yang pertama yang ingin kami sampaikan, menyimak juga yang sudah disampaikan oleh teman-teman semuanya, ini persoalan pupuk subsidi sebenarnya terjadi jauh sebelum ada Kartu Tani dan juga ketika kebijakan

Kartu Tani ini diberlakukan artinya bahwa petani dari waktu ke waktu itu selalu menghadapi persoalan yang sama kalau orang boleh berbicara dengan bahasa agak-agak kasar gitu ya kayak Orang Jawa Timuran ini, ini kan seperti pemerintahan itu kayak nggak ada, kenapa? Iya karena memang dari waktu ke waktu persoalannya ini sama terus mungkin dari sejak saya kecil barangkali pak.

Nah saya tidak tahu apakah kemudian kita ini punya pembelajaran dari setiap persoalan yang dihadapi oleh petani, kalau kiranya kita memiliki data dan peta tentang petani yang sangat valid apakah mungkin persoalan yang terkait dengan kelangkaan pupuk ini terus-menerus terjadi kecuali tadi seperti yang juga disampaikan oleh kawan kita sebelumnya, persoalan tentang data adalah persoalan kita yang paling, paling kritis yang itu tidak pernah bisa terselesaikan dengan baik.

Saya masih ingat ketika RDP yang lalu dengan Himbara misalnya ketika saya tanyakan terkait dengan data capaian Kartu Tani yang bisa dihasilkan oleh Himbara, iya? yang dicetak berapa? kemudian yang didiskusikan berapa? yang digunakan berapa? dan seterusnya? meskipun tadi ada beberapa perkembangan tetapi menurut saya perkembangannya juga tidak terlalu signifikan, signifikan banget gitu. Katakanlah dengan lebih kurang 12 juta yang dicetak tapi kemudian ada gap yang masih tinggi dengan yang didiskusikan. Nah persoalannya itu ada dimana gitu? kalau kemudian dari presentasi kalau Ibu Kemenko kalau tidak salah ternyata juga ada faktor-faktor X yang mempengaruhi proses-proses pendistribusian ini terjadi.

Nah faktor x ini kenapa kemudian tidak dieliminasi? misalnya mulai dari soal politik, soal Pilkada, ada momen-momen lain di daerah yang ini menghambat kerja, kerja kita untuk memberikan pelayanan kepada petani. Itu kalau memang faktor penyebabnya seperti itu tetapi pertanyaan saya sebenarnya apakah pendistribusian Kartu Tani ini oleh Himbara katakanlah begitu harus sepengetahuan dan seizin Pemerintah Daerah? apakah Himbara tidak bisa atas dasar data yang dimiliki itu kemudian mendistribusikan Kartu Tani nya sendiri? misalnya bersama penyuluh, misalnya seperti itu atau kemudian cara-cara lain yang lebih memungkinkan melalui kelembagaan yang ada di desa bisa Bumdes, atau apa yang ada di desa karena, karena kita melihat gap nya yang masih sangat, sangat tajam iya? antara yang dicetak dan yang distribusikan malah kemudian ada pikiran yang dicetak ini apakah sebenarnya masih kartu kosong gitu pak? jadi belum ada datanya sehingga ini tinggal diisi aja kalau misalnya udah ada data yang lengkap, komplit baru kemudian diinput namanya tapi ini kayak kartu-kartu lain aja yang tidak punya arti apa-apa, ataukah sebenarnya yang dicetak oleh Himbara ini sebenarnya ya memang data riil sebagaimana data yang ada di RDKK katakanlah seperti itu, baru kemudian kita lihat ada problem di distribusi.

Nah kalau problem distribusi, saya ingin justru Himbara yang bisa secara terbuka dan jujur mengatakan kepada kita.

Kemudian yang kedua tadi juga kita lihat bahwa di beberapa perbankan ya misalnya BRI, BNI sama Mandiri yang terkait dengan KPL yang sudah dilengkapi dengan EDC jadi mesinnya itu BRI relatif yang paling tinggi dibandingkan dengan yang lain akan tetapi juga jumlah petani yang menggunakan kartu itu juga masih sangat kecil.

Lah ini kan, ini kan unik gitu loh pak dan itu pertanyaan juga yang sama yang saya ajukan beberapa bulan yang lalu tapi ternyata pada pertemuan kali ini juga tidak terlalu ada perubahan yang signifikan. Jadi dalam kurun waktu yang berbeda ini apa yang sebenarnya sudah dilakukan? dan koordinasi yang seperti apa yang sudah dilakukan juga oleh Kemenku sehingga carut-marut yang terkait dengan pupuk ini tidak terus terulang dan terjadi berlarut-larut? kemudian yang kedua dalam pikiran saya ini yang terkait dengan Kartu Tani kemudian juga pupuk subsidi kalau misalkan ditanya gitu mohon maaf Ketua, ini *lead* nya itu siapa sih gitu? pilotnya ini siapa? kuatirnya ini *autopilot* pak. Kalau tidak salah presentasi ibu tadi itu mencoba memaparkan masing-masing ini punya kesalahan *nyuwun sewu*, misalnya Himbara, oh kurang pedulinya untuk mendistribusikan, kemudian dari pihak penyuluh mungkin kurang pendampingan, oh dari pihak ini, dari pihak ini. Lalu kemudian siapa yang menilai dari pihak ini? apakah ini yang kemudian dilakukan oleh Kementerian Perekonomian?

Jadi kalau dalam hal ini apakah bisa dikatakan bahwa posisi Kementerian Kemenko ini yang menjadi *leader* dari urusan pupuk subsidi dan Kartu Tani? ini, ini pertanyaan iya bu ya? karena ini kan kayak autopilot aja, masing-masing tiba-tiba punya jalannya sendiri-sendiri gitu, karena apa? ada beberapa hal yang ternyata belum terlalu berubah. Termasuk kemudian yang saya agak-agak apa ya? sedih sebenarnya meskipun tadi beberapa pihak teman kita sudah bisa atau mencoba memahami yang terkait dengan kenaikan HET akan tetapi sekali lagi apakah ini sudah benar-benar cara terbaik untuk mengatasi kelangkaan pupuk? karena saya khawatir kalau cara kita menyelesaikan masalah justru akan menciptakan masalah baru yang itu lebih memilukan karena apa Karena memang nasib petani itu sampai sekarang tidak, tidak terlalu baik pak apalagi di masa Pandemi ini, dimana biaya-biaya produksi mereka itu juga sangat tinggi meskipun tadi diungkapkan biaya produksi yang kaitanya dengan pupuk itu relatif kecil karena dipakai untuk sewa lahan tetapi ini kan semua harus dihitung gitu karena kalau kemudian itu tidak dihitung iya petani tidak bisa bekerja, dia tidak memproduksi. Itu adalah fakta kondisi petani kita, kita mau berpikir tentang petani yang mana? mau negara yang lain? *impossible* gitu. Makanya kenapa kebijakan itu harus dibikin, dirancang, skenarionya nya itu dalam konteks petani kita di Indonesia yang kondisinya masih seperti itu.

Nah kemarin saja *nyuwun sewu* ya, HET tidak naik, HPP tidak turun sebenarnya kondisi petani itu udah naik turun sendiri gitu. Saat panen aja juga harga-harga kemudian ketika pada berjatuhan, yang lain juga begitu dan ketika kita kemarin coba ketemu, iya? dengan *constituant* mereka begitu tidak berdaya bu. Petani kita ini luar biasa karena mereka tidak mungkin melakukan sosialisasi kepada Pemerintah karena mereka juga tidak tahu kalau ada

masalah ini harus ngomongnya kepada siapa? bayangkan ada yang putus di situ. Seperti tadi yang saya bilang soalnya ini sebenarnya ke siapa ini masalah kalau ada kelangkaan pupuk petani itu nanya ke mana? meminta pertanggungjawaban itu kesiapa? salurannya melalui mana? Kepala Desa, Kepala Desa kagak ngerti. Penyuluh, nggih nyuwun sewu, ada juga yang nggak bisa menjawab apa-apa gitu.

Saya kira ini beberapa hal yang memang karena pertanyaannya juga tidak spesifik ke siapa? karena ini juga pertanyaan saya. Jadi mohon nanti masing-masing bisa menjelaskan posisinya? perannya dan sekaligus tanggung jawab yang dilakukan gitu ya?

Nah kemudian yang berikutnya Bapak Ibu Mitra yang saya hormati. Saya ingin juga pendapat dari Kementerian Pertanian karena Kementerian Pertanian ini menurut saya sangat penting karena posisinya adalah melindungi kepentingan para petani kita. Kalau misalnya HPP turun kemudian kenaikan HET ini bisa dibayangkan nggak Pak Dirjen kemudian juga Bapak Dirjen Tanaman Pangan kira-kira dampak dan konsekuensi yang memang itu secara langsung akan diterima kepada petani itu seperti apa dalam kondisi pandemi seperti ini? kalau tadi misalkan sempat ada saya nggak tahu itu sekedar usulan atau sudah direncanakan misalnya Bansos dari Kemensos berupa Bansos pupuk atau kemudian sebagian BLT dana desa itu juga digunakan pupuk, apakah itu tidak bisa dijadikan alternatif ketimbang misalnya menaikkan HET dalam kondisi seperti ini? kita bicara ini dalam konteks pandemi juga yang memang daya tahan petani menurut saya juga masih sangat rapuh tetapi mereka justru kan yang bekerja untuk menyanggah kita semua gitu.

Jadi sekali lagi menurut saya Bapak Kementan dan juga dari Pihak Kemenko dan juga PT Pupuk mungkin saya nggak tahu ini keterkaitannya. Sekali lagi apakah kebijakan ini sudah saling terkoordinasi baik kenaikan, penurunan dan lain-lain yang kemudian harus dilihat petani kita *happy* nggak dengan adanya kebijakan ini? karena kalau kemudian petani kita tidak *happy*, saya khawatir itu menjadi doa buruk buat kita semuanya gitu karena upaya kita dan sampai hari ini perjuangan kita ini minimal memberikan bahagia kepada petani. Soal pupuk yang langka itu aja udah masalah dan kemudian pendekatan kita menyelesaikan masalah seperti itu apalagi ternyata kelangkaan juga tetap terjadi.

Nah ketika skema ini yang ditawarkan tapi kemudian juga kelangkaan tetap terjadi bahkan petani harus menebus pupuk subsidi itu dengan harga yang bukan normal, harga yang juga lebih mahal di atas yang harga normal HET itulah pak, apakah kemudian ini layak untuk kemudian dijadikan pilihan jalan keluar mengatasi misalnya kekurangan anggaran itu? nah saya setuju kalau kemudian kita memulai negara ini jujur kepada rakyatnya yang terkait dengan kemampuan negara ini memberikan pelayanan kepada rakyatnya terutama kepada petani. Petani ini satu kegiatan aktivitas yang jauh lebih tua umurnya daripada konsep negara bangsa. Udah ribuan tahun yang namanya pertanian itu ada sehingga mereka tahu cara-cara untuk survival sebenarnya

gitu tetapi daya tahan petani ini justru seringkali kita keroskan, kita lemahkan dengan kebijakan-kebijakan yang tidak masuk akal gitu. Saya hanya mohon ini sekali lagi jadi pertimbangan kita semuanya jangan sampai ketika perhatian kita untuk entah itu keunggulan ekonomi dan lain sebagainya tetapi ada entitas dari masyarakat kita yang sebenarnya punya peran yang sangat signifikan untuk memastikan bahwa pangan kita aman tapi justru bukan hanya terganggu, kita korbakan dia. Jadi mohon jangan kita korbakan petani itu.

Nah yang terakhir saya kira Bapak Ibu sekalian, mungkin saya cuman mau tanya di Jawa Tengah itu ada 35 Kabupaten Kota, saya hanya ingin kepastian apakah ini memang pilihannya kabupaten tertentu yang memilih untuk tidak mengajukan SP36, tetapi yang aneh dari 35 Kabupaten Kota di Jawa Tengah itu ada tiga daerah kota yang tidak ada SP 36 nya untuk anggaran 2021. Nah persoalannya 2 kabupaten yang itu kebetulan dapil saya; Kabupaten Sragen dan Karanganyar yang Bapak Dirjen itu tahu bagaimana potensi pangan ada di sana itu justru 0 untuk SP36 dan kemudian alokasi pupuk untuk 2021 dibandingkan dengan 2020 bukan hanya berkurang 50% bahkan ada yang berkurang 60 sampai 65%, itu yang saya terima dari salah seorang rekan dari PT Pupuk Indonesia yang kemudian dilampirkan SK Gubernur.

Nah ketika saya tanyakan ini gimana proses penetapannya itu? lalu di sampaikan beberapa hal tapi yang intinya lagi-lagi, saya khawatir ada *miss* ya pak ya antara entah Kementerian Pertanian kemudian juga PT Pupuk Indonesia.

Saya kira itu dari saya Fraksi PKB, atas perhatiannya terima kasih. Salam sehat untuk semuanya, semangat Indonesia!.

*Wallahul muwafiq ila aqwamith thoriq.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

KETUA RAPAT:

Terima kasih Ibu Luluk Nurhamidah dari Fraksi PKB.

Berikutnya kami persilakan Pak Charles Meikyansyah dari Fraksi Partai Nasdem, kami persilakan.

F-NasDem (H. CHARLES MEIKYANSYAH):

Baik.

*Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.*

Yang saya hormati Pimpinan Komisi IV, Rekan-rekan Komisi IV dan Dirjen PSP, Dirjen TP, Dirjen Kepala BPPSDM, kemudian juga dari Kemenko

Perekonomian serta Dirut Pupuk Indonesia dan Pak Dirut lainnya dan Himbara.

Hampir sama Nasdem pada siang hari ini, izinkan kami membacakan dulu beberapa hal yang menjadi pokok-pokok pemikiran yang ada di Nasdem yang terkait dengan berbagai hal terkait yang sudah kita bicarakan dari pagi hingga siang ini. Sebagai sebuah pengantar kami menyatakan pupuk subsidi merupakan salah satu komponen penting produksi pertanian oleh petani meskipun demikian yang menarik dari porsi biaya pupuk dari total biaya produksi padi sebenarnya tidak terlalu besar yaitu hanya 9,4% dari total biaya. Porsi ini tentu sangat jauh dari porsi upah buruh tani yang mencapai 48% dan sewa lahan yang mencapai 25,6%. Permintaan pupuk non subsidi juga terus meningkat seiring dengan peningkatan luas areal perkebunan khususnya kelapa sawit, karena itu Pemerintah melakukan subsidi pupuk untuk meringankan biaya produksi pertanian. Setiap tahunnya alokasi subsidi pupuk terus meningkat dari sisi pembiayaan pada tahun 2011, 10 tahun yang lalu biaya subsidi mencapai Rp16,3 triliun dan menjadi Rp27,9 triliun pada tahun 2015 dan terakhir menjadi 29,8 triliun pada tahun 2020 lalu.

Seperti kita ketahui awalnya Pada tahun 2020 lalu, alokasi pembiayaan subsidi pupuk hanya disetujui oleh DPR RI sebesar Rp24,5 triliun atau setara dengan 7,9 juta ton pupuk bersubsidi. Akan tetapi merebaknya pandemi COVID-19 tidak terkecuali di Indonesia membuat seluruh kementerian dan lembaga melakukan realokasi, refocusing dan atau pengurangan anggaran. Kondisi di lapangan yang banyak memberikan adanya kelangkaan pupuk terjadi cukup masif di lapangan sehingga menyebabkan adanya penambahan anggaran untuk subsidi pupuk sebesar 1 juta ton sehingga jika ditotal alokasi pupuk bersubsidi setara dengan 8,9 juta ton.

Bapak dan Ibu-ibu sekalian.

Terkait dengan e-RDKK dan Kartu Tani, E-RDKK atau i rencana ke definitif kebutuhan kelompok adalah acuan bagi alokasi pupuk subsidi yang diberikan oleh Pemerintah. Penggunaan RDKK sebagai acuan dalam implementasi pupuk bersubsidi telah dikeluarkan rekomendasinya oleh KPK dan BPK. Namun demikian masih ditemui berbagai persoalan di lapangan yang masih harus mendapat perhatian sangat serius, misalnya adanya kebutuhan berdasarkan RDKK pada tahun 2021. Kebutuhan pupuk bersubsidi mencapai 23,3 juta ton atau senilai Rp 67,12 triliun sementara itu kemampuan APBN 2000, 2001 tidak bisa memberikan sesuai dengan kebutuhan subsidi pupuk. Pemerintah hanya bisa memberikan subsidi sebesar Rp 25,276 triliun sehingga ada kekurangan sekitar 41 triliun lebih sehingga bisa kita perkirakan pada tahun 2021 ini kemungkinan adanya kelangkaan pupuk subsidi ini pada tahun 2021 akan benar-benar terjadi dan mungkin dalam skala yang lebih besar. Persoalan lain yang juga patut diwaspadai oleh Pemerintah dan kita semua adalah terkait dengan database petani yang tergabung dalam Kelompok Tani , Poktan atau Gapoktan. (Gabungan Kelompok Tani).

Data menunjukkan bahwa sekitar 42% petani Indonesia tidak menjadi bagian dari Poktan maupun Gapoktan, akibatnya verifikasi dan kebutuhan dan alokasi subsidi pupuk akan sulit dilakukan. Terkait dengan Kartu Tani implementasinya masih cukup banyak permasalahan karena kompleksitas dan implementasinya. Dari total target 13,9 juta penerbitan Kartu Tani, Kartu Tani yang telah didistribusikan mencapai 6 juta Kartu Tani namun Kartu Tani yang sudah digunakan, sesuai dengan fungsi dan kegunaannya baru 1,2 juta. Kondisi teknis dilapangan ikut memberikan dampak bagi sulitnya implementasi Kartu Tani diantaranya adalah masalah nama, alamat petani tidak sesuai dengan data yang diberikan. Petani juga sering lupa dengan PIN karena memang mereka tidak punya budaya untuk memegang kartu. Kartu Tani belum terisi alokasinya, EDC kemudian rusak, belum lagi gangguan signal atau signal memang tidak ada dan permasalahan-permasalahan strategis dan teknis lainnya, kondisi ini tentu harus menjadi perhatian dan fokus untuk perbaikan kinerja.

Saran kami dari Fraksi Partai Nasdem. Pertama, perlu dilakukan upaya khusus berupa penyempurnaan dan verifikasi data petani pada sistem i-RDKAA. Setidaknya dengan cara integrasi, dengan NIK (Nomor Induk Kependudukan yang dikelola oleh Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil.

Selanjutnya bisa dilakukan upaya pengisian luas lahan pada sistem Penyuluh Pertanian yang dikelola oleh Badan Penyuluh dan SDM Kementan. Pendamping petani guna mengurangi ketergantungan terhadap pupuk kimia melakukan upaya sosialisasi, pendidikan dan pembelajaran agar pemupukan sesuai dengan anjuran Balitbang Kementan mendorong pupuk organik untuk mengembalikan kesehatan dan seterusnya.

Saya tadi ada 1 hal yang disampaikan oleh dari teman-teman PDIP, saya sepakat kalau memang yang disebut dengan penyuluh itu merupakan organ penting kenapa kemudian kami merekomendasikan agar kemudian Penyuluh Pertanian itu diambil oleh pusat dalam hal ini Kementerian Pertanian bukan oleh dinas-dinas yang sekarang ada? karena saya tadi ada satu diskusi yang juga menarik bahwa Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian perlu ketahui; kenapa kemudian data untuk pupuk subsidi sekarang belum ada beberapa daerah yang belum memberikan? ini juga tidak terlepas dari Pilkada 2020 lalu, banyak *incumber* atau orang-orang yang kemudian memang selesai kemudian kalah dan kemudian tidak memberikan data-data tersebut.

Saya pikir ini 200 lebih Pilkada kemarin memang menyisakan beberapa *incumber-incumber* yang juga banyak kalah. Pertanyaan penting kami sebagaimana data RDKK yang sudah ada untuk kebutuhan pupuk bersubsidi tahun 2021 terdapat GAP atau kesenjangan yang cukup lebar. Saya ingin bertanya apa dan bagaimana langkah dari Kementan melalui Dirjen PSP, Dirjen TP dan BPPSDM untuk bisa mengatasi kelangkaan pupuk yang dibutuhkan oleh petani? ini depan mata kita semuanya pak.

Kemudian untuk PT Pupuk Indonesia, saya bicara sedikit sebuah data yang saya dapat juga Pak Bakir dan kawan-kawan di Pupuk, kami mendengar bahwa piutang Pemerintah untuk pengalokasian pupuk bersubsidi sangat besar iya pak? berdasarkan hasil audit yang telah dilakukan dari tahun 2015 hingga 2019 jumlahnya mencapai Rp 11,2 triliun dengan rincian per tahun adalah 45,1 miliar tahun 2017 Rp 5,57 triliun tahun 2018 dan 5,4 triliun pada tahun 2019. Pada tahun 2020 yang masih belum diaudit jumlahnya bisa mencapai 2,3 triliun kurang lebih segitu, sialnya.

Nah ini saya bilang sialnya naiknya piutang atas pupuk subsidi setiap tahunnya dan naiknya pembiayaan untuk subsidi pupuk tidak berjalan seiring dengan peningkatan produksi pangan pokok seperti beras. Produksi padi stagnan diangka 59 juta ton pada tahun 2018 dan turun menjadi 54 juta ton pada tahun 2019 lalu. Jika dirata-rata sejak tahun 2015 hingga 2019 atau di masa kepemimpinan Pak Jokowi tiap tahunnya ada penurunan produksi padi sebesar 0,22%, Memang pada tahun 2020 lalu produksi padi meningkat dibandingkan 2019. Pertanyaan kami kebutuhan pupuk subsidi yang terus meningkat memberikan beban yang berat di APBN kita, sampai dengan saat ini saja piutangnya sudah mencapai 11,2 triliun belum ditambah dengan piutang tahun 2020 yang dalam proses audit. Bagaimana langkah yang akan ditempuh oleh Pemerintah untuk segera melunasi hutang tersebut? lalu apakah ada masa jatuh tempo dan seterusnya? jadi saya pernah diskusi dengan beberapa Dirut Pupuk mereka menyatakan pupuk bersubsidi sebenarnya ada pak katanya dia tapi kami juga tidak mungkin menyalurkan pupuk kalau kemudian tidak ada permintaan dari Pemerintah.

Kemudian saya tadi sempat tanya ke rekan saya yang cukup aktif di Komisi IV Saudara Kiky dari PDIP, soal tadi ada dari data tentang perubahan komposisi ini pak ini kepada Pak Dirjen PSP mungkin ya. Ada yang menarik yang ingin saya pertanyakan pak, perubahan komposisi 15-15-15 menjadi 15-10-12 berapa sebenarnya, berapa persen sebenarnya efisiensi HPP nya pak? ini perlu saya tanyakan. Saya pikir itu yang perlu kami sampaikan, terima kasih dan mohon izin kami menyerahkan ini kepada Pimpinan maupun kepada Bapak-bapak undangan sebagai pertanyaan atau kumpulan pertanyaan dari Fraksi Partai Nasdem.

Terima kasih.

Wabillahi taufik wal hidayah.

Wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Silakan Pak Charles dari Fraksi Partai Nasdem.

Berikutnya untuk siap-siap dari Fraksi PPP, Pak Kyai Asep Maoshul Affandy.

F-PPP(KH. ASEP AHMAD MAOSHUL AFFANDY, S.Sy):

Siap.

Terima kasih.

*Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.
Wassalamun alamatabil tabalhuda.*

Ketua yang terhormat dan sahabat-sahabat dari Kementerian Pertanian, juga rekan-rekan Anggota Komisi IV.

Yang paling Inti atau pokoknya adalah bagaimana petani mendapatkan pupuk dan Pemerintah hampir tiap tahun memberikan subsidi yang loncatan pada tahun ini sangat tinggi sekali tetapi kenyataan kelangkaan atau kesulitan petani mendapatkan pupuk masih terus aja berlanjut. Selain kesulitan mendapatkan pupuk yang terus berlanjut, juga dampak dari pupuk yang disubsidi karena hampir seluruhnya berbasis berbahan kimia itu menimbulkan aus atau malah tanahnya menjadi tidak subur, maka dalam hal ini pikiran kita bukan saja memberikan subsidi pupuk tapi yang terpenting adalah bagaimana petani ini bisa mendapatkan pupuk? selain jenis pupuk yang diberikan kepada para petani ada baiknya pula para petani ini juga bisa membuat pupuk sendiri; apakah itu dari pupuk kandang sehingga kita bisa menggenjot para petani juga bisa memelihara hewan-hewan yang kotorannya bisa dimanfaatkan? semisal kelinci dan sebagainya.

Dilapangan ada yang lucu malah, ada banyak petani yang enggan memanfaatkan pupuk tersebut dengan alasan jijik atau mereka tidak paham bagaimana cara membuatnya? bahkan kotoran sapi berlimpah dimana-mana hanya jadi sampah saja. Maka dari itu selanjutnya solusi salah satunya adalah dengan adanya Kartu Tani, tetapi juga dibawah Kartu Tani ini kan namanya juga petani kebanyakan dari petani itu juga nggak paham tentang dunia perbankan bahkan mereka juga nggak paham sebelum atau walaupun mereka ada maunya untuk mendapatkan Kartu Tani ini maka mereka sudah segen duluan, dia bilang ribet susah, berbelit-belit dan sebagainya. Terkadang sosialisasi juga salah satunya yang menjadi masalah, sosialisasi tentang bagaimana untuk bisa mendapatkan Kartu Tani juga tidak sampai.

Maka dalam hal ini, oleh karena kecenderungan kesulitan para petani mendapatkan daripada Kartu Tani ini tolong dipermudah sehingga yang anggapan mereka yang katanya berbelit-belit, tidak lagi berbelit-belit. Saya kebanyakan para petani juga nggak paham dunia perbankan dan tidak hanya satu-satunya petani mendapatkan pupuk toh sudah ada BUMDES, bagaimanapun pula diberikan itu kepada Badan Usaha Milik Desa, mereka lebih paham kepada masyarakatnya, jadi ini yang pertama.

Yang kedua dengan demikian oleh karena sosialisasi yang kurang tolong pihak Kementan ini juga bisa menekan bawahan yang nggak ada didaerah itu untuk benar-benar mensosialisasikan daripada bagaimana cara

mendapatkan karena belum apa-apa mereka sudah ketakutan duluan karena nggak tahu terkadang dikibulin atau menjadi sasaran lain.

Bapak-bapak yang terhormat.

Pada kesempatan ini karena saya sebagai anggota DPR RI juga sering ditanya, terkadang saya juga bingung ini kok nanya ke saya gitu tapi walau demikian sebagai Mitra Anggota Komisi IV tempat saya secara pribadi, saya juga menyarankan bagaimana yok Anggota DPR juga yang di Komisi IV Ini bisa juga mensosialisasikan berbarengan dengan dirjenya atau bareng dengan dinasnyanya sehingga mereka benar-benar juga bisa mendapatkan informasi yang lebih layak. Jadi terkait pupuk sekali lagi, saya sangat serius tolong ini bener-bener serius jangan hanya mampu menaikkan subsidi dari tahun ke tahun tanpa fakta di lapangan dan tidak hanya sekedar pupuk yang akan kita berikan tapi juga berikan pula para petani ilmu-ilmu bagaimana cara membuat kompos pupuk sendiri. Itu saja barangkali yang ingin saya sampaikan, saya mewakili kapoksi saya Ibu Ema ya? terima kasih saya nggak banyak-banyak bicara *to the point* aja.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Wassalamun alamatabil tabalghuda.

KETUA RAPAT:

Pak Kyai, silakan pak.

Berikutnya untuk siap-siap Ibu Nura'eni dari Fraksi Partai Demokrat dan yang terakhir nanti dari Fraksi Partai Golkar abang kita Bapak Salim Fakhri.

Silakan Bu Nura'eni.

F-PD (HJ. NUR'AENI, S.Sos., M.Si.):

Terima kasih Pimpinan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat siang.
Salam sejahtera bagi kita semua.

Pimpinan dan Anggota Komisi IV yang saya hormati,
Para Dirjen, Direktur Pupuk Indonesia, Himbara, serta mitra Komisi IV yang hadir disini.

Dalam kesempatan yang baik ini tentu saya ingin menyampaikan beberapa hal berkaitan dari persoalan yang kita bahas pada kesempatan siang hari ini baik itu berkaitan dengan Permentan dengan Nomor 49 tahun 2020 tentang kenaikan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi, Kartu Tani,

maupun dari persoalan Himbara perbankan yang dalam hal untuk teknis penyaluran Kartu Tani. Kaitan dengan kebijakan Permentan Nomor 49 tentang kenaikan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi. Jujur saja ini saya sangat kecewa serta saya melihat kurang tepatnya Pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan tersebut mengingat kondisi saat ini sedang Covid di mana perekonomian kita juga sedang mengalami penurunan, iya? kontraksi, begitu juga dengan petani kita.

Dari sisi proses pun ini juga sangat mengecewakan, sebagai mitra Komisi IV kami pun belum pernah untuk bisa diajak berdiskusi untuk bisa bagaimana pengambilan keputusan ini diberikan pandangan-pandangan dari Komisi IV walaupun tadi disampaikan bahwa ada bentuk rekomendasi tapi kan beberapa teman juga menyampaikan rekomendasi itu masih *debat table* ya? karena yang kita inginkan bahwa walaupun harga eceran tertinggi ini akan dinaikkan, ada beberapa alternatif kebijakan yaitu program subsidi silang untuk diberikan kepada petani kita.

Contoh misalkan kalau pun Pemerintah ini sudah, sudah mengeluarkan keputusan yang seharusnya disampaikan pada kesempatan yang baik ini Kementerian Pertanian itu menyampaikan dong langkah-langkah untuk dilakukan program-program strategis yang lainnya, yang diberikan subsidi silang seperti misalkan yang seharusnya kalau ini dinaikkan harga gabah kering petani juga harus ikutin tingkatkan bisa juga misalkan program yang lain seperti subsidi yang lain; pemberian obat-obatan untuk hama wereng dan sebagainya, ini juga masih menjadi kendala. Pompanisasi bahkan untuk diberikan subsidi dari Pemerintah, nah kekecewaan ini tentunya ini harus menjadi evaluasi karena saya memandang bahwa Komisi IV sebagai mitra seperti dianggap sebelah mata yang seharusnya memang kita difokuskan dan kita sebagai perwakilan dari masyarakat kita yang memang kita di bidang pertanian ini yang menjadi pertanyaan besar dari masyarakat kita. Betapa mungkin temen-temen sama, tiap-tiap wilayah, tiap-tiap provinsi ini mengalami kelangkaan baik itu pupuk bersubsidi maupun pupuk non subsidi, berbicara pupuk bersubsidi saja menjadi persoalan.

Kalau boleh jujur juga, saya juga memandang ini tidak konsisten Pemerintah melalui Kementerian Keuangan yang memberikan slot kepada Kementerian Pertanian di sini Kementerian Pertanian dilepas begitu saja untuk melakukan strategis optimisasi untuk bisa ada alternatif lain menutupi kebutuhan-kebutuhan anggaran yang ada, menutupi kebutuhan pupuk. Kalau idealnya adalah 23 juta ton kebutuhan pupuk di seluruh Indonesia ini, akan tetapi kita tahu bahwa setiap tahun yang digulirkan Kementerian Keuangan dengan Badan Anggaran kepada Kementerian Pertanian. Ini walaupun meningkat dari sisi volume akan tetapi tidak memenuhi terhadap kebutuhan pupuk seluruh Indonesia bahkan di sini saya mendengarkan langkah-langkah strategis optimasi anggaran pupuk subsidi ada 3 katanya bahwa Kementerian untuk menutupi kekurangan anggaran 7T yang seharusnya memang dianggarkan kurang lebih 29T, iya ada kekurangan 7T ini 3 langkah yang ingin saya tanyakan bahwa terhadap langkah kedua perubahan formula NPK 15 15; apakah ini lebih baik? apakah ini mungkin lebih meningkatkan produksi

pertanian walaupun alasannya adalah efisiensi? kita memahami kejiwaan dari Kementan akan tetapi tiga langkah itu juga belum tentu juga untuk bisa menjawab terhadap persoalan nanti di masa yang akan datang.

Berikutnya kaitan dengan Kartu Tani memberikan apresiasi terhadap Kementerian bagaimana nanti kedepan petani diajak modernisasi, bagaimana ke depan juga pengelolaan Pertanian melalui modernisasi Kartu Tani ini yang tujuannya menimalisasi penyelewengan dan mempercepat distribusi akan tetapi kendala tadi yang disebutkan semua teman-teman sebutkan ini hendaklah dipersiapkan sedemikian mungkin. 2021 Jawa yang akan menjadi pilot project untuk penyaluran Kartu Tani. Banten sendiri pak 2020-2021 ini masih wilayah Jawa sebetulnya dekat dengan ibukota negara, apa yang terjadi? Kartu Tani juga masyarakat petani disana belum menerima pak, belum bisa difungsikan, jangankan difungsikan barangnya saja mungkin tidak jelas. Nah pertanyaannya dari 8,29 juta kartu yang dicetak ini ke mana barangnya sebetulnya? apakah ini hanya proyek saja cetak kartu ini 8 juta x 25.000 perkartu, inikan duit sebetulnya, ini realistis ya. Silakan kontrol pak di Banten kalau tidak percaya ayo disaat saya reses bapak-bapak ikut di sana, berapa persen sih petani yang sudah menerima Kartu Tani?

Kaitan dengan Himbara, dari beberapa bank milik negara hanya BRI yang secara mungkin kinerja iya? untuk bisa membantu para petani ini dalam penyaluran Kartu Tani. Kalau yang lain saya kira masih minim apalagi BNI ini tentu kita ingin tahu apa sebetulnya persoalan kendala dibawah. Berikutnya dengan tadi yang disampaikan oleh Pak Dirjen, siapa yang paling ujung itu bahwa luas lahan pertanian kita ini kan mengalami penurunan apalagi banyaknya alih fungsi lahan di tiap-tiap daerah baik itu alih fungsi lahan diakibatkan adanya pembangunan infrastruktur berjalan baik itu alih fungsi lahan berkaitan dengan pengusaha mungkin developer dan lain sebagainya, perumahan dan sebagainya; nah pertanyaan saya, apakah dari anggaran serta kuota pupuk yang direncanakan, yang diajukan dengan kondisi tadi bapak sampaikan luas lahan yang semakin berkurang ini apa yang dilakukan? kenapa kuotanya bertambah sementara luas lahan pertanian semakin menurun? berarti apa, ada apa di sini? apakah memang menyusun rencana serta data ini cenderung asal-asalan atau hanya *copy paste* dari tahun-tahun sebelumnya? ini yang harus dijawab oleh Bapak-bapak semua. Mungkin itu hanya yang dapat saya sampaikan, terima kasih.

Wabillahi taufiq walhidayah.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Ibu Nura'eni.

Berikutnya kami persilakan Pak Salim Fakhri dari Fraksi Partai Golkar. Singkat, padat dan jelas, silakan Pak Ketua. Silakan.

F-PG (H. M. SALIM FAKHRY, S.E., M.M.):

Terima kasih Pak Ketua yang belum dapat jodoh.

Pak Ketua yang kami hormati,
Pemerintah yang terhormat,
Rekan-rekan Anggota Komisi IV yang kami hormati.

Saya langsung saja, masalah harga eceran pupuk subsidi naik tetapi kenaikan volume pupuk bersubsidi inikan bertambah namun belum bisa menyelesaikan masalah kekurangan alokasi pupuk. Untuk itu hendaknya mari kita tinjau ulang perhitungan HPP pak. HPP pupuk yang bersubsidi jangan sampai subsidi untuk petani berkurang tetapi subsidi dinikmati oleh perusahaan pupuk. Ini merupakan suatu mungkin nanti pertanyaan bagi kami. Yang kedua seringkali terjadi penyimpangan, penyaluran dan pemalsuan pupuk oleh distributor tetapi yang kena sanksi hukumnya hanya distributor saja sementara Pemerintah sudah melakukan kontrak dengan Pupuk Indonesia. Distributor bekerja atas kontrak Pemerintah dengan Pupuk Indonesia hendaknya seharusnya setiap penyimpanan penyaluran pupuk tersebut, Pupuk Indonesia harus juga dikenakan sanksi hukum karena kelalaian dari pengawasan Pupuk Indonesia.

Kami bersependapat dengan tadi teman dari Fraksi PDIP dan Pak Charles dari Nasdem masalah penyuluh;rusaknya e-RDCK adalah tidak jelasnya data dari kabupaten. Tadi seperti arahan Pak Ketua; apakah Pemerintah tidak mempunyai *database*? jawaban Pemerintah ada. Saran kami dari Fraksi Golkar hendaknya di setiap desa di Republik Indonesia ini minimal harus ada satu penyuluh. Kalaulah memungkinkan ini diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil supaya jangan ada kecemburuan antara guru kontrak yang sudah diusahakan menjadi PNS, ini juga ketika kita reses selalu menjadi masalah.

Pimpinan yang kami hormati.

Kuatnya penyuluhnya ini saya kira ini bisa membangkitkan semangat, bagaimana penyuluh ini mau mendata e-RDCK sementara penyuluhnya tidak sejahtera Pak Ketua. Bagi Pemerintah, bagi Bupati Gubernur yang paham dengan penyuluh, mungkin ada bantuan dana subsidi silang yang dikeluarkan melalui APBD daerah masing-masing namun kebanyakan Pemerintah Kabupaten kota atau provinsi tidak memberikan perhatian khusus kepada penyuluh-penyuluh kita, makanya saran kami dari Fraksi Golkar agar penyuluh tersebut ditarik menjadi Pegawai Pusat. Yang lebih ironis lagi Pak Ketua kena otonomi khusus, Bupati menempatkan seorang Kepala Dinas Pertanian tersebut mungkin dari guru, dia sama sekali tidak memahami pertanian apalagi mengarahkan penyuluh, makanya Pemerintah Pusat harus fokus bagaimana pemberdayaan penyuluh ini.

Kalau kami tidak salah RDP beberapa waktu yang lalu, kami pernah sarankan kepada Pemerintah agar memang kesejahteraan penyuluh ini

benar-benar kita perhatikan, jangan kesejahteraan, baju penyuluh pun payah pak, sementara mereka banyak yang kontrak, jangan UMR setengah UMR saja tidak ada. Masalah pupuk, saya kira semua di Indonesia ini adalah masalah pupuk subsidi pak, tidak ada 1 kabupaten kota pun yang tidak bermasalah, subsidi terus. Tadi Pak Dirjen sudah mengatakan Pak Ketua sudah apa tadi namanya? tanpa ada koordinasi dengan Komisi IV juga HET pupuk harga tadi sudah dinaikkan namun saran kami sebagai Anggota Pak Ketua kedepannya, kalau ada perubahan-perubahan dari Pemerintah, apa salahnya tidak pun minta izin kepada Komisi IV hendaknya ada sebuah pemberitahuan. Tadi Pak Dirjen sudah katakan, sudah ditegur oleh Pak Sekjen Bagian hukum pak ya? besok rapat lagi tegor lagi. Kadang-kadang nggak ada gunanya Pak Sudin ini ngamuk-ngamuk saja, abis ngamuk habis begini capek-capek aja nih Pak Ketua.

Kedepan harapan kita semoga teman-teman dari Pemerintah baik dari Bapak Himbara, Ibu Deputi yang lain-lainnya permasalahan masalah pupuk ini haruslah kita secara arif dan secara bijaksana karena ini adalah tumpuan dari masyarakat kelas bawah. Demikian Pak Ketua, terima kasih.

Wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Terima kasih.

Memang kalau dari Aceh kalau bicara sangat pandai sekali, maka saya jadikan nanti juru bicara Komisi IV beliau.

Bapak ibu yang kami hormati.

Sekarang sudah pukul 13.30 WIB, takutnya nanti ada yang mau shalat. Kalau nanti perutnya kosong, kepalanya pusing, asam lambung naik. Saya skors kembali ke ruangan pukul 14.00 WIB.

(RAPAT DISKORS)

(RAPAT DIBUKA KEMBALI)

Rizky belum datang? Berarti Pak Fransiskus Lema silakan.

Oh Pak Mindo duluan, silakan. habis ini Rizky Aprilia.

F-PDIP (Ir. MINDO SIANIPAR):

Terima kasih Pak Ketua Rapat.

Saudara-saudara dari Pemerintah, saya tentu tidak akan mengulang lagi apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman tadi, tapi 2 saya minta informasi lebih dalam, tadi dari Pak Sarwedi ya, tadi kelihatannya ada 27 juta

hektar untuk pertanaman, iya itu jadi IP nya berapa itu? saya ingin tahu di mana saja yang IP nya 2 dan saya yakin IP nya 3 hanya sekian persen, pasti kurang dari 5% dari luas area kita yang bisa IP 3, bisa sampai 20 sekian juta itu ya? iya jangan apa kita ini membuat hati senang, jangan. Kita ngomong apa adanya lah, terus seliwer dulu itu kan ada muncul berita disini IP 4 x 400 dari Hongkong apa?iya?paham gitu lah ya? kita yang real-real saja supaya kita tahu mengatasinya.

Yang kedua anda tadi sebenarnya pertentangan antara Pak Suwandi ya? bukan Pak Suwandi, Pak Sarwo Edi dengan Ibu yang dari Kemenko. Tadi keterangan Ibu tadi itu pertanaman secara umum maksudnya untuk padi itu ya? 300 NPK, 200 Urea. Konsep itu perlu anda ketahui bukan dari Kementerian Pertanian awalnya, bukan, itu dari Petrokimia Gresik waktu debat dengan kerasnya saya di sini sampai 2 Masa Persidangan. Mungkin Pak Suwandi masih Eselon berapa waktu itu ya? saya tantang habis sampai 2 malam, saya siap berdebat secara teoritis dan lapangan mengganti rezim pupuk tunggal menjadi rezim pupuk majemuk. Itu konsepnya 15-15-15, mengapa dibuat 15-15-15? karena diperkenalkan waktu itu tanah itu untuk kebutuhan padi secara umum hara N dibutuhkan 150 kilo, Hara P 45, Hara K 45, itulah sebabnya dibuat 15-15-15. Pertanyaan saya ke Pak Sarwo Edi, kapan terakhir bikin survei geospasial?kenapa jadi 15-10-12? bagaimana nanti rakyat petani melaksanakannya itu? jadi kalau dikatakan P masih banyak di tanah "yes", K masih banyak di tanah, terikat dengan tanah "yes". Tetapi menurut saya teman-teman dari pabrik secara teknis nanti mengkaji lebih benar, bukan ininya yang dirubah, bukan komposisinya yang dirubah. Jadi jangan disebutkan ini dalam rangka efisiensi, jangan. Bagaimana rakyat menggunakan supaya produksinya lebih besar? karena masa waktu 3 bulan, *sorry* Pak Ketua ini harus teknis sekali, saya bicaranya dengan mereka ini karena masa waktu 3 bulan sampai 4 bulan nanam padi itu keterikatan K2O tidak terurai semua dalam bentuk ionnya, jadi nggak diserap oleh akar, begitu juga Pospad B2O5.

Itulah sebabnya dulu ada orang yang memasarkan Pupuk Hayati Mikrobial yang dengan gagah perkasa mengatakan tidak membutuhkan lagi pupuk an organik, sebenarnya apa yang terjadi? Mikrobial yang mereka tawarkan itulah mengurai sisa-sisa Pospad, sisa-sisa Kalium yang terikat dalam tanah, jadi Bu Menko belajar lebih banyak soal itu ya supaya nggak salah kebijakan kita, iya? supaya nggak salah kebijakan kita, saya kira Pak Sarwo Edhy coba diitulah. Saya kira Pak Ketua dalam Panja Pupuk nanti, kita harus lebih mendalami ini dengan sungguh-sungguh karena saya jangan-jangan Pak Sarwo Edhy, berapa kebutuhan Hara masing-masing itu dari jumlah sekian banyak PPL itu, saya nggak yakin 40% ngerti. Gimana dia mau mengerti semangatnya nggak ada, dia mereka itu ada istilah begini ngomong ke saya ; "pulang malu dari tugasnya nih, pulang kerumah malu, nggak pulang rindu sama anak katanya". Dia sudah pakai pakaian Pegawai Negeri Sipil ini, tak diangkat-angkat, iya? dia sebenarnya malu dia, selalu pakai PNS ini, malu dia tapi kalau enggak pulang, dia rindu sama anak. Jadi apa yang dikatakan temen dari Golkar tadi Pak Salim Fakhry dan teman-teman jauh sebelum juga mengatakan, coba kita perhatikan lagi itu.

Nah khusus untuk subsidi, jadi subsidi mungkin kita andaikan, andaikan. Andaikan gasnya diturunkan harganya, mungkin sekarang sekitar 6 dolar per saya tanya tadi sore informal gak bisa jawab, berapa sih harga pokok produksi termurah Gas Indonesia? harga pokok produksinya? kalau misalnya nemu, eh ternyata enggak sampai 4, kenapa Kementerian energi harus menjual kepada rakyat 6 lewat Pabrik Pupuk? inikan kantong kiri, kantong kanan ini. Itu makanya istilahnya Pak Kwi Kian Gie dulu nggak ada katanya itu subsidi bahan bakar itu, kantong kiri kantong kanan kok, negara punya sama-sama, coba masuk juga ke sana.

Jadi biarlah di Komisi IV ini nanti Pak Ketua kan bisa mengundang lintas kementerian, kita tuntaskan ini soal pupuk ini. Yang paling banyak mungkin dari menjelaskan bahwa subsidi terbanyak itu mungkin karena Urea ya? padahal belum tentu untung mereka karena Urea. kalau mereka tidak membeli gas, iya? Gas pupuk urea itulah campuran gas sama N₂ dari udara. Kalau gas nggak dibeli, mereka bisa menjual Amoniak keluar, nggak perlu dia kan gitu pabrik pupuk ini tapi rakyat menderita. Nah ini harus juga kedudukan-kedudukan seperti itu kita pikirkan, kalau Phospat dari Jordan kita ya? Kalium dari Kanada dari Rusia kan begitu. Itu sesuatu yang tidak bisa kita bikin, harga dolar naik, naik pula harga jualnya, harga pokok produksi, mau ndak masuk subsidi jadi naik juga, itu kita maklumi seperti itu. Tapi coba pergi ke arah sana pak, harga pupuk ini bisa kita tekan berarti subsidinya akan berkurang kalau harga gasnya berhasil kita turunkan. Saran saya kepada Ketua dalam Panja Pupuk yang kita teruskan itu, itu bagian yang harus kita bicarakan, terima kasih Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Mindo usulan yang bagus, jadi nanti pada Rapat Kerja dengan Menteri Pertanian kita undang Dirut PIHC dengan membawa perhitungan biaya pokok pembuatan pupuk dan lain-lain, supaya jelas dan transparan.

Terima kasih *wejangannya* Pak Mindo, sekarang izin temen-temen Pak Dedi mau ngomong sedikit. Silakan Pak Dedi.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI/F-PG (H. DEDI MULYADI, S.H.):

Terima kasih.

Yang pertama dari aspek pupuk itu kan yang ada pupuk non subsidi. Kalau pupuk non subsidi itu berarti ada keuntungan, kalau untung logikanya maka pupuk subsidi tersubsidi lewat pupuk non subsidi bukan lagi menjadi beban APBN lagi untuk membayar full pupuk subsidi, itu yang pertama. Kemudian yang kedua tadi Pak Mindo tadi bicara persoalan gas, saya sepakat bahwa kenapa gas yang keluar negeri lebih murah dibanding dengan gas untuk kebutuhan pupuk? padahal kalau mensubsidi rakyat, subsidi petani tidak usah juga lewat dana APBN, langsung dalam bentuk tunai membayar biaya produksi ke Pupuk Indonesia tetapi bisa saja gas yang

ditekan. Karena itu adalah kekayaan alam kita sehingga tidak usah lagi ada subsidi APBN, cukup saja subsidi gas dalam bentuk menjual gas yang murah. Mungkin dibawah harga ekspor.

Yang berikutnya juga mungkin kan pupuk juga kan kirim pupuk ekspor, berarti ada untungnya juga. Komponen untungnya bisa semakin mengurangi subsidi itu yang pertama.

Yang kedua adalah wilayah, kan tujuan dibikin dulu oleh era Orde Baru bikin Ujung, Pusri, Kaltim itu kan wilayah. Kalau sudah wilayah menurut saya kalau ingin efisien yang Kujang menggarap wilayah Jabar, Banten dan mungkin sebagian perbatasan dengan Jawa Tengah wilayahnya. Kaltim garap Kaltim tapi saya lihat inikan masih dari sini lari kesini produksinya, dari sini lari kesini produksinya. Nah artinya pembagian wilayah kerja produksi di Pupuk Indonesia berdasarkan wilayahnya saja belum selesai. Saya minta ini Pupuk Indonesia mengedepankan aspek wilayah agar apa? agar produksinya dan biaya distribusinya lebih murah kan ini penting.

Berikutnya juga perlindungan nonteknis, saya ini orang lapangan pak. Kita juga Komisi IV juga nanti harus ketemu dengan para distributor. Para distributor di lapangan ini juga banyak menemukan kendala non teknis, nggak usah saya sebutin deh di sini. Mereka didatangi A, mereka didatangi B ini juga semakin mengurangi keuntungan mereka dan akhirnya membebani petani lagi. Kan dari mana ngambil tuh nonteknis A, B, C, D kita paham lah. Di lapangan saya pengaduan mereka sering saya dapatkan. Kemudian inilah barangkali yang menjadi titik fokus utama yang terakhir, saya tadi mengingatkan kembali kalo ngomongin petani itu susah apalagi dibuat data IT.

Saya berikan contoh penggarap areal sawah di wilayah utara Jabar, itu yang ribuan hektar itu yang mengerjakan sawah yang menanamnya bukan yang punya tetapi mereka yang sewa dari mulai 1/2 hektar sampai 1 hektar. Mereka sewa tidak punya areal sawah tapi mereka hanya sewa berarti secara ekonomi mereka adalah petani kecil yang harus tersubsidi. Dengan pola area wilayah berdasarkan area di mana dia punya sawah, bagaimana nasib para penyewa ini yang jumlahnya puluhan ribu? ini juga tidak mungkin juga kalau dibikin menjadi kartu lagi.

Nah inilah problem sehingga naik ketika nanti di tempat pupuknya ada banyak tapi tidak punya kartu, iya areal tempat biaya sewa-nya nggak bisa lagi padahal mereka adalah kelompok masyarakat yang harus disubsidi. 1 meter sawah pun mereka nggak punya, mereka sewa artinya mereka harus disubsidi, kenapa? mereka adalah petani penggarap, kan begitu? tetap saja petani penggarap, nah itu dan kemudian lintas lagi dia domisilinya di desa A, sawahnya di desa Bahwa, parah lagi nggak dapat lagi. Susah lah kita ini pakai metodologi ini, kenapa? beda pendekatan pola perbankan dengan pola petani. Perbankan itu semuanya terdata pak, petani itu kalau di semuanya dibikin data, saya katakan Indonesia bisa selamat negeri ini, bisa terjaga dari periode ke periode tidak jatuh rakyatnya karena satu, rakyat petani yang tidak

terdata di perbankan itu yang menyelamatkan Indonesia dan itu sistem perang digital pak.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Dedi.

Selanjutnya Ibu Rizky Aprilia M.

F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):

Terima kasih Pimpinan.

Kepada kalau saya kepengen nanya ini mumpung ada ini kepada Kemenkeu dan Himbara serta PIHC. Rapat terakhir Ibu juga duduk di sini ya kalau nggak salah yang gabungan ya? bu ya?

KETUA RAPAT:

Bukan, bukan Ibu Musdalifah. Dia lagi kurang sehat.

F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):

Oke, harusnya dia yang datang kesini sih ya, tapi ya udah.

Terakhir Rapat di Komisi IV, di KK IV ini juga kita berbicara skema tapi skema ini kan tadi, seperti yang tadi pemetaan yang dilakukan oleh Himbara, apakah bapak memikirkan daerah 3T pak? jangan terus-terusan, maaf saya tahu Kementerian Keuangan ini diskresinya luar biasa, potong 6T tanpa mikirin 6T nya ini dari mana, iya? sedangkan hari ini program pemulihan ekonomi nasional digenjot, iya? gituloh. Sadar tidak sadar setelah Korona berlalu, kami dengan Pak Budi sayangnya Pak Budi udah nggak ada. Itu sempat menghadiri forum FAO Pimpinan waktu itu tentang *nursery farming*, iya *family farming*, sorry. Inikan berarti kita semua sudah sadar bahwa pasca Korona berlalu, apakah sektor pangan ini bisa diselamatkan atau tidak?

Nah hari ini pemulihan ekonomi nasional harusnya ibu menteri keuangan sebagai bendahara negara itu juga memperhitungkan itu. Yang sudah ada seharusnya di *support*, kan begitu? yang sudah ada. Tadi saya sempat diskusi juga dengan senior saya; Pak Mindo, Pak Sudin dan juga beberapa senior yang sudah berperiode, periode di sini. Ini juga sebenarnya wajar apakah mungkin alih fungsi lahannya juga yang sudah berkurang, petaninya berkurang tapi pupuknya tetep aja bu. Ibu pakai logika aja saya mah bukan Insinyur bu tapi logika dagang bego juga kita tahu ya bu ya? tanahnya kurang, padinya kurang, petaninya kurang, pupuknya. Lah kalau ibu pingin potong, potong aja dari pupuk bu, orang gak jelas, apalagi hari ini ada Pak Bakir yang sempat kontroversial, Komisi IV sempat rame gara-gara

bapak. Iya *statement* Bapak di Komisi terkait ya yang waktu itu bapak hadir rapat, wah saya cuma ketawa aja. PIHC sekarang semua di take over oleh PIHC; mulai dari bahan baku dan lain-lain, apa yang bener nggak pak? iya atau enggak aja sih pak biar cepet, iya toh? berarti *sorry*.

KETUA RAPAT:

Maksudnya apa?

F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):

Nggak pak.

KETUA RAPAT:

Take over maksudnya apa? saya nggak jelas.

F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):

Iya bahasa, bahasa saya bahasa gampang aja, iya pak? ini Direktur-direktur Anak Perusahaan ini cuma tukang jaga perusahaan doang, tukang jaga kandang pupuk pak. Kalau gitu daripada ngabisin duit negara bu, bubarin aja ini, gituloh. Suruh pecat-pecatin aja, ngabisin duit negara kok bu, semua diambil PIHC, begitu Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Maksudnya diambil apa sih maksudnya?

F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):

Iya nanti silakan Pak Bakir menjelaskan. Pak Bakir lebih tahu secara teknis kewenangan, apapun teknis. Saya dari awal berbicara dengan Pimpinan waktu itu bahwa bahan baku pupuk dan lain-lain, sampai masalah distribusi dan lain-lain, ini jadi yang namanya anak perusahaan ini kan kayak apa? di sini ada siapa aja? saya nggak hafal nama pupuk ini; ada Kujang ada nggak tadi? Kujang, Kaltim. Kalau saya punya Pusri Sumsel itu, iya kan? gitu loh.

Jadi ya tadi Pak Pimpinan, Pak Dedi minta perteritori, teritori yang mana? kalau saya ya maaf Bapak Direktur ya, mungkin sebentar lagi bapak akan kehilangan pekerjaan, iya? gara-gara bapak jadi beban negara pak, itu aja kan begitu? iya maaf Pimpinan, jangan marah, jangan melotot sama saya. Saya ngomong apa adanya aja, saya itu baca di berita berdasarkan yang saya baca, iya seperti itu, gitu loh.

Jadi kenapa saya fokus ke PIHC dengan Kemenkeu dan ada Himbara juga. Kalau memang nggak ada faedahnya ini yang namanya pupuk-pupuk

dan direktur anda ini, potong aja dari situ bu, itu aja, jangan petani yang jadi korban.

Saya mungkin kalau diizinkan menampilkan slide bu, tadi saya sudah foto. Kebetulan dari saya kan kebetulan punya nomor yang berinteraksi langsung dengan konstituen dan sosial media yang langsung berinteraksi dengan konstituen, iya? kalau diizinkan Pimpinan, boleh nggak Pimpinan?

KETUA RAPAT:

Iya ini kalau fakta boleh, hoax tidak boleh.

F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):

Nggak ini fakta Pimpinan karena....menampilkan.

KETUA RAPAT:

Tampilkan.

F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):

Kalau *hoax* tidak ada pak, ini ya? siapa? ini Bahasa Palembang, Bahasa Palembang pak karena kebetulan saya seorang Palembang. Tidak seimbang lagi harga pupuk dan obat-obatan apalagi sekarang harga pupuk subsidi sudah naik, naik harganya, rumit e-RDKN nya, rumit proses penembusannya, barangnya kosong juga. Maaf ditandai, siapa tahu nyampe ke Ayuk Riezky Aprilia. Itu tandanya tuh di bawah tuh, ada kan bukti gambarnya mereka kasih, iya toh? saya di lapangan terus pak jadi terkadang kebijakan pusat ini berdasarkan penerawangan dari Google saja semenjak canggihnya ini tapi ibu-ibu tidak berhadapan atau bapak-bapak tidak berhadapan. Kami ini 55 orang di KK IV ini yang berhadapan langsung dengan konstituen bu apalagi Pak Mindo yang sudah, ada lagi juga senior-senior; Kang Khoer, Pak Sudin dengan yang lain, Bang Rudi, apalagi kami anak baru, baru duduk sudah dimaki-maki nih.

Jadi saya berharap ya? sekarang apa *warranty* nya? kalau memang PIHC ini men *take over*? apa jaminannya bahwa pupuk akan lebih baik Pimpinan? udah, berarti kan ini udah bapak-bapak abis ini pak pulang aja, orang bapak nggak ada faedahnya juga duduk di sini, begitu loh. Begitu Pimpinan maksudnya, maaf Pak saya... agak bingung dengan negara ini sama halnya dengan Kang Dedi gitu, iya? kalau masalah tadi Pak Dirjen TP, Pak Dirjen PSP ego sektoral di setiap Kementerian ini, ini yang mengakibatkan negara ini hancur. Padahal kalau kerjanya apa ya? kerjanya itu gotong-royong gitu, saya yakin ini bisa terselesaikan dengan baik gitu. Jangan semata-mata; *everything is about business, you can not business without people*, kan begitu bu? siapa yang mau ngerjain bisnis itu kalau nggak ada? 4 *point zero*. Udah deh enggak usah ngomong 4 *point zero* di daerah saya sama Ibu Reni tadi, tahu persis sinyalnya nggak ada, apa yang mau di

EDC in pak? saya berkali-kali bilang, terakhir Bapak Himbara duduknya di sini, saya duduk sebelah sana, benar nggak pak? iya kan pak? inget nggak pak? saya aja inget pak, iya? makanya saya punya kekecewaan. 1 tahun saya duduk di DPR ini, nggak ada faedahnya kita DPR ini ngomong, tetep aja dicuekin, toh tetep nyelonong toh. Permentan 49 2020 muncul tanpa pemberitahuan kepada DPR, bukan begitu Pimpinan? jadi Ibu Kemenkeu, iya? oh Kemenko? oh ya udah Kemenko deh, iya? Ibu Kemenko, Bapak Himbara, Bapak PIHC, iya? Bapak-Bapak dari direktur-direktur jaga pabrik. Saya nggak mau bilang direktur.

KETUA RAPAT:

Bukan direktur...udah ganti.

F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):

Kepala Pabrik, iya kan? karena benar bu, kalau Ibu bicara memberatkan anggaran bukan dari 6 T teknis bu tapi 6 T anggaran manajemen ini yang harus koreksi termasuk pupuk. Ini pernyataan kami hari ini dan saya mohon maaf mungkin ini akan menjadi berbeda dengan teman-teman. *Holding pangan ini selalu jadi masalah bu, holding pangan; apakah pupuk ini akan bernasib sama seperti Bulog? iya kan begitu menjadi pertanyaannya Bu? lahannya kurang. Ibu rumusnya begitu aja bu; lahannya kurang, padinya kurang, pupuknya nambah. Saya tidak mau Komisi IV seperti halnya kasus yang pernah terjadi dengan E-KTP bu. Ibu coba hitung ulang tadi; berapa kartu yang harus dikeluarkan? sedangkan sekarang katanya sudah ada e-KTP. Tadi Pak Mindo ngajarin saya, ih itu elektronik? gitu ya pak ya? e-, itu elektronik ya pak? Pak Mindo? iya toh? nah terus kita ini seperti arahan juga waktu kita acara kemarin lah, permasalahannya big data pak. Kita nggak pernah punya data, hobinya main proyek bu, hobi bener? e-RDKK, e-KTP, e-apalagi? semua e-? tapi nggak ada satupun data, iya? jadi tolong Ibu.*

KETUA RAPAT:

Cukup?

F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):

Belum. Sedikit lagi pak, dikit lagi, iya?

Jadi saya harap Ibu sebagai Kemenko, Himbara, PIHC tolong di evaluasi ulang. Cabut saja pupuk subsidi daripada menjadi ajang korupsi baru. Kepalangan dikomersialin aja sebelum terjadi seperti Bulog, masih ada waktu untuk memperbaiki. Demikian Pimpinan, terima kasih.

KETUA RAPAT:

Luar biasa antara hoax dan kenyataan saya agak jelas.

Selanjutnya Pak Fransiskus Lema.

F-PDIP (YOHANIS FRANSISKUS LEMA, S.IP., M.Si.):

Terima kasih Pimpinan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua.

Soal pupuk bersubsidi, pertanyaan besar dan mendasar ini sebenarnya subsidi pupuk ini menguntungkan siapa? siapa yang menikmati ini? ini pertanyaan yang harus menjadi refleksi kita bersama. Secara konseptual kalau kita bicara subsidi, subsidi ini mulia dan baik karena merupakan keberpihakan negara terhadap rakyat secara konseptual tetapi secara faktual subsidi ini tanpa data dan pengawasan yang ketat akan menjadi... akan menjadi praktek... karena itu saya akan mencermati masalah ini bukan sekadar pada aspek distribusi dan manajerial semata tetapi ada pada aspek-aspek...

Nah beberapa waktu lalu 1 pekan persis kalau tidak salah, itu Presiden Jokowi itu marah soal pupuk bersubsidi. Ini orang Jawa menyampaikan kemarahannya secara terbuka, terang-terangan itu berarti sudah kebangetan dan Presiden marah itu, itu adalah juga kemarahannya Komisi IV, sejak setahun lalu dan juga merupakan kemarahannya Rakyat Indonesia pak. Jadi tolong ini, jangan dianggap masalah sederhana, jangan dianggap sebagai masalah yang sifatnya rutinitas belaka. Fakta dilapangan tadi sudah disebutkan, petani butuh pupuk, pupuknya tidak tersedia, begitu ada terlambat tidak sesuai dengan masa tanam, kuotanya juga kurang, harganya juga tinggi. Subsidi setiap tahun tidak berkurang 25-30T, produktivitas pangan dan pertanian kita tidak pernah naik, tidak pernah naik, lahan kita berkurang.

KETUA RAPAT:

Pak Fransiskus Lema hanya menjelaskan kalau produksi selalu tiap tahun naik.

F-PDIP (YOHANIS FRANSISKUS LEMA, S.IP., M.Si.):

Naik tapi tidak signifikan pak.

KETUA RAPAT:

Datanya?datanya?

F-PDIP (YOHANIS FRANSISKUS LEMA, S.IP., M.Si.):

Naik tapi tidak signifikan.

KETUA RAPAT:

Nggak, saya katakan lagi datanya, tapi kenyataannya saya nggak tahu.

F-PDIP (YOHANIS FRANSISKUS LEMA, S.IP., M.Si.):

Kalau naik, iya berarti Presiden tidak marah. Kalau Presiden marah itu berarti ada yang serius dan saya catat betul dalam masalah pertanian, baru kali ini Presiden marah, minggu lalu pada saat Rapat Kerja Nasional Pembangunan Pertanian, baru kali ini. Karena itu momentum ini harus dipakai untuk membenahan secara fundamental pak. Saya mau tanya Kementerian Pertanian, saya baca semua ini disini saya baca. Yang disampaikan pak, kami cuma disodorkan angka-angka saja. Saya tidak mendapatkan evaluasi mengenai faktor-faktor penyebab dan solusi yang komprehensif untuk menyelesaikan masalah mengenai carut-marut pupuk bersubsidi, tidak ada. Tidak ada saya lihat disini karena itu saya ingin mendapatkan penjelasan evaluasi dari Kementerian Pertanian karena ini 30 triliun yang dikeluarkan tidak jadi apa-apa barang ini, tidak jadi apa-apa pak.

Saya setiap turun ke Dapil, dimarahin orang di Rote, di Sabu, di Timor, di Flores, marah semua dan ternyata syukur, puji tuhan, *alhamdulillah*; minggu lalu Presiden marah, wah berarti ini benar nih yang dilaporkan masyarakat dan Komisi IV omong benar. Kalau tadi Pak Ketua banyak bicara pada aspek hilir, saya mau menegaskan pada aspek hulu.

Saya mendesak terus terang pak, Komisi IV ini mungkin perlu mendorong supaya Pabrik-pabrik Pupuk ini, iya Komisi IV perlu mengirimkan *mechanical engineer* dan *chemical engineering* untuk pergi ke Pabrik Pupuk ini supaya kita bisa mengetahui betul persis harga pokok produksi. Kita perlu mengetahui itu pak dengan anggaran untuk menghasilkan 1 ton pupuk bersubsidi, itu kita keluarkan berapa Rupiah sih? sampai hari ini tidak ada yang bisa menjelaskan itu. Kita butuh transparansi dan akuntabilitas soal itu, jangan sampai seolah-olah setiap tahun negara ini, Pemerintah dan DPR ini seolah-olah berutang kepada pabrik Pupuk tetapi kita tahu nggak yang sudah terjadi, ini tata kelolanya itu efisien atau Inefisien? tepat sasaran atau pemborosan? ini kita harus betul-betul meluruskan pak, jangan sampai selama bertahun-tahun ini sebenarnya negara tidak perlu mensubsidi, tidak perlu berhutang karena yang terjadi adalah inefisiensi dan pemborosan. Karena itu saya kira, saya mendesak Komisi IV kalau bisa secara serentak mengirimkan *mechanical* dan *chemical engineering* untuk pergi ke Pabrik Pupuk ini untuk hitung semua. Audit secara komprehensif pak karena kalau tidak, nanti kita ini hanya akan saling menuduh pak, iya? saya tidak mau nanti terkesan seolah-olah Pemerintah ini berhutang, padahal di sisi sana tidak ada hitungan- hitungan yang pasti. Soal Kartu Tani iya sudahlah tadi teman-teman sudah banyak bicara soal data pak, iya data ini saya mau sampaikan kalau saya bicara tadi soal lagi, iya memang data ini tidak pernah ada komitmen untuk dibenarkan, kenapa? iya data yang tidak benar itu menjadi sasaran untuk permainan. Selama kita masih berputar-putar di sini, saya tidak akan melihat ini sekedar sebagai teknis manajerial, saya akan melihat ini sebagai

praktek saya kira itu pak, kalau bisa kita dorong untuk Komisi IV ini harus mengirimkan ahli-ahli yang saya katakan tadi; *mechanical dan chemical engineer* ke Pabrik Pupuk ini untuk mengukur ini efisiensi yang terjadi atau pemborosan begitu? diluar negeri itu biasa begitu, iya? Pabrik Pupuk itu dihitung, begitu dikasih masuk; harga gas dan segala macam ketahuan 1 ton itu berapa Rupiah dihasilkan? saya kira demikian yang saya sampaikan, mohon maaf kalau agak marah karena terus terang pak, rakyat juga maki-maki kita setiap saat. Mereka main ngelu, saya juga tidak bisa menjawab, abis mau jawab apa pak. Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Pak Fransiskus Lema seperti yang saya sarankan tadi, nanti pada waktu Rapat Kerja dengan Kementerian Pertanian, kita undang PIHC dengan membawa berapa sih biaya produksi? berapa sih bahan baku? berapa Dollar kenaikannya? berapa harga pertonnya? berapa harga gas 1nya? kan itu yang paling gampang yang kita lihat dulu. Kalau memang kita enggak percaya, baru kita cek lapangan. Kita gampang kok panggil konsultan, Komisi IV nggak miskin-miskin amat panggil konsultan.

F-PDIP (YOHANIS FRANSISKUS LEMA, S.IP., M.Si.):

Pak Ketua.

Pak Ketua seolah-olah baru tahu mengenai kelakuan-kelakuan seperti ini, iya mohon maaf kalau tadi saya bilang, kita kirim ke masing-masing Pabrik Pupuk itu berarti saya mengalami *distras* Pak Ketua. Ini bagian dari *ri check* kita, pengawasan kita Pak Ketua. Saya usulkan malah tadi bukan lagi minta apa namanya tadi ki? PIHC untuk membeberkan itu pak. Menurut saya kita buat aja investigasi, kirim secara serentak bersama-sama kalau bisa ini ahli dari dalam dan luar negeri. Kita hitunglah berapa pak? kalau kita mau menyelesaikan persoalan ini. Mengingat setiap tahun rata-rata 30 T dan itu besar pak, besar sekali pak.

KETUA RAPAT:

Selanjutnya Mbak Alien, silakan.

F-PG (ALIEN MUS, S.H.):

Baik terima kasih Pimpinan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat sore.

Salam sejahtera bagi kita semua.

Yang saya hormati Pimpinan Komisi IV, Bapak/Ibu Komisi IV dan juga beserta Dirjen Eselon I dari Kementerian Pertanian, Direktur PT Pupuk Indonesia dan juga disini ada perwakilan dari Kemenko, Bapak/Ibu sekalian yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu.

Salam sehat bagi kita semua.

Oh Pak Darori mau tanya?soalnya mau ngangkat kodenya kesaya, oh gitu.

Baik saya ingin menyampaikan ada beberapa hal yang sudah disampaikan sebelumnya oleh rekan-rekan saya dari Komisi IV, tiada. Saya mau sampaikan bahwa memang masalah untuk pupuk ini tadi juga saya melihat langsung dari paparan bu siapa tadi namanya? bu? iya?

**ASISTEN DEPUTI II BIDANG KOORDINASI PANGAN DAN AGRIBISNIS
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN (ISMARINY):**

Bu Ismarini.

F-PG (ALIEN MUS, S.H.):

Ibu Isma juga ada pemaparan juga dari BUMN ya?yang disini ini?yang ini, punya siapa ini? ini aku melihat banyak sekali pemaparannya dan disini saya selalu berbicara soal data dan memang data yang disampaikan sesuai dengan kebutuhan kita itu hampir 23 juta ton pertahun tapi memang disubsidi 30% sehingga yang bisa disiapkan itu hampir sekitar 12 sampai 13 juta ton dan ini juga sudah disampaikan oleh beberapa rekan saya tadi di Komisi IV bahwa memang kenapa sih?kenapa sih tidak ada transparansi bahwa pupuk yang bersubsidi itu hanya sampai 12 sampai 13 juta ton? karena melihat kebutuhan petani yang ada di seluruh Indonesia, kalau hanya 12 sampai 13 juta ton di Pulau Jawa saja tidak cukup apalagi ini kita berbicara skala nasional.

Saya mau sampaikan ini pak karena *alhamdulillah* provinsi saya paling hampir tidak mendapatkan pupuk subsidi hanya 0, sekian persen. Ini, ini bercerita skala prioritas nasional, kenapa saya sampaikan ini? karena pupuk bersubsidi ini selalu saja banyak masalahnya. Pertama dari tadi yang sudah disampaikan oleh bapak Fransiskus Lema soal transparansi bahan baku untuk pupuk? efisiensikah pupuk yang sudah diproduksi dengan harga bahan pupuk yang beli misalkan? kemudian saya juga, kenapa kita kemarin bermasalah soal Kartu Tani? karena Kartu Tani yang seharusnya bu, pak yang diujicobakan dibeberapa provinsi Jawa Timur dan di situ ada NTB, disitu juga ada Jawa, bagian-bagian Jawa yang lain, daerah lain tapi pupuk ini masuk ke daerah yang tidak dimasukkan sebagai percontohan Kartu Tani misalkan disitu ada Sulawesi Selatan. Ini nyata bu, pak, kenapa? karena memang disitu ada unsur-unsur kepentingan politik dan disitu ada unsur-unsur bisnis.

Saya ingin mempertanyakan pupuk subsidi ini benar-benar untuk membantu para petani yang tidak mampukah? atau untuk memperkaya perusahaan-perusahaan atau pengecer-pengecer di daerah-daerah? pertanyaan yang sangat luar biasa harus kita tanya karena ini bukan hanya satu kali ini aja masalah pupuk ini, hampir setiap hari kita permasalahan, apalagi kita melihat HPP pupuk subsidi yang merugikan negara karena tidak efisiensi dan juga komponen yang tidak seharusnya menjadi beban negara.

Masalah kurang bayar, ini menjadi *attency* juga pak, bu. Kenapa? karena memang masalah kurang bayarnya ini selalu dipelihara, PIHC karena pinjaman bank akibat kesulitan modal bunganya dan dibebankan kepada Pemerintah. Kemarin waktu kami menjadi Anggota DPR RI dilantik, setelah itu kita Raker dan RDP, ada utang yang harus dibayar oleh negara hampir kurang lebih 20 triliun lebih, benarkan ya Pak Dirjen? yang 2019, setelah itu ada pembayaran. Akhirnya tinggal 15 triliun pak, saya ingat betul. Sekarang tinggal 11, tapi masih ada beban negara untuk pembayaran 11 trilliun.

Terus kita lihat juga penyaluran pupuk yang selalu bermasalah, ini bukan, ini bukan baru sekarang. Saya merasa bahwa pupuk bersubsidi ini kalau memang menjadi masalah, saya kemarin turun juga di beberapa daerah di Pulau Jawa. Mereka bilang loh kita kalau masa tanam itu butuh pupuk bu, sekarang juga harga eceran tertinggi juga di lapangan lebih tinggi juga gitu, tapi kita harus beli karena memang kita bergantung hidup terhadap hasil panen dan hasil tani. Kita beli, kita enggak beli, kita mati; kita beli juga setengah mati. Ini kalau Orang Maluku bilang "makan seng mati, seng makan mati", iya itu? tapi seng makan juga mati maksudnya kalau seng makan, itu nggak makan begitu.

Jadi tolonglah ini, terus juga kita melihat dalam pengawasan, pengawasan penyaluran pupuk ini tiap hari dari tahun ke tahun tidak pernah selesai dan selalu bermasalah. Saya ingin menyinggung ini mohon maaf Pak Ketua, ini ada beberapa laporan, yang dilaporkan langsung, itu misalkan di Jawa Timur nih kalau ada Bu Ema, ditemparnya Bu Emma ini. Kemarin ada wisata tani, kalau nggak salah ya? Agrowisata Tani, ini Pak Mindo juga nih. Saya mendapatkan laporan ada salah 1 perseorangan melakukan kegiatan tersebut yang seharusnya pupuknya didapatkan oleh para petani yang memiliki Kartu Tani tapi dengan cara ini, mereka mendapatkan pupuk bersubsidi dan diyakinkan dan sangat masuk akal bahwa mereka yang menerima pupuk bersubsidi itu tidak memiliki Kartu Tani. Ini apa? ini karena politik kepentingan. Nah kayak begini-begini aja bu, baru satu tempat belum tempat yang lain.

Jadi saya pikir nanti kita perdalam lagi Pimpinan di Rapat Panja karena memang pupuk ini menjadi masalah bagi para petani kita dan juga saya sangat menyayangkan adanya pemotongan anggaran di pertanian sebesar 6 triliun, yang kita juga belum melihat persis persediaan pemotongan anggaran itu sesuai dengan nomenklaturnya itu mau dipotong di mana aja, Tapi saya sudah bilang setiap Raker dan RDP 42;00 bahwa Indonesia harus mempersiapkan kesiapan tanaman pangan karena kita tidak bisa lagi

bergantung pada negara-negara lain. Pada situasi Covid yang tidak menentu ini walaupun vaksin sudah disediakan, tapi kita harus juga memikirkan keadaan kita. Yang saya pikir 10% dan 20% itu APBN untuk pendidikan dan juga untuk kesehatan yang diambil langsung untuk prioritas, saya meminta juga dari Ruang Komisi IV ini bahwa pertanian juga ini juga harus menjadi prioritas bagi Negara Indonesia baik itu di bidang pangan atau kesediaan pangan dan kesediaan pupuk dan juga beras yang sudah masuk di pasar ini ada yang 9 ribuan sampai 8 ribuan ternyata beras tersebut hasil dari negara lain.

KETUA RAPAT:

Cukup?

F-PG (ALIEN MUS, S.H.):

Itu saja pak, iya kalau bisa iya kita Komisi IV harus benar-benar kalau setiap kali rapat kita marah-marah tapi tidak diindahkan cobalah Pimpinan Komisi IV. Pimpinan Komisi IV kayaknya kurang galak deh, kurang galak Pimpinan Komisi IV apalagi Pak Sudin ini kurang galak.

KETUA RAPAT:

Iya terima kasih Mbak Alien.

Selanjutnya Kanjeng silakan.

F-GERINDRA (Ir. KRT. H. DARORI WONODIPURO, M.M.):

Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.

Pak Ketua, Teman-teman Anggota, para Eselon I dari Himbara dan semuanya yang hadir.

Saya mengingatkan kepada adek-adek saya di Eselon I, saya pernah duduk di situ lama, tolong jangan mengulangi kesalahan yang pernah kita lakukan. Ini 6 tahun diulangi terus pak, bahaya ini seperti kayak Bansos nanti bisa ini. Saya ingatkan ya, tolong jangan ulangi kesalahan yang pernah kami lakukan. Saya pernah salah karena pernah duduk situ 11 tahun tapi ingatkan pada semuanya jangan ulangi, iya enggak usah takut sama menteriya kalau bapak benar. Nyatanya saya sering melawan menteri ya awet gitu, tapi benar bukan melawan yang salah.

Jadi gini Pak Ketua, saya ini ditugasi oleh ketua menerima tamu DPRD hampir se Jawa sama Pak Hendro. Iya terakhir kami terima dari Tulungagung sama Kebumen sama juga ini baru masuk dari Bima. Bima dapilnya sampaiyan ya? ini dari Kecamatan Ambalawi, adakan ya? jadi begini tadi Pak Dirjen mengatakan realisasi pupuk subsidi 96% menarik tapi kenyataannya di lapangan di Tulungagung itu realisasinya subsidi 40% pak, di Kebumen

kampung saya 55%. Ini, ini di mana anunya, nyelipnya dimana?tolong mungkin bukan di Kementerian Pertanian, mungkin di bawah sudah mulai banyak belak-belok, ini Pak Ketua dan yang kedua belum mulai tahun 2001 bapak sudah mulai masalah. Anggarannya 32 triliun harusnya, hanya 25 kurang 7,3 triliun mau efisiensi dan seterusnya, ini masalah baru nanti ya.

Jadi saya minta kepada teman-teman, tolong bikin terobosan apa sih? kalau seperti ini terus akan ulang. Apa terobosannya? apa seperti Bansos langsung bantuan tunai? subsidi tunai misalnya, misal Kebumen dapat 10 miliar 1 tahun bagi sama produksinya itulah kenaikan harga dasarnya di kasihkan uangnya cash jadi tidak ada. Ini pernah saya lakukan pak waktu saya Dirjen, anggaran saya bukan sedikit 1 Dirjen 1 tahun 4 triliun tapi nggak ada apa-apa karena *Block Grand* langsung uang ke rakyat, beli rakyat yang beli sendiri dan diperiksa dasarnya untuk mencairkan uang adalah hasil pemeriksaan tim. Jadi uang dari Jakarta tidak hanya menyangkut ke provinsi kabupaten, langsung ke Ketua kelompok gitu, aman ya pak? 11 tahun gitu, iya memang nggak disenengin yang biasa motong gak seneng sama saya. Nah ini Pak Ketua mohon ada terobosannya, kalau seperti ini saya ingat ini, saya buka rekaman sampeyan pak, dari Menteri Pak Amran saya buka tadi malam. Ngomongnya sama semua ini, iya sikit-sikit lah 80% sama lah gitu. Dimohonlah ada terobosan apa kira-kira begitu?

KETUA RAPAT:

Maksudnya sama gimana kanjeng?

F-GERINDRA (Ir. KRT. H. DARORI WONODIPURO, M.M.):

Iya?

KETUA RAPAT:

Maksudnya sama gimana?

F-GERINDRA (Ir. KRT. H. DARORI WONODIPURO, M.M.):

Sama jawabannya.

KETUA RAPAT:

Bukan sama bohongnya?bukan?

F-GERINDRA (Ir. KRT. H. DARORI WONODIPURO, M.M.):

Iya kalau sama bohongnya, iya mirip-miriplah. Iya tapi kami kan enggak enak lah, ini kan adik-adik saya juga ini, jadi dibilang bohong iya? tapi saya ingatkan iya, tolonglah ini, ini jangan sampai terjadi, terulang kembali permasalahan. Jadi maksud saya, tolong Litbangnya mengkaji kalau bantuan tunai langsung itu seperti apa? mungkin sekilo misalnya tambah 300 perak

misalnya atau 500 perak langsung, gimana itu? karena Presiden rupanya sudah kesal. Ini saya Ingatkan, kalau Presiden sudah ngomong penegak hukum jalan ini, menelusuri dimana ini nyangkutnya? terjadi seperti ini sampai triliunan kok nggak ada manfaatnya menurut Pak Presiden gitu. Terima kasih Ketua.

KETUA RAPAT:

Selanjutnya Mbak Farida silakan.

F-PKB (FARIDA HIDAYATI, S.H., M.Kn.):

Terima kasih.

Pimpinan yang saya banggakan serta bapak-bapak yang duduk di Eselon I di Kementan, serta Direktur Pupuk Indonesia, serta Perwakilan dari Menko, serta dari Himbara.

Mungkin saya hanya menambahi saja sedikit, terkait dengan penyuluh Pak Sarwo Edhie bahwa penyuluh ini memang sangat diperlukan sekali bilamana kemarin input, waktu menginput ke Anggota Kartu Tani itukan waktunya sangat terbatas sekali bahkan kita tahu seperti didapil saya ini termasuk di Jawa, di Bojonegoro tepatnya ini ada 430 Desa itu hanya ada 130 penyuluh dan itu rata-rata usianya diatas 40. Nah inikan perlu adanya penyegaran, perlu adanya penyegaran dan perhatian tentunya. Terus mungkin bagaimana bisa waktu yang sangat terbatas dan program yang sangat baru ini kan online? e-RDKK ini nggak tau proyek dari mana? bahkan untuk menginput ibaratnya begini; 1 pintu ini pak, pintu di depan saya ini. Semua seluruh Indonesia masuk, jamnya dibatasi, otomatis ada beberapa yang tidak bisa masuk. Yang tidak bisa masuk ini, akhirnya datanya RDKK yang lama bahkan orangnya enggak ada. Akhirnya saya coba, beberapa saya coba turun ke lapangan untuk memastikan ternyata benar bahwa data itu data lama di 2014.

Terus mungkin mengenai Himbara iya pak ya? untuk di Jawa Timur ini menggunakan Kartu Taninya Bank BNI. Bapak ini saya di Jawa, di Jawa ini di Bojonegoro termasuk kotalah. Dari 28 Kecamatan ada BNI itu hanya ada 3, 3 cabang; bagaimana yang 20? berapa itu berarti? 25 Kecamatan itu setornya kemana?berarti harus lari ke kota?bapak untuk menempuh ke kota, itu membutuhkan waktu ada 1 jam, ada yang 2 jam, enggak semuanya bagus. Saya terus membayangkan, bagaimana dengan kawan-kawan saya yang dapilnya luar biasa sekali; dari pulau satu ke pulau yang lain, ini baru saya di Jawa, di Bojonegoro pak, nggak jauh dari provinsi seperti itu. Makanya, makanya ini perlu perhatian kalau saya berpikir, kita berpikir secara efektif, apa nggak salahnya kalau dicoba di BRI? Saya nggak tahu mana BRI mana. Kenapa saya mengusulkan di BRI untuk di Jawa Timur? karena kalau di BRI itu sudah ada di unit-unit; tiap pasar-pasar itu ada namanya BRI teras, jadi ini kita memudahkan, memudahkan petani, jadi tidak memudahkan bank-bank.

Jadi saya berharap dari segi kemudahan efisiensi itu juga harus diperhatikan, jadi tidak hanya berbagi. Misalnya di Jawa Tengah Mandiri, di Jawa Barat BRI kebetulan yang di BNI ini di Jawa Timur, saya tidak mau seperti itu. Tujuan saya meminta, memohon untuk Himbara kita permudah petani itu, tapi tidak mempersulitnya. Jadi kalau saya pikir kalau 25 Kecamatan itu harus ke kota, berarti *cost agent* untuk mengantar, menyetor uangnya ke kota; itu akan berarti dikenakan biayanya ke petani, nggak mungkin ke bapak? pasti kan kepetani, inikan saya ada biaya ongkos ke kota untuk menyetorkan uang ke bank BNI, itu harus diperhatikan, jadi kita jangan mempersulit itu.

Jadi terus ada lagi pak, terkait dengan Kartu Tani yang rusak atau yang hilang. Ini ternyata mengurusnya lebih rumit lagi ternyata harus ke pusat. Memangnya seperti ATM ini nggak bisa ya? di cabang-cabang Kabupaten? nggak bisa? apa harus memang di pusat seperti itu? nanti saya minta jawabannya seperti itu. Jadi begini ketika ada yang hilang ataupun ada yang rusak, rusak itu kan bisa tidak disebabkan oleh petani sendiri tetapi waktu pendistribusian itu ada kerusakan. Nah itu ternyata mekanismenya harus dikirim lagi ke Dinas; Dinas Kabupaten, Dinas Provinsi, baru di pusat, inikan memerlukan waktu. Sedangkan masa tanam petani inikan perlu sesegera mungkin. ATM aja bisa dibikin di kecamatan, dicabang, ini kenapa Kartu Tani ini harus di pusat lagi seperti itu? Inikan namanya mempersulit lagi pak.

Terus mungkin terkait dengan pupuk, saya kebetulan kalau masyarakat tadi seperti yang Mbak Kiki sampaikan, yang ditabrak in oleh masyarakat itu, kami pak, kami karena kami yang di Dapil terus. Jadi saya mohon, mungkin kalau bapak-bapak yang lain ndak butuh, saya ini butuh data. Saya di Dapil Jatim 9, saya butuh data nama distributor dan *contact person* nya, kenapa? ternyata kemarin beberapa di kecamatan saya itu, ada yang emang harganya itu mahal. Jadi kesepakatan agen-agen ini harganya memang sudah hampir mendekati harga non subsidi karena memang waktu itu ada kelangkaan pupuk, bahkan saya sempat juga kirim ke Pak Sarwo Edhie bagaimana mobil dari pupuk-pupuk itu dihadang oleh masyarakat karena memang kelangkaan pupuk? dan itu ternyata dimanfaatkan juga oleh agen-agen dengan harga penyeragaman harga yang tidak wajar, jadi di luar harga subsidi. Nah saya ini mau mengkontak tapi kontak ke siapa? saya pengen nanti saya di beri, diberi kontak dan nama distributornya, jadi saya ikut mengawasi bagaimana saya bisa menyampaikan ke Pupuk Indonesia.

Mungkin itu masukan dari saya, terima kasih Pimpinan.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Selanjutnya Pak Slamet Ariyadi. Singkat, jelas, yang sudah ditanyakan jangan tanyakan lagi, jadi buat pertanyaan sendiri saja.

F-PAN (SLAMET ARIYADI, S.Psi.):

Terima kasih Ketua.

Pimpinan dan Anggota Komisi IV yang saya hormati,
Bapak Dirjen dan Direksi Pupuk Indonesia.

Pertanyaan kami yang pertama, melihat hasil realisasi pupuk subsidi 2020, ini kita melihat 96% terealisasi Ketua; pertanyaannya saya, 96% ini apakah realisasi ini hanya berdasarkan data dan angka saja, apa memang betul-betul berdasarkan angka riil di lapangan? boleh kita tanyakan 55 Anggota di Komisi IV ini, 54 anggota dari berbagai dapil, dari berbagai fraksi, saya pastikan semua diwilayahnya ini bermasalah, betul ndak?iya, jadi 96% ini perlu menjadi pertanyaan Ketua, boleh di tidak kami meminta data riilnya? 96% ini diwilayah mana yang realisasinya mencapai 96%? itu yang pertama.

Kedua, melihat dan mendengar pernyataan dari Deputy Badan Koordinasi Pangan dan Agribisnis bahwa implementasi untuk pupuk subsidi wilayah Jawa dan Madura, ini implementasinya 65% dan realisasi penyaluran pupuk bersubsidi ini untuk wilayah Jawa Madura per 31 Desember ini mencapai 13,5%. Kebetulan bu saya petani dan saya juga anak petani dan saya juga berasal dari Madura bu, boleh tidak kami melihat data dan angka dari 13% ini? data riilnya di Madura ini dimana? karena Madura ini terdiri dari empat kabupaten, mayoritas semua mengeluh bu. Saya sebagai wakil dari mereka, berdasarkan Kartu Tani ataupun adanya kelangkaan pupuk di Madura ini amburadul bu, terus terang. Banyak data kalau tadi Bu Kiki menyampaikan; ada data dengan adanya apa namanya subsidi dijual di harga eceran tertinggi, kami sebelumnya sering berkoordinasi dengan Direktur Pupuk dengan Pak Hatta; kami selalu mengeluhkan dan menyampaikan apa yang menjadi permasalahan di Dapil kami?jadi, jadi dari dua ini kami kalau boleh nanti Pak Ketua, kami minta real datanya dari 13% realisasi wilayah Jawa dan Madura; 96% yang realisasi dari adanya pupuk subsidi.

Yang ketiga, kita sudah mengetahui bersama bahwa anggaran pupuk subsidi di 2020 dan 2021 ini sedikit berbeda. Bahwa di 2021 ini harga eceran tertinggi nya naik tapi subsidiya menurun, begitu pak ya, Pak Edhy?jadi kami sebagai perwakilan dari Fraksi PAN sebetulnya sangat menyayangkan pak, apapun itu alasannya pak. Pertama, harga eceran tertinggi dinaikkan hanya untuk mengefisiensi adanya kurang bayar yang tahunan 5 triliun. Dengan alasan untuk bisa menambah alokasi tambahan pupuk subsidi.

Sebetulnya logika dan hati kita dimana?sedangkan 2021 ini kita ditargetkan bagaimana pemulihan ekonomi nasional ini juga ditargetkan bagaimana pemulihan ekonomi ini dari petani?kalau hari ini dengan adanya kelangkaan pupuk, dengan adanya harga eceran tertinggi dinaikkan, seperti

apa nasib petani pak?apakah kita yakin semua sebagai Anggota Komisi IV dan Bapak Ibu sebagai pemerintahan ini yakin 2021 ini pemulihan ekonomi ini akan eksis dan betul-betul sesuai dengan apa visi misi Presiden?kalau kami pak, kalau kami boleh meminta, kami meminta khususnya juga kepada Pimpinan, Abah Sudin dan Anggota Komisi IV kalau perlu ditinjau ulang dan dikaji kembali adanya penetapan kenaikan harga eceran tertinggi ini pak, kasihan petani.

Sekian.

*Wallahul muwafiq ila aqwamith thoriq.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Memang bapak Nomor 1, sekarang hari ini pak.

Selanjutnya Pak Rudi, silakan.

F-PAN (H. MUHAMMAD SYAFRUDIN, S.T., M.M.):

Makasih Ketua.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saya menambahkan saja, tadi terima kasih Pak Dirjen, Pak Dirjen Darori sudah menyampaikan karena beliau dulu pernah ke kampung saya jadi masyarakat. Saya sempat nyatet nomor handphone nya, jadi beliau di Komisi IV mengadu masalah pupuk.

Oh sekalian saya hormati, saya cintai mungkin kepada ibu-ibu Asdepya? mungkin bisa disampaikan, kenapa sih urusan pupuk itu urusan distributor di perdagangan? Memang Permendagnya seperti itu tapi coba-coba bapak-bapak, ibu-ibu sekalian lihat di bawah, di lapangan, bukan tidak mungkin tapi saya tidak mengatakan bahwa eh tolong dong jangan ditambah lagi distributornya, mungkin bisa seperti itu? tapi saya tidak mengatakan seperti itu, ini distributornya itu-itu saja gitu. Satu kabupaten hanya satu tidak mungkin, gitu? coba iya diatur pupuknya juga iya Pupuk Indonesia, ini sampaikan supaya bisa menjadi solusi bersama gitu loh, iya? jadi kalau di daerah itu agak susah, pupuknya sudah oke tapi perdagangannya nggak bisa. Ini, ini apa namanya? tidak, tidak menarik itu. Yang kasihan petani gitu dan bapak-bapak di pertanian, benar yang dikatakan Pak Dori. Saya agak malu juga, jadi kalau ada di acara kami sampaikan bahwa pemerintah sudah membayar kepada Pupuk Indonesia tambahan pembayaran untuk penambahan alokasi kuota pupuk tapi tetep aja.

Bapak-bapak sekalian.

Di Nusa Tenggara Barat khususnya di Pulau Sumbawa, jadi saya tadi cerita dengan teman-teman saya, walaupun dikawal oleh aparat, iya aparat membawa pupuk, itu orang akan menjarah pupuknya itu di tengah jalan dan selesai. Dan dari dulu sebelum saya jadi Anggota DPR di Komisi IV ini sampai dengan hari ini, tetap itu jadi tidak ada solusi, saya nggak enak gitu Pak Ketua. Dulu nggak ada Anggota DPR Komisi IV seperti sampai sekarang masih juga seperti itu. Jadi mohon dibantu Bapak-bapak sekalian yang di Pertanian dan di Pupuk agar solusi pupuk khususnya di Nusa Tenggara Barat karena sangat besar itu di Pulau Sumbawa gitu dibutuhkan, tetapi untuk kebutuhan itu yang udah jelas punya Kartu Tani saja belum tentu bisa mendapatkan apalagi yang lain gitu.

Kemudian bolehlah kita bermimpi misalnya berkeinginan, bahwa dengan Kartu Tani itu bisa berjalan dengan baik, belum tentu tidak semua daerah di Indonesia khususnya di kampung saya itu terakses baik dengan sinyal. Tadi Pak mengatakan bahwa akan diupayakan dengan sinyal yang bagus. Dulu saya di Komisi I menyampaikan juga seperti Pemerintah, pada Pemerintah tapi tetap saja gitu loh. Jadi mohon sinergi yang sangat bagus supaya rakyat tidak dirugikan, gitu. Kita berkoar-koar terlalu bersemangat tapi realisasinya nggak ada gitu, tapi kita percaya mudah-mudahan kedepan akan lebih baik.

Terima kasih.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Walaikumsalam.

Terima kasih.

Semua Anggota sudah memberikan tanggapan, saran dan lain-lain. Tadi Pak Kanjeng Darori mengatakan kenapa sih nggak ada terobosan? sebetulnya terobosan ini bisa dimulai dari Himbara, kenapa saya katakan demikian? Kartu Tani dimasukkan uang subsidi dari Pemerintah, itu lebih bagus. Jadi tidak usah Pabrik Pupuk yang disubsidi pak, dananya dimasukkan ke Kartu Tani itupun apabila datanya benar dan valid. Tapi kalau melihat seperti ini tiap tahun RDKK berubah, iya rasanya nggak mungkin pasti terjadi penyimpangan seperti Kepala Badan tadi mengatakan, kan ada cetak sawah. Tiap tahun nggak ada cetak sawah pak, cetak sawah juga bohong pak, seberapa banyak penambahannya? yang saya tahu penyusutan lahan itu besar sekali di Indonesia. Iya kalau memang datanya jumlah petani penggarap, jumlah petani pemilik sekian, siapa yang mau diberikan? digaji aja, jadi dana tadi itu, dana yang 33 triliun masukan ke Kartu aja. Berarti satu petani misalnya kenapa tadikan ini maksimal 2 hektar? kenapa nggak dikurangin? saya rasa kalau petani bener itu punya satu hektar pun sulit pak. Kenapa nggak dirubah Permennya? nggak usah maksimal, mohon maaf orang kita paling jago merubah.

Saya punya tanah 1 hektar 950 berarti tidak mencapai 2 hektar, dapat nggak subsidi? dapat, patok saja 1 hektar brett. Baru dilakukan pendataan big data, zaman sekarang sudah canggih, bicara 4.0, bicara ini, bicara itu. Sebetulnya kuncinya di Himbara ini; kartunya valid, datanya valid, masukan uang subsidi kesitu karena selama ini juga jujur saja juga tahu kok yang kartel itu di pabrik pupuk. Jangan-jangan seragam karyawan pun masuk pengeluaran dan dibebankan ke pupuk subsidi termasuk perjalanan direksi. Apa yang dikatakan kekita kalau benar?

Saya akan buat surat, ada apa kok dijadikan satu? atau Direktur Utama, Direktur Utama ini nggak ada gunanya pecat aja, jadi Kepala Pabrik. Kepala Pabrik misalnya Petrokimia Gresik, Kepala Pabriknya si ini, sudah jadi nggak usah ada Direktur Utama, Direktur, Komisaris pulang semua, itu menghemat anggaran sekian triliun pertahun kalau memang dipull oleh Holding, ini loh yang agak membingungkan gitu.

Saya tidak menyalahkan siapa disini, kita pikirkan kita jalan-jalan keluar untuk apa? untuk kesejahteraan petani. Kalau saya jadi Presiden 33 triliun ngapain kasih pupuk subsidi? beli aja beras dari luar, selesai urusan, kan dapat sekian puluh juta ton, iyakan? betul nggak pak? yang bapak dari Himbara? 33 triliun loh pak beli beras dari Vietnam. Satu ton cuman berapa dollar? kita bisa hitung kok. Di Vietnam itu nggak lebih dari 7 ribu beras 1 kilo, ongkos kirim seribu, 8 ribu, iyakan? kita pernah bilang swasembada tapi nyatanya masih import 2 juta, 2 tahun lalu apa 3 tahun lalu.

Jadi saat ini bapak, ibu saya baru dapat data hampir seluruh dunia mengurangi ekspornya. Maka kalau Kementerian Pertanian mengatakan harga kedelai naik karena pembelian dari Cina itu bohong, saya jamin bohong. Semua trading kan hampir semua di Singapura, mereka sengaja menahan produknya karena apa? siapa yang bisa bicara pandemi COVID-19 sampai kapan? saya ingat dulu ada pejabat Pemerintah yang mengatakan *insya Allah* 2020 September Covid selesai, sampai sekarang tidak ada penyelesaian. Siapa yang menjamin 2021 Pandemi COVID-19 selesai? nggak ada yang bisa jamin bapak, ibu. Hampir semua komoditi dunia saat ini naik karena masing-masing negara menahan, menahan stoknya.

F-PDIP (YOHANIS FRANSISKUS LEMA, S.IP., M.Si.):

Ketua.

KETUA RAPAT:

Iya.

F-PDIP (YOHANIS FRANSISKUS LEMA, S.IP., M.Si.):

Izin saya tambah sedikit saja pak karena negara ini dibilang berutang ke pabrik Pupuk, mohon maaf pak. Saya mau tanya betul pupuk mereka ini sudah efisien betul atau tidak? betul-betul pupuk ini sudah efisien atau

tidak? ini kita tidak bisa jawab. Kalau yang tadi saya katakan belum di, belum kita, kita, kita buktikan, nah jangan sampai mohon maaf nih pak, negara ini jadi sandera. Ini semua data ini terus terang aja tidak bisa kita pegang pak, jangan sampai negara itu tidak ada utang pada pabrik pupuk. Mohon maaf ini pak, saya akhirnya berpikir seperti itu, saya berpikir seperti itu. Kalau negara tidak ada berhutang pada Pabrik Pupuk, mohon maaf pabrik pupuk harus cash kembali uang-uang itu, ekstrimnya kira-kira seperti itu pak.

Maka tadi saya bilang periksa ini Pabrik Pupuk supaya terbuka, transparan kalau tidak nih kita ini, aduh iya kita muter-muter aja. Makanya saya bilang, pabrik pupuk ini sudah efisien atau tidak? pasti bilang iya, buktinya apa? mana angka-angkanya? kalau tidak efisien, negara suntik terus 30, terus; suntik 25, suntik terus. Negara punya utang, barang itu tidak sampai ke rakyat, tidak jadi apa-apa, nggak tahu lari kemana pak, mohon maaf pak.

KETUA RAPAT:

Cukup?

F-PDIP (YOHANIS FRANSISKUS LEMA, S.IP., M.Si.):

Iya terima kasih.

KETUA RAPAT:

Jadi kadang-kadang kalau saya ketemu petani, mereka bilang begini; Pak Dewan beli pupuk harga nggak subsidi juga nggak apa-apa, yang penting ada di toko kios. Ini sudah musim tanam, subsidi nggak dapat, non subsidi kagak ada, iya ini. Makannya saya bilang dari awal begitu saya jadi Pimpinan; saya minta tolong, tolong data yang jujur, tolong transparan. Jadi nanti pada Dirut PIHC saya minta di *break down* dulu, nanti Rapat Kerja kita undang saya mau tahu. Iya juga Bapak dari Himbara dan Ibu Menko tolong bantu saya cari solusi jalan keluar misalnya dananya tadi dimasukkan ke kartu berarti sama saja mensubsidi petani untuk menebus pupuk di kios. Iya mungkin salah satu jalan keluarnya seperti itu dan Panja pupuk tetap kita lanjutkan bukan mencari Kementerian Pertanian, salah, HET salah, bukan, mencari jalan terbaik karena kasihan Pak Jokowi bukan hanya memikirkan pupuk, dia memikirkan dari A sampai Z, dari pagi sampai pagi lagi. Kerjanya terlalu banyak apalagi kita masih dalam kena musibah, musibah tidak pernah berhenti dari COVID-19, pesawat jatuh, longsor, gempa, banjir segala macam.

Jadi kalau kata Pak Suhardi Duka, rakyat enggak boleh ke rumah waktu COVID-19, sekarang terbalik rakyat harus keluar rumah karena takut tertimpa rumah. Demikian pertanyaan dan tanggapan yang disampaikan oleh Anggota Komisi IV, selanjutnya kami persilakan Dirjen, Dirut Pupuk Indonesia, Ketua Himbara dan Ibu dari Kemenko.

F-PDIP (H. SUNARNA, S.E., M.Hum.):

Izin, izin sedikit Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Iya *monggo*.

F-PDIP (H. SUNARNA, S.E., M.Hum.):

Iya siap *nggih*.

Oke terima kasih Pak Ketua dan juga mitra semua yang hadir, seluruh Anggota Komisi IV.

Saya hanya menambahkan sedikit saja, disini tadi sudah banyak membahas semua terkait dengan pupuk, dengan HET, juga terkait dengan Pupuk Indonesia masalah produksi. Nah HET menurut Permentan sudah jelas naik tapi apakah Pak Dirjen dan juga Bu Menko juga memikirkan bahwa dengan HET naik, kenapa di sini tidak ada dari Kementan sendiri yang bicarakan masalah HET gabah panen dan juga gabah kering giling, jelas-jelas bahwa Kementan juga naikkan, kenapa tidak berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan? mau naik berapa kalau HET nya naik, mestinya harga HET gabah kering petani juga naik.

KETUA RAPAT:

HPP pak.

F-PDIP (H. SUNARNA, S.E., M.Hum.):

HPP gabah juga naik, jadi jangan mempersulit petani lagi. Sudah dipersulit pupuknya, harganya juga....saja, pura-pura tidak tahu, pura-pura tidak tahu tidak ada yang bahas. Mereka susah, masih ditimpa juga, masih punya target bahwa kita pangan harus menjadi target utama ketersediaan pangan terkait dengan pandemi COVID-19 yang masih ada ini. Nah harapan kami juga jelas bapak, HET nya jelas, HPP gabah juga jelas, petani juga jelas berpikirnya. Sudah dipersulit pupuk masih dipersulit juga harganya dan kami juga sangat setuju sama Pak Ketua tadi bahwa pupuk ini juga jelas. Sama-sama subsidi kenapa sih duit itu tidak diberikan? kayak digesek kayak kita ngisi pulsa saja. Mereka yang sudah dapat Kartu Tani, iya kasih saja duitnya kesana, masukkan saja, dia beli gesek selesai, tidak sulit-sulit, kenapa harus bicara A,B,C,D,E,F,G tinggal.... distribusinya jelas, pemangkasannya jelas, regulasinya jelas, arus distribusi itu jelas. Kalau saya sekarang sedikit mengapresiasi kepada Kementerian Pertanian yang sudah melakukan pemotongan regulasinya yang sekarang dengan SK Dinas saja sudah cukup tidak harus nunggu Gubernur, Bupati yang sulit tentu melewati kan untuk Bupati, Kepala Dinas naik ke asisten, kehukum baru naik ke bupati. Nah tentu ini semoga akan lebih baik tapi yang jelas bahwa regulasinya yang mudah

yang mana? karena dengan sudah ada 25 triliun, iya berikan saja ke mereka. Kenapa sih dipersulit, sama-sama ngasih mereka? orang nanti juga digesek juga kok kalau pakai Kartu Tani gesek duitnya. Mungkin itu Ketua, terima kasih. Merdeka!

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Kapoksi.

Jadi silakan Pak Sarwo Edhy kemudian juga nanti disampaikan kepada Menteri Pertanian. Saya mau tahu waktu dia datang Rapat Kerja membawa target produksi, jangan sampai 21 triliun jadi 15 koma sekian target produksinya sama berarti kalau begitu ada penyimpangan yang 6 triliun selama ini, iya? silakan.

DIRJEN PRASARANA dan SARANA PERTANIAN:

Baik terima kasih Pak Ketua.

Bapak, Ibu sekalian yang saya hormati.

Yang pertama Pak Narno ya pak ya? jadi untuk kenaikan HET itu sejak 2012 belum pernah naik tapi kalau harga gabah, harga gabah kering panen itu setahu saya mulai 2015; 2.700 perkg kemudian naik lagi 3.200, naik lagi 3.700, 2020 sudah kita naikkan 4.200 sedangkan pupuk bersubsidi itu tidak pernah naik dari 2012 sehingga kita naikkan 2021 ini, tentunya sesuai dengan aturan yang ada nanti saya sampaikan.

Bapak, ibu sekalian.

Beberapa hal ini kami sampaikan, tentunya terima kasih atas masukan, saran untuk perbaikan pengolahan Pupuk Bersubsidi dan tadi saya ucapkan terima kasih ide dari Pak Ketua sangat baik, subsidi langsung ke Kartu Tani itu sangat baik. Saya pikir daripada kisruh pengelolaan Pupuk Bersubsidi tidak kunjung selesai gitu, iya mudah-mudahan dengan masukan tadi bisa kita benahi untuk 2021 ini.

Kemudian tadi dari Ibu Luluk.

F-PDIP (YOHANIS FRANSISKUS LEMA, S.IP., M.Si.):

Ketua.

DIRJEN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN:

Iya siap pak.

F-PDIP (YOHANIS FRANSISKUS LEMA, S.IP., M.Si.):

Pak Budi, Fransiskus Lema.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI/F-GERINDRA (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Fransiskus Lema.

F-PDIP (YOHANIS FRANSISKUS LEMA, S.IP., M.Si.):

Pak Dirjen, saya kebetulan ada pegang ini ada beberapa alasan kenapa HET naik pak ya?kita diskusi ya pak ya. Anggaran subsidi turun, oke subsidi turun jadi logikanya harus ditutup dengan kenaikan HET, betul pak ya?bukan ditutup, kalau HET naik berarti kemudian ada uang, ada tambahan uang untuk produksi, betul pak ya?volumenya, iya?yang kedua.. usulan petani betul petani yang minta pak kemudian, itu pertanyaan saya satu. Kesimpulan RDP DPR tadi sudah disebutkan tadi dari saya lupa dari sana Pak Darori atau siapa tadi yang mengatakan bahwa itu sebelum Covid kalau bicara soal DPR pak.

Yang berikut HET tetap sejak 2012, apakah karena sejak 2012 HET tidak naik terus sekarang boleh naik pak?barometer naik parameternya apa? ya? yang berikut agar rekomendasi dari Kemenku, ini saya juga perlu penjelasan. Kalau saya punya argumentasi tadi pak, saya katakan tadi saya pakai yang pendekatan ekstrem jangan sampai ini pupuk ini tidak perlu subsidi karena ini efisien, karena ini inefisien makanya pupuk tidak perlu subsidi. Jangan sampai negara ini tidak punya hutang terhadap pabrik pupuk, jangan sampai kenapa? karena kita tidak belum menjawab yang tadi harga pokok produksi pak.

Coba kita periksa, makanya tadi saya bilang kalau kita mau fair, kirim orang-orang yang ahli di bidangnya itu pergi ke semua pupuk, pabrik pupuk buat apa? investigasi secara serentak dan kemudian kita dapatkan hasilnya pak. Jangan sampai, jangan sampai ini pak, kita tidak perlu buang subsidi terlalu besar. Makanya tadi saya curiga dengan pernyataan awal saya, ini nih betul persoalan tata kelola semata?persoalan manajerial semata atau persoalan...di sini pak? atau persoalan ... karena apa?karena bicara subsidi positifnya keberpihakan pada rakyat tetapi negatifnya menjadi ajang... itu yang belum bisa saya, saya apa ya pak ya, belum bisa masuk ke ke akal saya pak karena kalau tadi Pak Sunarno ngomong lagi kasihan petani kalau HET-nya dinaikkan tetapi di sini bilang bahwa petani yang minta HET nya dinaiki. Petani yang di sebelah mana pak? mohon maaf nih pak, saya harus.

DIRJEN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN:

Saya jelaskan pak, iya sudah?

F-PDIP (YOHANIS FRANSISKUS LEMA, S.IP., M.Si.):

Oke silakan pak, silakan pak.

DIRJEN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN:

Oke terima kasih.

Pak Fransiskus Lema jadi pertanyaan bagus, yang pertama saya sampaikan bahwa data berdasarkan e-RDKK 2021 itu dari 6 pertanyaan.

F-PKS (drh. H. SLAMET):

Interupsi Pimpinan.

Interupsi Pimpinan sebelah kanan.

KETUA RAPAT:

Iya.

F-PKS (drh. H. SLAMET):

Saya pikir tidak adil kalau kemudian pertanyaan yang dijawab diakhir-akhir saja. Kita yang dari awal sudah ngomong banyak pertanyaan belum dijawab.

KETUA RAPAT:

Iya dijawab dulu.

DIRJEN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN:

Nanti dijawab pak.

F-PKS (drh. H. SLAMET):

Jadi mohon menyesuaikan juga, kita.

KETUA RAPAT:

Sebentar Pak Slamet. Jadi dari tadi pertanyaan apa yang sama dijadikan satu di jawab dulu.

DIRJEN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN:

Iya dijawab saja pak.

KETUA RAPAT:

Nanti teman-teman baru ada tanggapan, silakan.

DIRJEN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN:

Baik terima kasih Pak Ketua.

Mungkin kami sampaikan pertanyaan dari semuanya termasuk mulai dari Pak Azikin, Pak Syafrudin, kemudian Pak Slamet dan seterusnya. Kami sampaikan secara ringkas. Sesuai dengan Permendag 15 2013 bahwa pengeluaran pupuk bersubsidi ini anggaran itu dari Kementerian Keuangan. Jadi KPA nya itu ada di Kementerian Keuangan.

Kemudian pengadaan dan penyalurannya itu ada di Pupuk Indonesia. Fungsi Kementerian Pertanian adalah sesuai dengan Permendag tersebut menetapkan HET dan alokasi pupuk bersubsidi, gitu ya? Alokasi pupuk bersubsidi itu dari mana? itu berdasarkan e-RDKK. RDKK 2021 itu dengan volume 23,2 juta ton. Pak Fransiskus Lema mohon izin ini nanti akan mengkait ke sana.

Kemudian dengan dana kalau dirupiahkan dari 23,2 juta ton ini nilainya adalah Rp67,12 triliun, gitu ya? ini nanti ada kaitan juga dengan Pak Mindo tadi. Dengan luas apa namanya luas tanam Pak Mindo, dengan luas tanam 32,4 juta hektar itu terdiri dari; luas tanam tanaman pangan 24,8 juta hektar, hortikultura 2,06 juta hektar, kemudian rencana tanam 5,39 juta hektar, peternakan untuk hijauan ternak 37.000 hektar kemudian perikanan darat 136,72 ribu hektar gitu pak ya? kemudian apa tadi? apa disebutkan luas lahan baku sawah. Luas lahan baku sawah berdasarkan Peraturan ATR BPN 2013 seluas 7.775.120 hektar. Kemudian terjadi validasi di tahun 2018 turun menjadi 7.125.705 hektar, kemudian akhirnya banyak sawah yang tidak tercover di evaluasi ulang, membuat data spasial. 2019 berubah lagi dengan Peraturan Menteri ATR BPN menjadi 7.463.908 hektar, itu pak ya? jadi memang apa namanya pupuk untuk 2019 itu turun menjadi hanya berapa kalau tidak salah 7,9 juta hektar karena memang alokasi luas lahan baku sawah.

Kemudian tadi yang ditanyakan oleh Pak Mindo ini, data ini luas tanaman ini berdasarkan keinginan pak daripada para petani yang diusulkan melalui RDKK. Kemudian kemampuan Pemerintah itu hanya Rp 25,2 triliun atau 7,2 juta ton, Pak Fransiskus Lema mohon izin. Kemudian kekurangannya darimana? nah ini kami mengacu kepada hasil RDP DPR tanggal 12 Februari 2020, intinya bahwa setuju untuk menaikkan HET untuk menambah volume, juga ada surat dari Menteri Keuangan.

KETUA RAPAT:

Stop dulu.

DIRJEN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN:

Siap pak.

KETUA RAPAT:

Yang Februari itukan pada prinsipnya Komisi IV setuju menaikkan HET.

DIRJEN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN:

Menaikkan HET, iya siap.

KETUA RAPAT:

Tetapi dengan konsekuensi menaikkan volume.

DIRJEN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN:

Iya volume ini juga ditingkatkan.

KETUA RAPAT:

Sekarang naik nggak volumenya?

DIRJEN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN:

Ini menaikkan volume pak dari 7,2 juta ton menjadi 9,1 juta ton pak ya, jadi itu. Kemudian ada Surat dari Menteri Keuangan yang menyatakan bahwa untuk menutup kebutuhan pupuk agar menaikkan HET di tinjau kembali serta merasionalisasi komponen-komponen pembentuk HPP pak sehingga atas dasar surat itu kami mengundang PIHC untuk melakukan diskusi komponen-komponen apa saja yang perlu dikurangi, yang kira-kira tidak perlu untuk membentuk HPP sehingga dari sana keluarlah efisiensi 5% dan dari sana kita mendapatkan uang lebih kurang sebentar pak, mendapatkan uang Rp 2,457 triliun, iya itu salah satunya adalah penurunan harga gas dan komponen-komponen lain yang dikurangi termasuk misalnya biaya seragam, kemudian macam-macam dan lainnya itu banyak pak ada lebih kurang 100 komponen lebih. Kemudian.

KETUA RAPAT:

Memang pernah ada harga pupuk turun dalam kurun 5 tahun ini?karena harga gas tadi turun.

DIRJEN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN:

Nggak belum, belum pernah.

KETUA RAPAT:

Berarti anda mengatakan turun?

DIRJEN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN:

Nggak maksudnya perhitungan efisien HPP itu salah satunya dalam Surat Menteri Keuangan karena gas ini turun agar dirasionalisasikan.

KETUA RAPAT:

Agar? tapi belum?

DIRJEN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN:

Belum gitu ya, kemudian.

F-PDIP (YOHANIS FRANSISKUS LEMA, S.IP., M.Si.):

Pak Ketua, boleh izin. Saya sedikit saja.

KETUA RAPAT:

Sebentar lagi, tunggu selesai dulu. Baru ada tanggapan.

DIRJEN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN:

Kemudian yang kedua tadi Pak Mindo menyampaikan bahwa mengapa NPK dirubah formulasinya 15 15 menjadi 15 10 12? ini hasil kajian Badan Litbang pak tahun 2017 yang walaupun Pak Ketua tadi menyampaikan belum tentu benar, gitu pak ya? kemudian mengapa diturunkan? itu hasil kajian dari beberapa professor yang ada di sana bahwa tanah kita jenuh terhadap Unsur P dan K sehingga berdasarkan hasil penelitian, P nya diturunkan menjadi 10, K nya diturunkan menjadi 12 dari 15 itu Pak Mindo mohon izin, mungkin nanti kalau ada hal-hal lain bisa kita sampaikan. Kemudian yang ketiga adalah menaikkan HET, HET itu dari HET, dari perubahan formulasi NPK itu dapat, 2,272 triliun dan dari kenaikan HET, kenaikan Urea 450 per kg kemudian SP36 400 per kg dan Sieta dan Organik menaikkan menjadi 300 perkg gitu, kita mendapatkan uang Rp2,578 triliun artinya apa? bahwa kekurangan pupuk yang Rp7,3 triliun ini bisa ditutup. Jadi ini dengan adanya efisiensi tadi baik dari kenaikan HET, penurunan HPP maupun dengan perubahan komposisi NPK kita mendapat anggaran lebih kurang Rp 7,3 triliun dan bisa menaikkan volume pupuk dari 7,2 juta ton menjadi 9,1 juta ton. Ini mudah-mudahan di 2021 ini akan lebih longgar.

Kemudian saya lanjutkan Permentan 49 yang sesuai dengan Permendagri 15 2013 itu hanya menetapkan HET dan alokasi. Jadi alokasi ini mulai dari bawah tadi dari RDKK yang dibuat oleh para petani, didampingi penyuluh, divalidasi oleh BPP, BPP langsung diserahkan ke Dinas Pertanian

Kabupaten Kota, disana divalidasi oleh ... penyuluhan dari Dinas kabupaten diserahkan ke provinsi, dari provinsi ke pusat. Nah pusat itu tidak mengurangi, tidak menambah, langsung men SK kan berdasarkan kuota dari masing-masing provinsi. Izin Bu Luluk, tadi nanti ada kaitannya dengan yang dapil ibu kosong, jadi kalau ada kabupaten. Saya sampaikan dulu, dengan Permentan tersebut isinya peralokasi provinsi, nah nanti dari provinsi itu membuat SK Kepala Dinas Provinsi alokasi ke masing-masing kabupaten tentunya berdasarkan usulan dari kabupaten yang bersangkutan artinya bahwa.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI/F-PG (H. DEDI MULYADI, S.H.):

Pimpinan. Pimpinan. Pimpinan, izin.

KETUA RAPAT:

Sebentar, sedikit lagi boleh?

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI/F-PG (H. DEDI MULYADI, S.H.):

Itu SH nya yang mengkoreksi saja, yang sering menjadi kendala di lapangan adalah keterlambatan dari SK Provinsi. Musim panen sudah jalan, petani harus sudah mupuk, SK Provinsi, SK Gubernurnya belum keluar. Ini kalau bisa itu dihapus tidak usah, cukup oleh Kementerian saja, terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih. Lanjut.

DIRJEN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN:

Baik pak.

Jadi tadi yang disampaikan Bu Luluk, mengapa di 2 kota binaannya tidak ada SP36, itu adalah kebijakan dari Kadis Provinsi, mungkin usulannya tidak ada. Jadi nanti bisa dikonfirmasi ke Kadis provinsi, mengapa untuk Kabupaten A atau Kota A SP36 nya nol, jadi bukan dari pusat bu ya, itu ya?kemudian kaitan dengan distribusi kuota ya?kemudian kaitan dengan pengadaan distribusi itu nanti mungkin dijelaskan dari Pupuk Indonesia karena itu berdasarkan Permendag adalah sepenuhnya kewenangan beliau. Kemudian Kartu Tani itu ditangani oleh Himbara bu, jadi tadi kalau Ibu Ema disana ada bisnis, saya tidak tahu karena yang mengadakan kartunya juga di Himbara gitu ya. Jadi kami itu sebetulnya dalam pengolahan pupuk bersubsidi ini tidak pernah melihat uangnya bu walaupun PPK nya dikami. Kami hanya mendapat tagihan dari Pupuk Indonesia, memverifikasi sesuai karena syaratnya adalah ada penerima, ada pengguna kemudian disitu rekapnya diketahui oleh Kepala Dinas, di kirim ke kami, kami setuju. Kemudian kami kirim ke Kementerian Keuangan, cair uangnya pun langsung secara LS dari Kementerian Keuangan langsung ke Pupuk Indonesia gitu ya.

Jadi kami hanya apa namanya membuat SK HET, membuat SK alokasi per provinsi kemudian mengawasi, gitu ya, hanya mengawasi. Kemudian kenaikan HET sudah, kemudian kurang bayar. Kurang bayar ini, kami laporkan betul tadi apa yang disampaikan Bu Alin lebih kurang 20 triliun, sudah kita selesaikan 2019 Rp 9,7 triliun, kebutuhan 2020 ada 5,7 triliun, jadi sisanya sekarang lebih kurang Rp 6,1 triliun, iya Pak Bakir ya? kalau nggak salah Rp 6,1 triliun, Rp 6,1 triliun itu sisanya dan akan kami upayakan di bulan Maret, April ini, akan kami upayakan di bulan Maret April ini.

Kemudian kenaikan HET untuk apa? tadi sudah saya jelaskan, untuk menambah volume dari 7,2 juta on menjadi 9,1 juta ton. Kemudian perubahan komposisi sudah, kemudian pelaksanaan Kartu Tani ini kebijakannya sama dengan 2020 artinya bahwa para petani yang berhak mendapatkan Kartu Tani itu. Punya KTP, punya NIK kemudian punya lahan gabung ke kelompok tani. Jadi kalau ada petani yang belum bergabung kepada kelompok tani iya secara aturan dia tidak bisa mendapatkan pupuk bersubsidi.

Kemudian menggunakan Kartu Tani, bagi petani-petani yang sudah memiliki Kartu Tani, bagi kios-kios yang sudah ada fasilitas EDC nya gitu ya.

Kemudian yang selanjutnya berkaitan dengan distributor, distributor itu di bawah produsen bu, jadi bukan di bawah Kementerian Pertanian. Yang berhak mencabut izinnya kios distributor adalah PIHC ya, PIHC. Kemudian selanjutnya untuk melihat volume, Pak Fransiskus Lema sudah. Data Pak Fransiskus Lema, data kita sekarang *basic* nya adalah data RDKK yang diusulkan oleh para petani kita pak, oleh para petani dalam rangka pupuk bersubsidi tapi *database* petani ada di penyuluhan di sistem SIMLUHTAN, ada SIMLUHTAN pak termasuk luas lahan bakunya ada disana.

Kemudian kaitan dengan praktek, saya pikir tidak ada pak ya? kemudian transparansi Bu Alin sudah saya sampaikan. Pak Darori apa salah satu terobosan untuk Blok Grand pak ya? jadi sebetulnya kami setuju pak tinggal nanti kesimpulan di RDP ini, jadi kami ngikut nanti kami sampaikan ke Pimpinan ke Menteri kalau memang itu nantinya lebih baik. Tadi saran dari Pak Ketua, saya sebetulnya setuju, jadi uang itu langsung masuk ke Kartu Tani, petani tinggal langsung beli ke kios-kios, jadi sudah pasti itu akan dinikmati oleh petani. Kemudian tadi Pak Slamet Ariyadi realisasi 96,92% ini adalah rata-rata nasional pak, kemudian data per kabupatennya ada, nanti bisa kita kasih. Sumber data itu dari Pupuk Indonesia, iya dari Pupuk Indonesia. Mungkin ada kabupaten-kabupaten yang hanya 60, 70% realisasinya tetapi secara kumulatif kita rata-ratakan realisasinya 96,92%, iya, kemudian jumlah penyuluh terbatas, Bu Farida nanti mungkin akan disampaikan oleh Pak Dedi. Kemudian apalagi, kaitan dengan Pak Narno tadi, mengapa HET naik, tidak naik. jadi HET ini sejak 2012 itu belum pernah naik pak, kebetulan tahun ini ada kekurangan keuangan yang begitu signifikan dibanding dengan 2020 kaitan dengan penggunaan pupuk bersubsidi. Kemudian kami dalam pembahasan dengan teman-teman DJA juga tidak memungkinkan ada tambahan sehingga kami merespon Surat Menteri Keuangan tersebut dan menaikkan HET di 2021 ini sedangkan gabah

itu kalau tidak salah sudah 3 kali naik; jadi 2.700 per kg kemudian sekarang sudah 4.200. Mungkin itu Bapak Ketua hal-hal yang dapat kami sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Mungkin ada tambahan dari Pak Wandu, silakan pak.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI/F-GERINDRA (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Sebentar Pak Pimpinan.

Tadi ada pertanyaan dari Anggota Pak Dirjen. saya lupa kalau nggak salah sih Pak Slamet mengenai upaya percepatan implementasi. Pak Slamet itu Pak Slamet bukan tadi?

F-PKS (drh. H. SLAMET):

Iya Pimpinan.

Jadi yang dijawab semua itu adalah pertanyaan yang tanpa diserahkan termasuk yang saya tanyakan itu, yang saya omongkan itu juga yang saya tulis. Satupun tidak dijawab, ini apa-apaan sih yang dijawab yang mana nih? Pak Ketua saya izin semua harus adil dijawab, kalau ada yang tertulis, tertulis. Saya pikir daritadi yang dijawab justru teman-teman yang tidak sesuai dengan kesepakatan, fraksi nggak ada yang dijawab pak. Satupun saya tidak ada yang dijawab ini, mohon maaf.

KETUA RAPAT:

Pak tolong dijawab Pak.

Baik pak.

Ini yang Pak Slamet sudah pak pupuk bersubsidi sudah. Dampak pupuk bersubsidi terhadap produksi, nanti dijawab Dirjen Tanaman Pangan. Kemudian Pemerintah sosialisasi, dosis pupuk, dosis pupuk, kuncinya e-RDKK sudah. Dosis itu berdasarkan hasil Litbang untuk urea itu 150-200 kg perhektar.

F-PKS (drh. H. SLAMET):

Bukan dosisnya pak? langkah-langkahnya yang mau ditempuh mana pak?

DIRJEN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN:

Langkah-langkah untuk?

F-PKS (drh. H. SLAMET):

Langkah-langkah yang dilakukan oleh Kementerian untuk kemudian menginformasikan dan memintarkan petani.

DIRJEN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN:

Iya itu nanti mungkin akan dijawab oleh Kepala Badan Penyuluhan karena kuncinya adalah bagaimana para penyuluh itu bisa mensosialisasikan kepada para petani untuk apa namanya menggunakan atau mendapat pupuk bersubsidi tentu sesuai ketentuan, artinya jangan ditakut-takuti bahwa kalau tidak mempunyai Kartu Tani tidak bisa nembus itu yang kebanyakan ada di lapangan. Itulah tugas dari penyuluh nanti mungkin mau disampaikan oleh Pak Dedi. Kemudian pertanyaan bapak yang berikutnya adalah kenaikan HET tadi sudah saya jelaskan dan apa namanya kaitan dengan komponen-komponennya juga sudah saya jelaskan. Itu pak ya?iya nanti secara tertulis ada pak. Jadi saya pikir sudah dijawab semua.

KETUA RAPAT:

Pak Slamet yang harus dijawab oleh TP?

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI/F-GERINDRA (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Iya saya ingin Pak Dirjen, sebenarnya yang saya inginkan tadi dari pertanyaan Pak Slamet pendalaman mengenai *timeline*. Ini bapak percepatan implementasi Kartu Tani pak. Inikan hebat sekali semua berkata-kata pak.

DIRJEN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN:

Baik pak, iya.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI/F-GERINDRA (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Restorasi data, melakukan verifikasi.

DIRJEN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN:

Baik iya.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI/F-GERINDRA (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Iya coba tolong dijawab ya pak.

DIRJEN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN:

Baik pak, jadi langkah-langkahnya yang pertama validasi data sudah kita lakukan kemudian konsentrasi 2021 adalah di Pulau Jawa dan Madura kemudian yang ketiga tugas Himbara adalah menyampaikan EDC-EDC ke kios-kios. Kemudian yang selanjutnya menyerahkan Kartu Tani ke para petani yang ada di Jawa dan Madura sehingga nanti dari Kementerian Pertanian adalah ada sosialisasi yang dilakukan oleh para penyuluh kita yang ada di lapangan untuk bisa apa namanya melakukan percepatan pelaksanaan Kartu Tani, mungkin itu Pak Pimpinan. Terima kasih.

F-PDIP (RIEKY APRILIA, S.H., M.H.):

Interupsi Pimpinan.

Mungkin yang dimaksud dengan Pak Slamet dari Fraksi PKS dengan Pak Budi itu, target konkrit itu yang dimaksud dengan *timeline* itu pak. 2021 Desember atau 2029 gitu maksudnya pak.

KETUA RAPAT:

Apa 2050 gitu? iya *insya allah* lah.

Iya dijawab dulu pak.

DIRJEN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN:

Siap. Baik terima kasih.

Jadi berdasarkan Ketua Pokja Pupuk, Ibu Musdalifah itu, keinginannya adalah 2020 selesai Jawa-Madura, tapi saya yakin dengan 65%, 65% selesai Jawa Madura pak. Ini nanti mungkin akan lebih menjelaskan dari Menteri Perekonomian. Silakan Pak Wandu yang tadi pertanyaan Pak Slamet pengaruh terhadap produksi.

DIRJEN TANAMAN PANGAN:

Iya, terima kasih.

Izin Pak Ketua.

Dampak sudah ada analisis beberapa kajian, riset pemupukan terhadap produktivitas Jawa, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan seterusnya. Tadi justru yang ditanyakan Pak Slamet, ada beberapa lokasi yang melebihi rekomendasi pemupukan. Jadi ciri-cirinya kalau tanaman warnanya hijaunya suburnya sekali itu kebanyakan NPK biasanya dan belum tentu produktivitas...cukup.

Nah langkah selanjutnya yang dilakukan, pemetaan kebutuhan hara atau kondisi kesuburan tanah, haranya kurangnya apa? sekarang apa?

Nah dari situ keluarlah rekomendasi Litbang kebutuhan pemupukan paket rekomendasi NPK nya perkecamatan pak. Nah sudah pak, ada buku 1 2020 paket... itu.

Setelah ada paket mestinya ini masuk kekunci kebutuhan apa? di dalam RDKK itu sudah ngunci, kecamatan ini Ureanya sekian kilo, NPK nya sekian kilo... itu sesuai rekomendasi pak. Jadi tinggal ngisi luasnya saja, nanti pupuknya sudah dihitung sendiri oleh Sistem e-RDKK.

Nah selanjutnya fungsi penyuluhan, supaya mengenalkan yang dimaksud tadi Pak Sutrisno banyak yang belum tahu ini pupuk berimbang. Nanti fungsi-fungsi penyuluhan terima kasih Pak Trisno sudah mengingatkan dan Pak Slamet juga itu langkah-langkah dalam rangka supaya bisa menggunakan pupuk tetap tepat sasaran karena kuncinya ada disitu dan ini sudah musim hujan, tanamnya banyak, memang sangat membutuhkan.

Tadi ada masalah yang disampaikan betul, pergantian waktu administrasi subsidi pupuk dengan di lapangan nggak bisa ditunggu, jadi kecepatan itu yang perlu diselesaikan. Alternatif lain tadi dari Pak Asep setuju juga dan izin Pak Ketua nanti dalam bentuk tulisan saja semua lainnya yang diluar yang saya sampaikan. Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Iya lanjut.

**KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM
PERTANIAN:**

Baik terima kasih.

Yang kami hormati Ketua, Wakil Ketua, dan semua Anggota Komisi IV.

Pertama, saya sangat mengapresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya ini dari Komisi IV yang begitu besar perhatiannya terhadap penyuluh. Apa yang bapak-bapak, ibu-ibu sampaikan itu sebetulnya memang hal yang sedang kita perjuangkan Pak Ketua dan bapak, ibu sekalian milsanya jumlah penyuluh yang sampai saat ini masih belum memadai, termasuk juga kesejahteraannya BOP nya. Kemudian juga tadi beberapa menyarankan agar penyuluh ditarik kepusat, ini sebetulnya sedang kita perjuangkan namun demikian nampaknya belum berhasil. Kemudian juga tadi berbagai apa namanya saran mengenai sosialisasikan kepada penyuluh, kepada petani terkait dengan Kartu Tani, terkait dengan kelangkaan pupuk, rekomendasi pupuk dan sebagainya, ini sebetulnya kita lakukan terus pak ya? kami mempunyai beberapa program yang langsung kepada penyuluh baik secara virtual maupun secara *offline* secara langsung. Misalnya kalau secara

virtual kita sangat gencar pak dalam satu minggu, kita lakukan 4 kali pak ketemu dengan apa penyuluh melalui program secara virtual, melalui Vicon. Disitu kami selalu menyampaikan hal-hal yang terkait dengan program Kementerian Pertanian termasuk mengenai rekomendasi pupuk, termasuk mengenai penggunaan Kartu Tani, termasuk juga bagaimana mengatasi kelangkaan pupuk yang utamanya dengan cara meningkatkan efisiensi pemupukan di lahan petani, jadi seperti itu.

Kemudian juga tadi berbagai saran mengenai pembangunan sistem informasi penyuluhan pertanian baik melalui cross cek data, validasi data petani, validasi data lahan dan sebagainya ini juga kita lakukan dalam satu tahun itu dua kali. Kita lakukan *updating* data dan validasi data, jadi setiap 6 bulan memang secara rutin kita lakukan itu. Nah kemudian juga termasuk tadi terkait dengan alih fungsi dan kaitannya dengan RDKK. Tentu iya setiap tahun dua kali itu kita update bu, iya mengenai alih fungsi. Namun demikian mungkin harus saya sampaikan juga bahwa data di dalam SIMLUHTAN itu adalah data petani yang ada di dalam Poktan dan gapokatan. Nah kalau yang belum ada di situ berarti memang belum terdata, nah ini memang mungkin kelemahan dari sistem informasi penyuluhan pertanian, memang yang harus kita bangun seterusnya. Nah oleh karena itu tentu saja kalau berbicara mengenai alih fungsi, berbicara mengenai RDKK juga, relatif ruang lingkungannya terbatas di petani yang ada di dalam poktan dan gapoktan. Jadi kalau yang belum ada di situ memang belum terdata pak, nah itu barangkali yang perlu kita perbaiki seterusnya.

Nah kemudian juga terkait dengan kekurangan jumlah penyuluh Pak Ketua, sebetulnya Pak Menteri Pertanian sudah meminta formasi baru untuk penyuluh, 60.000 penyuluh, 6.000 orang pertahun sehingga dalam 5 tahun diharapkan mencapai target 30.000 penyuluh, jadi kalau dijumlah dengan yang ada itu sudah relatif 1 penyuluh 1 desa, begitu patokannya. Kemudian juga kita sebetulnya sudah mencoba membuat kajian bagaimana caranya penyuluh ditarik ke pusat dan kajian itu sudah dibahas di Kemenko Perekonomian, iya? kemudian juga selanjutnya dibahas dengan Mensekap dan Menkopolkam, kemudian juga dengan Kemendagri dengan BKN dan lain sebagainya. Nampaknya memang agak sulit Pak Ketua karena kalau menarik penyuluh ke pusat itu harus merevisi beberapa Undang-undang, kalau tidak salah sampai 3 undang-undang. Nah disitu kami mentok akhirnya Pak Menteri Pertanian menyarankan, iya sudahlah kalau memang sulit ditarik dipusat katanya, posisi penyuluh tetap ada di kabupaten kota atau provinsi tetapi iya? secara teknis tetap di bawah Kementerian Pertanian. Nah jadi seperti itu, tapi itu di dalam Inpres. Nah draftnya itu sudah kami susun sejak akhir tahun lalu dan kemarin kita sudah awal Januari ini sudah kita finalisasi, iya? mudah-mudahan tidak terlalu lama, nanti kami usulkan kembali ke Mensesneg. Saya kira mungkin itu Pak Ketua yang pasti saran-sarannya sudah kita catat karena memang itu adalah hal yang sedang kita perjuangkan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Pak Kepala Badan, kalau bicara anda memperjuangkan, zaman disini Suswono, Zaman disini E.E Mangindaan Menpannya, iya seperti anda jawabannya yang honorer akan diangkat jadi PNS. Udah nggak usah ngomong, itu omong kosong semua, omong bohong, saya jamin yang bohong. Zaman Suswono jadi menteri ngomongnya seperti itu, waktu itu saya ikut rapat gabungan, 4 menteri yang datang. Zamannya Pak Suswono, Menpannya Mangindaan, Menteri Keuangan, iya sama jawabannya seperti ini, tapi ujung-ujungnya apa? iya sudah, gue kan ya udah yang penting udah gue jawab, *wassalam*, itu saja. Jadi nggak usah mimpi 1 desa, 1 udah. Itu 2010 sampai 2012, 2013 sama, itu aja kecuali Presiden mengambil kebijakan, tambahkan penyuluh. Resikonya apa? seperti halnya dulu, penyuluh honorer 10 bulan dibayar oleh APBN. 1 bulan oleh provinsi, 1 bulan oleh kabupaten tapi masih banyak, masih ada baik provinsi maupun kabupaten yang tidak membayar honorinya. Jadi kerjanya setahun, dibayarnya 10 bulan, 2 bulan menjadi beban. Itu nggak jalan juga pak, percuma pak, iya? coba siapa disini waktu itu masih jadi Eselon berapa waktu zaman Pak Suswono disini?

Betul Pak Mindo? zaman Suswono ada kata-kata itukan? kami upayakan, kami usahakan, kami berjuang, omong kosong.

Iya selanjutnya siapa lagi Pak Sarwo Edhy?

DIRUT PT PUPUK INDONESIA *HOLDING COMPANY*:

Ketua, serta Anggota Dewan yang terhormat.

Kami berusaha menjawab beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan PIHC. Yang pertama tadi ada dari Pak Khaerudin terkait dengan masalah pengadaan angkutan distribusi. Jadi memang sebenarnya dalam tender ini kami telah melakukan, kalau misalnya tender itu bukan hanya divisi satu pak, bukan hanya dikota saja tapi juga ada yang didaerah. Jadi ada divisi 2 nya juga dan itu tendernya memang dipisah, ini sudah dilakukan juga di *holding* pak. Kemudian yang kedua mungkin dari Pak Slamet terkait ini pertanyaan tertulis kami berusaha menjawab, mungkin nanti kalau belum lengkap pak, akan kami jawab juga tertulis pak mengenai ada 3 pertanyaan disini yang berkaitan dengan Pupuk Indonesia.

Yang pertama, penjelasan mengenai kelangkaan pupuk yang terkait dengan RDKK dan lain-lain. Jadi kami perlu menjelaskan pak bahwa data dari Kepala Dinas itu kadang-kadang menggunakan data usulan itu pak yang 23 juta sehingga beberapa kios itu menggunakan data itu sebagai basis untuk mendapatkan pupuk. Nah sebaiknya memang kalau bisa memang data yang keluar adalah data sesuai dengan apa yang di budgetkan, misalnya 9 juta hanya data itu yang keluar dan alokasi dibagi per kios sehingga informasi itu juga menjadi pegangan dari semua orang bahwa memang yang 9 juta itulah yang menjadi pegangan bukan data yang 23 juta.

Kemudian yang kedua mengenai Kios Lengkap (KPL), kami sudah 100% pak menyediakan Kios Pupuk Lengkap, jadi tidak ada masalah. Kemudian mengenai yang ketiga, mengenai pembayaran piutang pupuk saya rasa tadi sudah dijawab oleh Pak Dirjen, kemudian untuk selanjutnya adalah dari Ibu Luluk; peran dan posisi tanggung jawab Pupuk Indonesia dalam Kartu Tani pak. Iya jadi memang peran Pupuk Indonesia yang utama adalah menyediakan Kios Pupuk Lengkap tadi pak, bu, jadi menyediakan Kios Pupuk Lengkap. Kemudian kelengkapan bahwa nanti ada EDC, kemudian pelaksanaannya nanti itu adalah setelah kami menerima EDC, nanti mungkin lebih jawab oleh Himbara pak.

Kemudian Pak Salim, begini pak mengenai distributor bahwa ada distributor yang, iya misalnya distributor nakal kemudian ini kami juga mempunyai penilaian pak mengenai distributor ataupun kios yang tidak *perform*, itu kami mempunyai penilaian dan ini dilakukan penilaian secara terbuka dan bahkan kami ingin dalam tahun ini rencananya semua masalah distributor ini akan kami lakukan secara terbuka di dalam website. Jadi mengenai kriteria, penilaian dan lain-lain sehingga bisa lebih transparan. Nah kalau memang ada kasus hukum dari para distributor tentunya distributor itulah harus bertanggung jawab karena kami juga.

Saudara Dirut saya tanya selama ini PIHC pernah nggak, ada distributor masuk penjara atau agen pupuk?ada nggak?nggak ada kan?

DIRUT PT PUPUK INDONESIA *HOLDING COMPANY*:

Izin Ketua.

KETUA RAPAT:

Nggak ada kan?

DIRUT PT PUPUK INDONESIA *HOLDING COMPANY*:

Nggak ada.

KETUA RAPAT:

Jadi tadi anda mengatakan kalau agen kena masalah hukum itu tanggung jawab dia? sedangkan yang memberikan penilaian, izin itu PHC?betul nggak?jadi nih agen pupuk kamu bermasalah, matilah kamu. Sedangkan tanda kutip ada enggak yang main-main? ada nggak?mohon maaf ini dari sekian banyak Direksi lama PIHC, Direktur maupun Direktur Pupuk, Pabrik Pupuk yang menjadi agen?ada. Ada nggak Kementerian Perdagangan yang menjadi agen? Kalau anda bilang nggak ada, kita buktikan. Ada, nanti dalam kesimpulan rapat masukkan saja apabila distributor kena masalah hukum, iya yang memberikan juga harus kena sanksi kan gitu? *fair* dong, jadi jangan distributor kena masalah, itu kesalahan kamu. Iya dia salah karena kurangnya pengawasan.

Pak Sarwo Edhy PIHC masuk KP3 enggak? Jawab pakai ini.

DIRJEN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN:

Anggota KP3 apa namanya.

KETUA RAPAT:

Jaksa, Polisi, Kementerian Pertanian, Penyuluh?

DIRJEN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN:

Perdagangan.

KETUA RAPAT:

PIHC nggak?

DIRJEN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN:

Nggak.

KETUA RAPAT:

Yang memberikan izin distributor siapa?

DIRJEN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN:

Yang memberikan izin distributor PIHC, jadi kalau iya.

KETUA RAPAT:

Iya nanti kita lihat keputusan teman-teman gimana.

Lanjutkan pak.

F-PDIP (H. SUNARNA, S.E., M.Hum.):

Izin sedikit Pimpinan. Izin sedikit Ketua, iya.

Gini Pak Ketua, Pak Direktur. Jadi pengalaman itu rata-rata dari Pupuk Indonesia dulu itu sombong-sombong Ketua. Jadi karena saya bupati saya, saya bupati 2 kali, jadi di saya daerah Bupati Klaren 2 kali. Dulu saya mimpin itu sudah ada distributor 3, dia dari sana ngegas gitu. Jadi urusan bupati apa? ini mau nambah satu lagi. Belum lagi 2 tahun sudah, digas lagi tambah lagi tadi. Sekarang ada 6 karena tahun kemarin digas juga istri saya itu, mimpinkan? kebetulan dilanjut istri saya. Iya jadi, jadi apa? jadi dari Pupuk Indonesia kenapa merasa mereka semuanya? mereka ngegas, saya nanya sendiri jadi menurut mereka gitu dan itu juga lingkaran-lingkaran mereka

semuanya, saya buka juga saya tahu semuanya, karena saya tahu persis dan saya kenapa tidak setuju? karena itu orang tidak baik gitu, karena itu tipikalnya tidak baik tapi tetap saja dikasih izin dan itu yo sering bikin masalah. Ini salah satu contoh saja apakah itu gasnya sampai atas atau tidak? mungkin dari atas, karena yang bawah tinggal ikut saja yang diwilayah. Nah ini adalah juga menjadi apa? menjadi koreksi juga karena memang kalau memang itu menurut didaerah itu orang itu tipikalnya sudah personalnya tidak baik iya tetap saja, dia bikin ulah, bikin masalah juga dan saya juga sangat mengharapkan berapa sih sebenarnya keuntungan dari distributor dan juga dari kios itu sendiri dari pak direktur? jangan-jangan nanti juga dari alur distribusi itu saja tidak efisien menurut saya jangan-jangan, karena itu juga rebutan orang-orang gede semua, kira-kira kan kesana.

Jadi rata-rata pemerintahan daerah itu dikesampingkan dari Pupuk Indonesia itu diberi masukan pun kalau itu personalnya tidak baik pun tetap saja dikasih, tetap izin dikeluarkan dan tahun lalu mungkin bisa dicek, di sana juga ada di Klaten keluar satu lagi dan personalnya tidak baik dan itu dari mereka kira-kira. Kira-kira begitu Pak Ketua.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Iya lanjutkan Pak Dirut.

DIRUT PT PUPUK INDONESIA *HOLDING COMPANY*:

Baiklah kemudian terkait dengan sentralisasi di holding bapak bahwa Pupuk Indonesia menjalankan sentralisasi sesuai dengan amanah yang diberikan kepada kami dari BUMN. Jadi bahwa ini adalah sudah masuk ke dalam RJT daripada BUMN nya sendiri. BUMN sudah melakukan kajian bahwa sentralisasi yang dilakukan ini, dilakukan berdasarkan *branchmarking* dan juga studi yang dilakukan antara BUMN, PIHC dan juga konsultan pak, dalam hal ini misalnya Pupuk Indonesia menggunakan Boston Consultan grup kemudian dan di *branchmarking* dengan perusahaan internasional lainnya. Nah itu berbagai fungsi memang dijadikan setelah di branchmark kemudian disatukan, jadi ini adalah kebijakan dari BUMN, jadi kami hanya menjalankan pak.

KETUA RAPAT:

Saya minta tolong SK nya kalau ada. Saya nanti akan usahakan diskusi juga dengan Menteri BUMN. Dengan istilah begini kalau beli 1; 1.000 kalau beli 10;800, itu fair, untuk kemurahan, kemudahan...pupuk tapi kalau beli 1;10, terus beli 10 juga ada jadi harga 12, inikan kendala sebetulnya. Saya minta juga coba surat dari Menteri BUMN yang mengatakan bahwa harus ada sentralisasi bahan baku. Kalau beli borongan jadi murah, beli eceran mahal, itu saya setuju apabila demikian, iya kan?tapi kalau beli banyak borongan lebih mahal, inikan jadi nggak benar. Iya kalau gitu nanti saya juga

akan memanggil BPK untuk diajak konsultasi disini, baik yang menangani pertanian maupun yang menangani BUMN untuk mengkaji surat tadi BUMN tadi gitu. Kebetulan dua-duanya sahabat saya, jadi saya lebih gampang untuk konsultasi. Kemarin Jum'at konsultasi juga, saya melaporkan masalah kenaikan harga pupuk.

Gitu saja lanjutkan pak.

DIRUT PT PUPUK INDONESIA *HOLDING COMPANY*:

Iya terima kasih pak.

Baiklah kemudian jadi terkait dengan HPP pak, jadi HPP itu merupakan sistem yang diaudit oleh BPK pak. Itemnya itu rinciannya memang keluar dari Kementerian Pertanian, jadi rincian itu jelas pak dan ini dilakukan audit dan itu merupakan komponen utama daripada audit. Seandainya memang mau dilakukan verifikasi, kami tidak masalah tapi ini adalah sudah diaudit oleh BPK, jadi HPP kami udah diaudit oleh BPK. Mungkin itu saja yang mungkin jadi ini, pertanyaan yang mungkin.

F-PG (Ir. ICHSAN FIRDAUS):

Ketua, boleh saya tanya Ketua?

F-PDIP (Dr. H. SUTRISNO, S.E., M.Si.):

Pimpinan Intrupsi.

F-PG (Ir. ICHSAN FIRDAUS):

Sebelah kiri Ketua, intrupsi Ketua.

KETUA RAPAT:

Pak Ikhsan dulu, sebentar pak. Udah gitu Pak Sutrisno.

F-PG (Ir. ICHSAN FIRDAUS):

Pak Sutrisno saya minta izin dulu sebentar. Pak Dirut dan Pak siapa namanya? dan Pak Sarwo.

Dari HET sorry kemudian penurunan HPP sekitar 5 %, berapa kontribusinya PIHC itu pak dari 5 % itu?apa komponennya pak?saya ingin pendalaman sebelum nanti kita pada saat Raker dengan Kementerian Pertanian, dengan Menteri Pertanian ingin pendalaman. Berapa persen pak?

DIRJEN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN:

Kita dapat efisiensi Rp 2,457 triliun.

F-PG (Ir. ICHSAN FIRDAUS):

Kontribusi dari PIHC berapa pak efisiensinya dari 5 % itu?

DIRJEN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN:

Iya itu pak, kan HPP itu membentuk harga pokok penjualan. Jadi dari PIHC.

F-PG (Ir. ICHSAN FIRDAUS):

itu 5% dari PIHC? dari PIHC 5 %?

DIRJEN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN:

Lebih kurang 5 % dan memang apa yang disampaikan Pak Bakri betul, jadi memang hasil audit BPK. Jadi ini ada HPP pupuk subsidi hasil audit BPK diaudit dan 2020 ini menggunakan HPP apa namanya.

F-PG (Ir. ICHSAN FIRDAUS):

Jadi efisiensi berdasarkan rekomendasi BPK itu 5 %? nggak lebih dari itu hanya 5 % pak? saya kok melihat ada penyimpangan yang lebih dari itu pak sebenarnya. Nanti kita perdalam pak terkait dengan Pak Ketua, kalau rasanya kalau HPP apa? efisiensi HPP 5%, Zakat Mal saja menurut saya begitu Tapi kalau kemudian nanti kita coba cek lagi dengan baik begitu. Nah yang kedua pak, saya pak, Pak Dirut; saya mau tanya ini kan ada berita-berita yang mengatakan ada kelangkaan pupuk pak di Januari, saya mau tanya pak sebenarnya peta stok pabrik di masing-masing pabrik berapa sih pak sebenarnya produksi ini? jangan sampai begini pak, ini sudah masa tanam saya dapat berita tadi bahwa stok kita ini bahwa apa namanya petani kesulitan mencari pupuk pak, jangan-jangan problemnya bukan didistribusi pak tapi distok di pabrik ini pak, saya khawatir saja. Bapak buka saja sekarang, berapa sesungguhnya stockname? cukup nggak buat kita pak, buat kemudian memenuhi subsidi pak? memenuhi kemudian kalau misalnya Pak Ketua bilang tadi bahwa ada petani bisa bilang, ada yang bilang bahwa saya pun mencari pupuk non subsidi aja susah apalagi pupuk subsidi, saya malah curiga jangan-jangan stoknya kita nggak ini pak. Tolong dibuka pak di bulan Januari ini seperti apa sih pak stoknya? setidaknya sampai April lah sampai masa tanam ini selesai gitu pak, saya ingin tahu saja. Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Silakan ditampilkan.

Pak Sutrisno mau nanya silakan? sekalian mau nunggu ditayangkan.

F-PDIP (DR. H. SUTRISNO, S.E., M.Si.):

Ketua, tadi saya mempersalahkan 1,1 juta ton pupuk tambahan dari APBNP. Di lapangan sampai dengan Desember masih langka tapi terjadi penjualan pupuk gelap. Nah ini situasi kalau pupuk di mana ini persoalannya? kalau nanti terlambat kan tidak bisa dijual ditahun 2021 sehingga ada penyalahgunaan. Oleh karena itu supaya bisa jelas darimana permasalahannya, mohon disampaikan kemana 1,1 juta? supaya kami bisa mengontrol.

KETUA RAPAT:

Nah ini mungkin yang bisa jawab Tanaman Pangan, bukan?

DIRJEN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN:

Baik saya coba jawab .

KETUA RAPAT:

Pertanyaannya Pak Sutrisno itu seharusnya kebeliau.

DIRJEN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN:

Baik pak, jadi begini Pak Sutrisno kaitan dengan tambahan pupuk 1,1 juta Ton APBNP itu ke sudah kita alokasikan dulu yang awalnya ada, apa namanya ada cadangan 10% terus kita kembalikan itulah pak. Jadi dari.

KETUA RAPAT:

Yang cadangan mana yang 10%?

DIRJEN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN:

Nggak dulu, dulu pak.

KETUA RAPAT:

Oh yang dulu, yang mau main circus.

DIRJEN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN:

Yang kita hilangkan itu. Jadi semula itu 7,9 juta ton itu menjadi 8,9 juta ton pak sehingga yang satu juta ton itu udah include di dalamnya dan sudah kita sebar ke 34 provinsi, kira-kira itu Pak Tris. Rinciannya ada.

F-PDIP (Dr. H. SUTRISNO, S.E., M.Si.):

Ini pak inikan faktanya disaat petani kekurangan, membeli pupuk yang mahal, ada pupuk gelap ini, pupuk bersubsidi kuning warnanya...ininya. Saya hanya mohon tolong disampaikan distribusi yang 1,1 ini menyakinkan, kapan disalurkan? dan kemana disalurkan? supaya jelas, ini permasalahan tiap tahun akan terjadi karena pergantian tahun anggaran, itu. Mestinya untuk, mohon disampaikan.

DIRJEN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN:

Baik pak, nanti kalau itu.

Siap pak.

Kaitannya dengan penyalurannya, nanti mungkin dari PIHC bisa menyampaikan karena itu memang *include* menjadi volume 8,9 juta ton dari 7,9 kalau tidak salah. Jadi ada penambahan lebih dikurang 1 juta ton.

F-PG (Ir. ICHSAN FIRDAUS):

Ketua.

KETUA RAPAT:

Sebentar.

Pak Sarwo Edhi yang Anda bilang 10% itu, itu beda dengan apa yang ditanyakan oleh Pak Sutrisno. Sebelum saya menandatangani DIPA, ada PERMEN Menteri yang mengatakan 10% menjadi kebijakan diskresi menteri, betul?

Saya bilang kalau PERMEN ini nggak dicabut, saya nggak mau tanda tangan DIPA, akhirnya dimasukkan kembali. Beda dengan pertanyaan Pak Sutrisno, Pak Sutrisno ini APBN tambahan, begitukan? Itulah. Jangan sampai salah jawabnya pak.

DIRJEN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN:

Iya pak, iya baik pak.

Jadi begini Pak Sutrisno, izin.

Dulu kan anggarannya Rp26,6 triliun, gitu pak ya? dengan jumlah pupuk lebih kurang 7,9 juta ton. Kemudian ada tambahan Rp 3,1 triliun, kemudian ada tambahan 1 juta ton menjadi 8,9 juta ton. Nah, itu sudah kita sebarkan ke semua provinsi, itu ada rumusnya kaitan begitu yadan sudah kita sampaikan di RDP dan di Raker pak 2020, mungkin bapak lupa. Kemudian realisasinya sebesar apa ini? ini yang 96,92% ini pak, gitu pak ya?

F-PDIP (Dr. H. SUTRISNO, S.E., M.Si.):

Pimpinan supaya *clear* Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Iya.

F-PDIP (Dr. H. SUTRISNO, S.E., M.Si.):

Ketetapan APBNP itu bulan September, pada saat bertemu dengan Pupuk Indonesia di Purwakarta disampaikan bahwa Jawa Barat dapat 177.499 ton, Majalengka 12.225 ton. Saya sudah keliling pak se Majalengka tidak ada pupuk itu, itu persoalannya. Sedangkan rakyat saya, masih membeli yang 6.000, membeli yang 5.500, membeli lowing apa namanya 4.500 itu, ini persoalannya, ini pasti penyalahgunaan, kenapa? kalau pupuk itu jadi dijual akan terhenti itu menjadi stok, mestinya stok bisa dialihkan pada tahun 2021 supaya tidak terganggu di 2021 makannya dijual secara liar. Yakin, *haiqulyakin* pak itu terjadi.

DIRJEN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN:

Kalau dijual secara liar, saya tidak tahu karena itu kan wewenang distributor dan apa namanya kios, kemudian kami hanya melakukan distribusi dengan merubah SK Menteri Pertanian itu kalau nggak salah Nomor 20 2020 yang mengalokasikan tambahan volume pupuk menjadi 8,9 juta ton pak. Jadi saya pikir kalau ada penyimpangan itu saya tidak tahu, yang jelas dari pihak Kementerian Pertanian dengan ada tambahan dana Rp3,1 triliun dengan volume lebih kurang 1 juta ton itu sudah kita sebar ke masing-masing provinsi, itu aja pak.

F-PDIP (Dr. H. SUTRISNO, S.E., M.Si.):

Mohon maaf Pak Sarwo Edhi saya tidak mempersalahkan bapak, tapi saya ingin dibuka permasalahan itu ada dimana. Ini ingin dibuka permasalahan itu ada dimana? karena 96% itu termasuk yang gelap tadi itu.

DIRJEN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN:

Mungkin ada tambahan Pak Sudin, silakan pak.

F-PDIP (Dr. H. SUTRISNO, S.E., M.Si.):

Oke Pak Sutrisno cukup, jadi nanti begini. Bapak tadi mengatakan APBNP itu terjadi perubahan pada bulan September, nanti waktu Raker bawa aja datanya ya, iya Pak Sutrisno ya? didiskusikan kemana saja yang 1,1 juta ton itu, iya?

DIRJEN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN:

Siap Ketua, iya.

F-PG (Ir. ICHSAN FIRDAUS):

Iya Pak Ketua saya mau.

KETUA RAPAT:

Fransiskus Lema dulu tadi.

F-PG (Ir. ICHSAN FIRDAUS):

Nggak lanjutan tadi itu.

KETUA RAPAT:

Oke.

F-PG (Ir. ICHSAN FIRDAUS):

Yang terkait dengan stok ini pak inikan sudah siap datanya, saya minta per Kabupaten, perprovinsi bisa nggak pak? tadi seperti yang disampaikan Pak Sutrisno bahwa untuk alokasi 2020 saja kondisi Majalengka yang mestinya ada stoknya tapi ternyata pas keliling itu nggak ada. Kalau Pak Sutrisno mengatakan bahwa ini masalahnya di mana? saya malah khawatir masalahnya justru di stok di masing-masing Kabupaten pada saat pola distribusi dari pabrik kepada masing-masing distributor, ketersediaan sebenarnya. Nah maksud saya kalau memang ini ditampilkan di Line 3 Produsen dan sebagainya. Kalau bisa ada kabupaten kota, atau provinsi lah, kita ingin tahu di 2021 kesiapan pabrik pupuk untuk menyediakan pupuk subsidi dan nonsubsidi itu berapa sebenarnya? jangan sampai nanti kelihatannya seolah-olah ada, saling menyalahkan ditingkat bawah padahal sebenarnya problemnya ada di hulu, nah ini kita mau cek dulu yang benar begitu.

F-PKS (drh. H. SLAMET):

Intrupsi Pimpinan.

Saya menguatkan data Pak Sutrisno Pak Pimpinan.

F-PDIP (Dr. H. SUTRISNO, S.E., M.Si.):

Iya.

F-PKS (drh. H. SLAMET):

Iya baik.

Jadi begini pak itu ketika kemudian kita dipanggil di Undang di Purwakarta termasuk disitu ada Pak Dedi, datanya memang dari Pupuk Indonesia itu disemua Jawa Barat tercukupi, itu data yang disampaikan kepada kami oleh Pupuk Indonesia

F-PG (Ir. ICHSAN FIRDAUS):

2020 ya Pak Slamet ya?

F-PKS (drh. H. SLAMET):

Iya 2020.

F-PG (Ir. ICHSAN FIRDAUS):

Ternyata cukup menurut datanya.

F-PKS (drh. H. SLAMET):

Iya fakta di lapangan yang seperti sebagaimana tadi disampaikan oleh seluruh temen-temen minimal ternyata tidak Jawa Barat dan semuanya. Nah kira-kira penyebabnya apa, itu yang ingin kemudian kita cari tahu gitu iya. Jadi kita tidak ingin sekedar itu tugas ini, tugas ini tapi oke sekarang misalnya kalau itu menjadi tugas *holding* atau menjadi tugas PIHC kira-kira di mana itu...? tapi di sisi lain kan sebenarnya ada tiga pihak tadi yang kemudian melakukan pengawasan. Sisi pengawasan ini menjadi tanggung jawab siapa? kenapa tidak jalan? kemarin bisa disampaikan katanya tidak ada anggaran, ditanyain Pak Ketua 2021 dianggarkan, apakah betul karena faktor tidak ada penganggaran kemudian pengawasan menjadi dilepas oleh yang itu mestinya menjadi tugas pemerintah berikut dengan...jadi saya menguatkan data itu saja pak. Terima kasih Pak Ketua.

F-PDIP (YOHANIS FRANSISKUS LEMA, S.IP., M.Si.):

Pak Ketua. Sedikit.

F-PDIP (Dr. H. SUTRISNO, S.E., M.Si.):

Sebentar tapi saya minta tolong ditampilkan dulu data ini. Eh kamu copy, kamu print, bagikan anggota, seluruhnya.

Iya.

F-PDIP (YOHANIS FRANSISKUS LEMA, S.IP., M.Si.):

Iya Pak Ketua tadikan sejak awal, saya mengusulkan peran *engineer* di sini. PIHC tadi kan menjelaskan sudah diaudit oleh BPK, oke ada auditor BPK tapi pertanyaan saya apakah memang BPK tuh paham soal produksi pupuk ini? teknisnya mereka mengerti, mereka ahli, saya di situlah kemudian saya

katakan saya ragu. Sejak awal tadi argumentasi yang saya bangun itu adalah ini efisien atau tidak? maka saya usulkan dari awal tadi saya bilang kita perlu investigasi dengan melibatkan *engineer* untuk melihat begitu; apakah memang PIHC ataupun Pabrik Pupuk ini sudah efisien atau tidak? nah hal yang sederhana aja, dulu biaya gas itu kan 16 dolar turun jadi 6 dolar berarti turun sekitar 300% dan kita tahu bahwa 80% pupuk bersubsidi itu kan komponennya dari gas besar. Nah kalau turun seperti itu, ini logika sederhana matematika aja mestinya kan subsidi juga turun biaya produksi tapi kok tidak. Ini logika sederhana aja dari 16 dolar turun jadi 6 dolar, masa sih tidak ada yang signifikan perbedaannya? Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Iya tolong Saudara Dirut dijawab pertanyaan.

DIRUT PT PUPUK INDONESIA HOLDING COMPANY:

Baiklah mungkin dari yang Pak Ichsan dulu ya; tadi datanya pak untuk lini 1 dan lini 3 sudah lengkap kemudian masalahnya ini adalah memang kalau ini adalah kesulitan kami menyalurkan karena memang belum ada SK Bupati pak, ini baru 44% yang kami terima sampai dengan tanggal 15, coba jadi itu masalahnya. Oke kemudian baiklah kalau untuk harga gas, harga gas kami setahu saya tidak pernah 16 pak. Jadi beberapa Pabrik Pupuk bahwa harganya juga dibawah 6 pak, jadi nggak, nggak semua Pabrik Pupuk itu harganya tinggi. Yang paling tinggi setahu saya adalah di Pupuk Iskandar Muda hanya karena keterbatasan gas dan itu pun hanya 9 koma sekian pak dollar pak, nah kemudian diturunkan menjadi 6, 61 dolar itu yang hanya di Pupuk Iskandar Muda. Kalau Pupuk Kaltim bahkan harganya jauh di bawah 6, jadi artinya harganya sekitar 5 dollar gitu. Jadi memang harga gas di setiap pabrik pupuk berbeda-beda pak tidak sama, rata-rata kalau tidak salah 5,6 pak totalnya. Jadi mungkin.

F-PG (Ir. ICHSAN FIRDAUS):

Pak lanjutin pak, ini baru Sumatera pak. Jawa, Sulawesi?

F-PKS (drh. H. SLAMET):

Sekedar informasi Pak Pimpinan, jadi tadi Pak Dirut menyampaikan, menyalakan Bupati belum mengeluarkan SK.

Sebentar pak, jadi ketika minimal saya bicara tentang Jawa Barat ketika diundang, itu dari 27 kota kabupaten itu hanya tidak lebih dari 4 sekitar 3 Pak Sutrisno ya? belum mengeluarkan SK nya itu dan itu stok cukup pak disitu disampaikan. Jadi itu Pak Ichsan, waktu itu Pak Ichsan nggak hadir, saya sampaikan kalau SK Bupati menjadi apa kambing putih gitu? nah ini saya sampaikan waktu itu datanya seperti itu. Terima kasih.

KETUA RAPAT:

SK Bupati, jangan jadi kambing hitam, jadi kambing guling lebih enak.

F-PDIP (Ir. MINDO SIANIPAR):

Pak Ketua, Pak Ketua.

Saya mau membantu sedikit buat kita sekalian. Mohon Dirut sama Dirjen meluruskan. Saya membayangkan setelah ada SK sampai provinsi membuat SK, sebenarnya dilini Kabupaten sudah bisa diisi tetapi transaksinya ke distributor itu belum bisa diizinkan karena belum ada SK dari Bupati, apakah yang seperti itu yang terjadi?

DIRUT PT PUPUK INDONESIA *HOLDING COMPANY*:

Iya pak inikan syarat penyaluran itu adalah harus ada SK Bupati juga pak, sampai SK Kepala Dinas ya?

KETUA RAPAT:

Pak Wandu mau bantu jelaskan mengenai 44 tadi, 44% SK Bupati atau Pak Sarwo Edie? supaya cepat selesai rapat ini.

DIRJEN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN:

Baik pak.

Jadi memang terus terang Pak Ketua tadi baru tahu hari ini, nanti besok akan kita tindak lanjuti yang apa sisanya yang memang belum apa belum menerbitkan SK Kepala Dinas nya. Sebetulnya kami sudah instruksikan ke seluruh Kepala Dinas bahwa sambil menunggu persetujuan Bupati bisa dikeluarkan dulu SK Kepala Dinas atau minimal ada rincian yang disampaikan ke Teman-teman Pupuk Indonesia di daerah. Besok akan kita tindak lanjuti pak.

KETUA RAPAT:

Jadi Pak Sarwo Edhie baru tahu ini?

DIRJEN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN:

Baru tahu, iya karena kalau kami hanya monitor ke seluruh Kepala Dinas Provinsi itu sudah, sudah menerbitkan SK semua dan SK Kabupaten itu memang ke apa namanya domainnya Kepala Dinas Provinsi dan kami tanyakan ke seluruh Kepala Dinas Provinsi, jawabnya adalah hampir semuanya sudah tapi tadi data dari pak Dirut baru 44%. Besok kami langsung tindak lanjuti pak, terima kasih

F-PG (ALIEN MUS, S.H.):

Pimpinan izin.

KETUA RAPAT:

Pak Sarwo Edhy tahu nggak kalau pupuk langka yang kena cemes siapa? anda loe sama menteri anda.

DIRJEN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN:

Betul pak.

KETUA RAPAT:

Berarti selama ini tidak ada komunikasi yang baik. Benar dikatakan teman-teman tadi jangankan antarlembaga, antar Direktorat Jenderal aja mungkin ketemu nggak ngomongan kali, lue-lue, gua gua, nggak ada urusan gua sama lue, lue juga nggak ada urusan sama gua. Iya kemarinkan contohnya Wandi sama Ketahanan Pangan, iya sama begitu tanya berapa impor kedelai? wah kurang lebih 5 juta, Wandi bilang ada 7,2 juta ton; 2,6 juta adalah kedelai untuk konsumsi selebihnya untuk industri. Inikan gak nyambung, kok satu kantor aja gak nyambung apalagi beda, kalau ini penjual. Iniloh ini untuk menjadi perhatian kita, ayolah kita bangun komunikasi yang baik, saling kasih data, saling kasih apa, gitu loh.

Alin mau ngomong? singkat lin.

F-PG (ALIEN MUS, S.H.):

Sedikit saja, karena ini tadi sudah disampaikan Ketua; saya melihat progress report Kartu Tani inikan sampai tanggal 31 Desember ada 12.466.840 yang tercetak, terus yang terbagi 7.287.702, yang digunakan 1.840.496, benarkan ya pak ya ini? terus kita sinkron lagi dengan dari bapak...inikan realisasi 96,6% ini, terus yang disampaikan oleh Bapak Dirut tadi hampir karena tidak ada di SK kan oleh kabupaten misalkan itu 44% yang baru di SK kan.

Saya tambah bingung Ketua untuk penyaluran pupuk ini sebenarnya setiap ini beda-bedakan Ketua? seharusnya kalau sesuai dengan apa yang dilaporkan oleh Pak Sarwo tadi 96,6% berarti pertanggungjawaban untuk 2020 misalkan ini untuk penggunaan pupuk bersubsidi sudah bisa sesuai tapi ternyata di lapangan memang terdapat lagi kelangkaan, memang karena masalah-masalah ini Ketua. Datanya nggak sinkron antara seperti yang Ketua sampaikan tadi, antara dari, dari Kementan terus juga dari distributornya pupuk terus yang menerima, terus yang mempersiapkan SK, ini yang harus kita cari masalah-masalah ini Ketua. Kalau nggak tetap saja nanti kalau seandainya kita tarik subsidi pupuk, kita langsungkan kita ganti dengan biaya

langsung tunai ke petani-petani bisa jadi tidak sampai lagi Ketua. Nggak bisa kalau cara-cara seperti ini gitu, gitu aja Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Cukup?

Masih ada Pak Dirut yang mau disampaikan atau Pak Sarwo Edhi?

DIRJEN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN:

Sedikit Pak Ketua.

Jadi Bu Alin yang 96,90 % ini realisasi 2020, kemudian yang baru 44% ini SK Kepala Dinas Kabupaten.

KETUA RAPAT:

Untuk 2021.

DIRJEN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN:

Untuk 2021 gitu ya? untuk 2021 gitu ya?kemudian kami pernah Pak Ketua telpon ke beberapa dinas, jadi mereka menunggu apa namanya Bupati baru dilantik, itu ada yang seperti itu. Saya bilang tidak usah menunggu itu karena ini petani harus.

KETUA RAPAT:

Bupati dilantik ada yang bulan Februari, *insya allah* kalau tidak di MK atau di MA. Kalau di MA atau di MK berarti petani nggak kerja dan nggak makan.

DIRJEN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN:

Salah satu, salah satu ini pak, Pak Ketua izin.

Tapi kami akan maksimalkan dalam 2 hari ini, *insya allah* SK minimal dari Dinas Kabupaten sudah terbit semua, insya allah.

KETUA RAPAT:

Masih ada lagi yang mau di.

F-PG (ALIEN MUS, S.H.):

Pimpinan, pimpinan.

KETUA RAPAT:

Iya.

F-PG (ALIEN MUS, S.H.):

Ini saya mau tanyakan untuk mengkorelasi, kalau memang ini sampai tanggal 31 Desember yang tadi Pak Sarwo itu yang 96,6 % ini *connect* nggak dengan data yang terbagi sesuai dengan Kartu Tani yang sudah dicetak ini? yang 7.287.000 ini?

KETUA RAPAT:

Iya pasti nggak *connect* lah. Diem tunggu ada waktu ngomong. Mbak Alin kartu yang terbagi itu belum tentu bisa digunakan kalau EDC nya belum nyala atau sambungan wi-fi nya belum siap atau kartunya nggak ada duitnya.

Iya beda lagi itu bu, iya? nanti ibu makan dulu bu supaya harga tenang.

Dirut ada lagi yang mau dijelaskan?

DIREKTUR UTAMA PT PUPUK INDONESIA HOLDING COMPANY:

Terima kasih Pak Ketua.

F-PG (Ir. ICHSAN FIRDAUS):

Ketua saya perlu pendalaman lagi Ketua terkait dengan stok ini Ketua.

KETUA RAPAT:

Iya.

F-PG (Ir. ICHSAN FIRDAUS):

Saya mau agak dalam ini terkait dengan stok yang ada di. Saya khawatir sebenarnya problemnya tidak hanya pada SK Bupati, Walikota, Gubernur sebenarnya problem, ini kita perlu pendalaman lebih dalam terkait dengan hal ini artinya kalau itu dilimpahkan pada kabupaten kota, oke itu salah satu faktor tetapi apakah kemudian ada faktor lain? kalau tadi ada 16 provinsi. Ada berapa tadi ditampilkan? saya minta juga datanya lebih dalam misalnya kasus kejadian di Jawa Barat, di Kujang 2020 ini jangan sampai terulang lagi di 2021. Saya ingin minta komitmen dari Pak Dirut bahwa problem utama kita adalah ketika stok itu tidak ada di lapangan.

Ketika kejadian di Majalengka hanya dalam hitungan, dalam hitungan seminggu atau menurut Pak Sutrisno tadi data stok aman, stok subsidi tetapi

ternyata kenyataannya pas dikelilingin 1 Majalengka ternyata nggak ada SK sudah ada, saya minta pendalaman ini Pak Ketua. Jadi nanti pada saat kita Raker dengan Kementerian Pertanian pak apa namanya, Pak Dirut saya minta data koneksi antara data provinsi dengan tanggung jawab masing-masing pabrik pak, masing-masing kan kalau nggak salah misalnya Pupuk Kujang tanggung jawabnya Jawa Barat, betul pak siapa namanya? Pak Maryadi betul ya?

Nah saya minta berapa stok kujang, berapa tanggung jawab Jawa Barat? apakah di Jawa Barat ini ada tanggung jawab pabrik pupuk yang lain nggak pak? ini saya mau minta tanya, artinya begini saya ingin memastikan bahwa stok pupuk kita itu betul-betul tersedia, pupuk subsidi ya? jangan sampai kemudian nanti ini ada datanya tapi kenyataan real di lapangan enggak ada dan itu data ini per Januari ini kita pegang.

Jadi ketika nanti di bulan April, bulan Mei pada masa tanam berikutnya kemudian terjadi kelangkaan pupuk, itu tidak ada alasan mengatakan bahwa tidak ada pupuk subsidi. Saya ingin meminta data itu, artinya nanti pada saat Raker Komisi saya minta data ada koneksitas antara ketersediaan stok pupuk yang ada di pabrik dengan tanggung jawab masing-masing provinsi. Ini kita pegang datanya perprovinsi tapi tanggung jawab pabriknya dimana? nah ini ada hubungan dengan pertanyaan Bu Kiki tadi tentang kebijakan sentralisasi; apakah sentralisasi ini malah menguntungkan atau tidak? bagaimana menguntungkan dalam arti bagi petani, jangan sampai gara-gara sentralisasi kemudian stok petani itu bermasalah di tingkat subsidi.

Tahun 2020, tahun 2015 sampai 2020 terjadi kelangkaan pupuk. Tadi Pak Sutrisno tadi mengatakan dan Pak Slamet itu sudah ada terjadi kelangkaan, itu belum sentralisasi; apakah dengan sentralisasi ini kemudian malah memperbaiki pola stok yang ada di lapangan atau sebaliknya? nah ini yang kemudian kita minta kajiannya, nanti di Raker ataupun pada saat Panja Pupuk kita akan perdalam untuk itu.

Saya minta izin Ketua kita dalamkan, tolong siapkan Pak Dirut; bagaimana pola distribusi yang benar? lalu kemudian memastikan bahwa ketersediaan pupuk subsidi itu benar-benar ada di lapangan, saya tidak mau kemudian hanya menyalahkan satu sisi. Sama seperti tadi saya bilang efisiensi 5%, oke kontribusi efisiensi 5% itu saya setuju apa namanya itu sumbang sih dari PIHC berdasarkan audit. Saya agak ragu apakah bisa lebih dari itu? sehingga kemudian ketika terjadi efisiensi kita menaikkan stok, menaikkan stok untuk subsidi, nah ini nanti kita pelajari sama-sama pak.

Jadi saya minta tolong agar pola distribusi, distribusinya seperti apa? kemudian nanti SK koneksitas dengan SK Gubernur dan Bupati itu seperti apa? apakah betul hambatannya ada disitu? saya agak ragu kalau kemudian problemnya ada hanya pada anggaran tapi pada efektivitas distribusi, pada efisiensi produksi, ini yang kita lihat. Saya minta ini pendalaman, BPK kita undang, kita coba lihat benar nggak kajian itu? itu Pak Ketua terima kasih.

F-PKB (LULUK NURHAMIDAH, M.Si.):

Izin Ketua.

Menambahkan sedikit dari Pak Ichsan.

KETUA RAPAT:

Iya.

F-PKB (LULUK NURHAMIDAH, M.Si.):

Iya.

Bapak menyusul dari pertanyaan Pak Ichsan tadi, mungkin saya juga butuh untuk dilengkapi data stok yang ada di gudang pak, mungkin di seluruh Indonesia. Jadi kalau misalkan tadi kan hanya bilang angka Jawa Timur, Jawa Tengah, Provinsi, nah ini kita juga pengen lihat sebenarnya di masing-masing gudang itu stoknya itu ada berapa? itu penting, terus kemudian yang kedua terkait dengan data SK, mungkin itu bisa diverifikasi. Jadi SK Pengajuan dan SK Penyaluran kalau dibilang 44% itu mungkin itu provinsi mana atau kabupaten mana yang kurang karena ini saya kira kita punya semua, semua punya kepentingan juga jangan-jangan ini dapil kami yang ternyata nggak mengeluarkan SK atau kemudian yang di anggap belum tapi sebenarnya sudah. Nah kita ini juga untul cek & ricek saja, terima kasih.

KETUA RAPAT:

Data yang dimaksud ini sudah ada, cuman bukan stok gudang. Datanya sudah ada, contohnya Lampung 15 Kabupaten, sudah ada SK nya, cuman kalau misalnya di Jawa Tengah; berapa kabupaten yang ada, yang belum ada? itu secara detil belum diberikan. Jadi tolong kalau bisa besok segera diberikan kepada Sekretariat Komisi IV. Jadi masing-masing mungkin, Pak Slamet dapilnya Sukabumi paling tidak kan bisa negur Kepala Dinasnya; Pak Kadis kenapa ini belum dibuatkan SK nya? masing-masing kan begitu, iya?

Silakan siapa lagi kalau sudah itu, ibu akan menjelaskan.

F-PKS (drh. H. SLAMET):

Izin Pimpinan terkait dengan pupuk.

KETUA RAPAT:

Iya, pupuk lagi, balik lagi.

F-PKS (drh. H. SLAMET):

Barangkali, menyambung dan penguatan. Saya jadi juga ragu-ragu dengan penguatan dengan disampaikan oleh Pak Ichsan bahwa jangan-jangan memang pupuknya barangnya tidak ada. Nah ada nggak kaitanya dengan piutang yang besar, kita khawatir karena kan ini perusahaan di utangi sekian triliun,

KETUA RAPAT:

Tetap hidup.

F-PKS (drh. H. SLAMET):

Nah itu maksud saya begitu pak.

Nah ini, nah ini mungkin apalagi mohon maaf kalau Pak Sarwo Edhi masih inget pernah menjawab itu ada teorinya, mungkin sebagian ada yang ingat. Saya duduk di situ, jadi itu ada teorinya untuk bisa jalan, nah mungkin perlu di buka juga pak kalau nggak sekarang mungkin lanjutan tambahan data Pak Ichsan.

Terima kasih pak.

KETUA RAPAT:

Nanti kita buka pada waktu Panja, ya?jadi nanti kesimpulan Panja apa, ya kita serahkan, harus ada transparansi.

Silakan bu.

**ASISTEN DEPUTI II BIDANG KOORDINASI PANGAN DAN AGRIBISNIS
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN:**

Terima kasih.

Saya tidak banyak mungkin pak, hanya ingin mengulangi lagi bahwa pada dasarnya seperti keterangan dari Pak Sarwo tadi bahwa kenaikan HET ini adalah untuk menaikkan volume dari pupuk bersubsidi, kemudian pada saat Rakortas Menteri Keuangan kemudian menyarankan agar kemudian diberikan kompensasi kepada petani yang terdampak karena kenaikan HET ini pak. Jadi kemudian tadi sudah saya jabarkan, mungkin tadi saya ngomongnya terlalu cepat ya? kami sudah mengadakan Rakornis dan saya sudah mengkoordinasikan antara Kementerian Pertanian dan Kementerian Sosial dan Kementerian Desa untuk kemudian nanti mereka sebagai tindak lanjut dari apa Rakortas tadi mereka harus berkoordinasi untuk bagaimana kompensasi dari kenaikan HET tadi, kira-kira seperti itu sih pak.

KETUA RAPAT:

HET nya modelnya seperti apa bu kalau boleh saya tahu?

**ASISTEN DEPUTI II BIDANG KOORDINASI PANGAN DAN AGRIBISNIS
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN:**

Nah itu tadi lah yang kemudian menurut saya tidak akan semudah itu gitu karena masing-masing petani akan mendapatkan kompensasi yang berbeda-beda kan pak? karena berdasarkan dari jumlah dari, dari, dari luasan tanah tadi. Cuma dari diskusi awal kemarin kami yang paling memungkinkan adalah melalui Bansos dari Kementerian Sosial karena selama ini Kementerian Sosial juga pernah menambahkan Bansos untuk kompensasi dari subsidi energi dari Kementerian ESDM, mereka sudah terbiasa seperti itu. Nah selanjutnya nanti Kementerian Pertanian akan berkoordinasi dengan Kementerian Sosial seharusnya,. Itu Rakornisnya baru kita laksanakan pak hari Kamis kemarin.

KETUA RAPAT:

Tapi ibu tolong disampaikan juga yang dapat ini nanti petani penggarap atau petani pemilik? harus jelas ini bu, jangan nanti pemilik dapat, penggarap dapat.

**ASISTEN DEPUTI II BIDANG KOORDINASI PANGAN DAN AGRIBISNIS
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN:**

Satu hal lagi kemungkinan kalau menurut saya yang datanya ada di e-RDCK, jadi nanti kita akan balik ke basic lagi pak bagaimana data tersebut kemudian harus dikumpulkan. Kebetulan....masih baru didalam Pokja pupuk kemarin kami sudah mengadakan FGD, saya juga sudah berusaha untuk menginventarisir permasalahan-permasalahan padi dan sesuai tadi masukan dari dewan, kami akan berusaha untuk membuat timeline nya, untuk penyesuaian masalah tadi. Masalahnya *complicated* sehingga mungkin *roadmap* yang pernah di putuskan oleh Pokja yaitu 65% implementasi Kartu Tani di Jawa dan Madura itu, itu juga harus dievaluasi lagi karena pada kenyataannya realisasinya hanya sekitar 12% dan itulah yang kemudian nanti saya akan berusaha untuk membuat, membuat matriksnya dan membuat timeline untuk penyelesaian satu-satu permasalahan ini tadi pak.

Di dalam paparan saya sebenarnya ada dan saya sudah mengelompokkan permasalahan-permasalahan tadi dan sebenarnya kalau menurut saya dari kenaikan HET tadi mungkin dampaknya tidak akan besar sekali kalau saja ternyata kelangkaan pupuk ini tidak ada gitu, kenyataannya pupuk ini langka sekarang sehingga kemudian saya bertanya juga tentang *supply* dan *demand* dari pupuk kita, mungkin nanti kalau ada Raker bisa dieksploitasi lagi pak. Sebenarnya kebutuhan pupuk nasional kita berapa sih? produksi nasional kita berapa sih? kalau kita boleh mengacu kepada data e-RDCK yang kebutuhannya sekarang ini 26 juta ton dan kapasitas produksi

dari PIHC yang hanya 13 juta ton, sampai kapanpun gap ini selalu ada pak, jadi akan selalu ada kelangkaan dan ini akan terus menjadi permainan yang saya bilang tadi bisa memang langka atau dilangkakan.

Jadi data ini, itu sepertinya memang harus kita cari, kita benar-benar sama tahu kalau kebutuhan pupuk nasional kita itu memang segini gitu terlepas dari apakah itu subsidi atau tidak subsidi? karena di lapangan petani "mungkin nggak papa nggak ada pupuk subsidi asal pupuknya ada. Kemudian Pemerintah bisa support dari KUR selama mereka mendapat pinjaman modal usaha, mereka akan tetap bisa melakukan kegiatan usaha pertanian, kira-kira itu sih pak.

KETUA RAPAT:

Sudah bu?

**ASISTEN DEPUTI II BIDANG KOORDINASI PANGAN DAN AGRIBISNIS
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN:**

Sepertinya itu saja, mudah-mudahan menjawab pertanyaan yang ada. Pokja pupuk masih ada, kita akan segera bekerja ini pak mulai tahun ini untuk itu tadi kami sudah mengimplementasikan permasalahan. Mudah-mudahan permasalahan yang diutarakan bisa satu persatu, bisa kita urai. Terima kasih pak.

KETUA RAPAT:

Kalau Pokja pupuk, kalau ada waktu tolong kami diajak diskusi, kita mencari solusi.

F-PG (Ir. ICHSAN FIRDAUS):

Pak Ketua boleh saya pendalaman Ibu Asdep?

KETUA RAPAT:

Sebentar.

Tadi dikatakan produksi 13 juta ton, kebutuhan 26 juta ton, kan begitukan bu?

**ASISTEN DEPUTI II BIDANG KOORDINASI PANGAN DAN AGRIBISNIS
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN:**

Iya, data e-RDKK 26 juta ton...kebutuhan.

KETUA RAPAT:

Produksi PIHC cuman 13 juta ton.

**ASISTEN DEPUTI II BIDANG KOORDINASI PANGAN DAN AGRIBISNIS
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN:**

Itu diutarakan di, iya.

KETUA RAPAT:

Iya itu sama saja tetangga saya nih, di kampung punya pohon pisang berbuah, pisangnya dijual ke pasar duitnya di beliin pisang goreng sama dia, dibawa pulang, dimakan di rumah. Sama juga orang Pabrik Pupuk masih ekspor kok, itu aja.

Silakan.

F-PG (Ir. ICHSAN FIRDAUS):

Bu Ismi saya, sebelah sini bu. Saya ingin inikan ada Pokja Pupuk ya? kita di Komisi IV ini pernah berdiskusi terkait dengan di Panja ini apa namanya perubahan pola subsidi yang sebenarnya sudah hampir lebih dari 15 tahun kita sudah berpikir subsidi input menjadi subsidi output misalnya begitu. Nah ini sama persis ketika kita bicara terkait dengan bantuan pangan non tunai, ketika itu kita sudah puluhan tahun Raskin lalu kemudian berubah menjadi Bantuan Pangan Non Tunai yang kemudian korbannya adalah Bulog. Sejujurnya saya mengatakan ini korbannya Bulog, apakah Bulog korban karena kebijakan atau karena tidak efisien terkait dengan kinerja Bulog itu sendiri, ini kan kita debat table. Nah kalau kemudian menurut Bu Ismi kalau kita merubah pola subsidi dari subsidi input menjadi subsidi output yang sudah kita yang sedang kita lakukan, menurut, menurut kajian di Deputi Menko Ekonomi kira-kira apa hambatan perubahan subsidi input menjadi subsidi output? walaupun dari sisi anggaran memang besar kalau subsidi output, saya percaya tapi kalau kemudian 30 T, 33 T kita alihkan kesubsidi output misalnya, apa yang bisa kita tunjang dalam konteks itu?gitu Ketua.

**ASISTEN DEPUTI II BIDANG KOORDINASI PANGAN DAN AGRIBISNIS
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN:**

Basic, memang ada Pokja Pupuk sebelum ini, itu sudah, sudah membuat *roadmap* untuk membuat transformasi subsidi pupuk dan kalau kita mau subsidi output itu memang anggaran kita tidak akan bisa.

Kemudian pada saat kita bicara subsidi, ujung-ujungnya tuh semua itu basisnya adalah ke data sehingga kemudian Pokja sebelum ini berkesimpulan bahwa yang kemudian lebih realistis adalah subsidi pupuk langsung ataupun subsidi langsung pupuk.

Nah pada saat bicara subsidi langsung pupuk ini sebenarnya sudah ada *timeline* nya sejak dari tahun 2016 sampai 2019 di mana HET tadi harusnya. Jadi saat ini kalau kita lihat komposisi dari HET, kalau kita lihat komposisi fiscal kita dari apa? dari besarnya subsidi kita secara, secara

rupiah itu naik sampai 42 kali lipat tapi secara jumlah pupuk hanya 1,8. Jadi memang harga pupuk ini naik, ya mungkin karena itu tadi terjawab karena ada harga gas yang tiba-tiba kemarin ini naik tetapi sekarang sejak akhir tahun lalu sudah turun lagi menjadi 6, menjadi 6 dollar. Jadi untuk, untuk supaya subsidi langsung pupuk tadi berlangsung dengan, dengan mulus. Pertama, itu harus datanya memang harus benar, datanya harus, harus, harus valid.

Subsidi bisa dikurangi dengan menaikkan HET sehingga kalau berdasarkan strategi dari Pokja Pupuk yang lalu di tahun 2019 itu seharusnya HET itu harganya hanya beda 10 sampai 20% dibandingkan harga pupuk normal, dengan begitu diharapkan karena disparitas harganya tidak terlalu banyak sehingga tidak ada permainan, jadi negara juga tidak terlalu banyak mengeluarkan uang subsidi dan diharapkan juga pupuk jadi tidak langka karena tidak bisa dimainkan lagi, karena perbedaan harganya ini sedikit. Nah permasalahan kemudian ada di data tadi pak karena itulah kemudian keluar ide Kartu Tani.

Jadi saya melihat dengan sekarang ini kita menaikkan HET, ini sebenarnya satu langkah yang cukup strategis. Kita naikin pelan-pelan, mengurangi subsidi juga untuk mengurangi ketergantungan petani terhadap subsidi karena ternyata kan permasalahan di lapangan adalah kelangkaan pupuk bukan karena naiknya harga-harga pupuk tadi gitu. Kalau ternyata pupuk ini tidak langka, saya rasa kenaikan pupuk itu kan seperti kalkulasi. Saya yang, iya sebenarnya itu tadikan sudah diprotes harusnya tidak begitu hitung-hitungannya, iya perhektar itu hanya 240.000 pak. Jadi sebenarnya permasalahan yang kemudian kita harus selesaikan adalah kelangkaan pupuk tadi, memang kenapa ini selalu berulang? mudah-mudahan kedepannya kita bersama-sama bisa untuk menyelesaikan berkoordinasi untuk supaya kelangkaan ini tidak, tidak berulang lagi, berulang lagi.

F-PG (Ir. ICHSAN FIRDAUS):

Iya Pak Ketua terakhir.

Jadi nanti Poka Pupuk saya pikir nanti pada saat Panja Pupuk, kita bisa komunikasi dengan Pokja Pupuk Pak Ketua, yang kedua adalah yang saya ingin sampaikan adalah bahwa persoalan subsidi ini tidak hanya pada persoalan, bukan hanya pada persoalan apa namanya distribusi dan persoalan apa namanya *supply chain*. Dalam pemahaman saya adalah tetapi memang kelangkaan pupuk ini bisa jadi karena persoalannya adalah judul inefisiensi yang ada di situ, bukan inefisiensi pada hanya biaya produksi, inefisiensi pada biaya distribusi juga sebenarnya.

Nah maksud saya di kantor Menko Ibu, di Pokja Pupuk saya berharap itu ada keluar rekomendasi bu atau ada kebijakan tertentu yang kemudian berpikir untuk merubah pola subsidi kita ini. Kita ini udah teriak 15 tahun pak, 20 tahun kita udah teriak, Teman-teman Komisi IV sudah menyampaikan kita coba berpikir merubah pola subsidi tapi itu hanya sebatas diskusi bu tetapi

kemudian kita perlu *action*. Nah pertanyaan saya adalah dalam konteks saya, dalam pikiran saya, apakah dengan ketika berubah Raskin menjadi ... itu korbannya adalah "korbannya adalah Bulog", apakah kemudian pola subsidi yang merubah ini, apakah korbannya PIHC? saya tidak tahu karena PIHC tidak melakukan efisiensi misalnya. Inikan kita punya *challenge* bu, kita punya challenge tapi kemudian Kantor Menko Ekonomi menurut saya perlu ada terobosan agar pola subsidi ini kita rubah dengan pola yang lebih baik tetapi dengan catatan PIHC nya jangan menjadi korban tapi kalau PIHC nya tidak melakukan efisiensi ditingkat produksi maupun distribusi, iya siap-siap korban kedua setelah Bulog dalam konteks bagaimana kita mengelola pangan nasional. Itu saja terima kasih.

**ASISTEN DEPUTI II BIDANG KOORDINASI PANGAN DAN AGRIBISNIS
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN:**

Iya pak kami akan berkoordinasi dengan semua pihak, besok juga saya akan berdiskusi dengan PIHC. Saya juga akan sama sih, saya juga apa? saya juga dengan kata-kata efisiensi tadi; apakah waktu Rakornis kemarin saya juga sudah men challenge PIHC untuk, menurut saya 5% itu terlalu kecil, harusnya efisiensinya bisa lebih besar lagi dengan harga pupuk yang lumayan turunnya besar dan 70% bahan baku dari, dari, dari pupuk ini kan memang gas begitu ya. Demikian terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Terakhir Himbara. Saya minta komitmen atau paling tiga, paling tidak di pertanyaan Pak Slamet tadi kira-kira Kartu Tani ini akan selesai kapan? Bapak jangan bicara seperti KKP, 2 bulan selesai, jangan bicara seperti Menteri nya bapak itu tuh, kelangkaan kedelai 200 hari selesai. Iya kalau selesainya impor nggak usah ngomong, iya pak? silakan Bapak boleh bilang *insya Allah* nanti 2024 enggak apa-apa pak karena saya lebih baik bapak jujur, karena apa? ini bukan *domain* bapak sendiri loh pak karena ini menyangkut apa? Kementerian lain pak; Infokom misalnya; signalnya wi-fi-nya, kan bukan dibapakkan? bapak inikan cuman nyetak kartu, EDC dan kios.

Itu aja silakan.

**DIREKTUR BISNIS MIKRO BANK BRI/KOORDINATOR BIDANG
PENGEMBANGAN BISNIS MIKRO HIMBARA (SUPARI):**

Makasih Pak Ketua.

Izin bapak, ibu sekalian. Pertama-tama kami menyampaikan terima kasih atas banyak masukan terkait dengan implementasi Kartu Tani mulai dari keterjangkauan, menyelesaikan masalah-masalah basic tani, pin lupa dan seterusnya itu tentunya menjadi ruang perbaikan kami. Berikutnya bapak, izin bahwa sekali lagi ada wilayah yang bagus nanti ini akan kami jadikan

bensmart gitu ya. Kenapa sih di Batang bagus 100%? Kenapa sih jadi Jawa Tengah sudah 50% untuk ukuran provinsi sudah sangat bagus dalam waktu 3 bulan ini? itu nanti akan menjadikan bahan perbandingan kami, yang tentunya nanti akan dikoordinasikan oleh pihak-pihak terkait lebih khusus di *leading* sektor masalah subsidi ini. Kami belum bisa menyampaikan konkritnya seperti apa Pak Ketua karena sekali lagi kami hanya bagian digilir dari mulai kami mencetak kartu nggak ada masalah karena kami punya kapasitas, membagi juga jika ada intervensi dari seluruh Kepala Dinas Kabupaten Kota, kami bisa bagi karena kami punya 28.000 mantri Pak Ketua yang sekarang sudah ada rata-rata di 2 Desa.

Nah ini kita bisa memanfaatkan termasuk tambahan 1.000 sekian gitu ya, pendamping- pendamping Bansos yang tentunya bisa kami berikan pembelajaran untuk melakukan penetrasi dalam rangka pembagian ini. Kemudian literasi ini juga menjadi masalah tentunya ini juga bukan domain kami sendiri terkait dengan teman-teman di PIHC, Kementan dan para-para penyuluh ini perlu dikolaborasikan.

Bapak, Ibu sekalian.

Yang jelas infrastruktur Himbara itu sesungguhnya bisa untuk mengakselerasi kegiatan apa implementasi Kartu Tani ini hanya kami sekali lagi di bagian hilir dan kami sangat bergantung dengan *policy*, kebijakan di *leading* sektornya. Sebagai tambahan bapak, beberapa waktu yang lalu kami ditunjuk untuk menyalurkan Banres Produktif, program, yang sangat hetik gitu ya karena waktunya singkat. Kami berhasil dengan Mandiri itu 12 juta, ini artinya bahwa kami punya infrastruktur yang cukup untuk mendukung ini semua bapak. Berikutnya bapak desain dari Kartu Tani itu sudah sangat fleksibel, dalamnya sudah ada wallet, wallet yang sekarang isinya baru data bapak, data kuota. Petani Supari ini kira-kira dapat kuota Pupuk Urea berapa? SP3 berapa? itu ada di situ.

Nah wallet itu bapak, sekiranya nanti memang ada *policy* perubahan subsidi menjadi seperti tunai gitu ya Bansos, itu kami tinggal men switch saja, kira-kira seperti itu gambarannya.

Bapak, Ibu sekalian.

Terakhir ini bahwa bagi kami Himbara, konsep Kartu Tani itu ada di diletakkan di tabungan bapak karena kami punya kepentingan untuk membantu Pemerintah dalam rangka inklusi keuangan sehingga sesungguhnya Kartu Tani ini tidak hanya sekedar *tools* atau alat untuk membantu mengadministrasikan secara gitu, terkait dengan reporting kemudian juga hal lain berkaitan dengan penyaluran subsidi tetapi juga di situ sebagai kartu tabungan.

Nah tadi udah disampaikan juga dengan Anggota bahwa mohon maaf bapak ini juga terkait dengan penyaluran KUR karena KUR itu harus kami mitigasi supaya risikonya bagus artinya kalau dapat KUR 10 juta nanti

diberikan pupuk berapa? untuk menggarap berapa? untuk biaya hidup berapa? nanti ada wallet-wallet juga di Kartu Tani itu termasuk jika tadi Pak Ketua menyampaikan harus ada uangnya, salah satunya Pak Ketua uangnya nanti dari pencairan KUR. Demikian Pak Ketua.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Seharusnya kalau memang negara sudah canggih dan tidak ada penyimpangan, E-KTP itu kan bisa jadi seperti itu pak, tinggal di *inject* saja. Anda profesinya apa? oh petani, oke *inject* e-Kartu Tani kan harusnya demikian, gitu.

Terima kasih kepada Dirjen, Deputi.

F-PKS (drh. H. SLAMET):

Pimpinan intrupsi sebentar Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Iya.

F-PKS (drh. H. SLAMET):

Mempertegas apa yang saya sampaikan pertanyaan tadi yang belum dijawab supaya nanti menjadi PR. *Timeline*, tadi juga belum untuk pertemuan berikutnya.

Kemudian juga langkah-langkah real yang akan dilakukan petani untuk kemudian kita merubah perilaku pemupukan petani karena kita juga sering ketemu petani; dia melakukan pemupukan yang penting hijau dan seperti itu.

Langkah-langkah real dan yang terakhir pertanyaan saya yang di awal yang belum terjawab itu adalah subsidinya berbeda. Saya ambil tadi datang terkait dengan Pemerintahan sebelumnya itu subsidi nya 70,18 triliun, produksinya sekitar 70,8 juta ton. Sementara di 2015 39,5 triliun itu produksinya 75,4 juta ton, Penyebabnya apa? analisisnya apa? nanti mohon dijelaskan.

Itu saja Pimpinan, terima kasih.

KETUA RAPAT:

Itu mungkin nanti yang menjawab PSP apa Tanaman Pangan pada Rapat Kerja berikutnya tolong dijawab. Jangan subsidinya naik tapi produksi tetap, iya?

Terima kasih kepada Dirjen, Deputi, Dirut PT Pupuk Indonesia dan Ketua Himbara yang telah menyampaikan jawabannya.

Bapak Ibu yang kami hormati.

Dari dialog diskusi saran dan masukan Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia sebelum acara ini kami akhiri, akan kami bacakan kesimpulan rapat pada hari ini.

Silakan Pak Budi.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI/F-GERINDRA (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Terima kasih Pak Ketua.

Izin kami membacakan kesimpulan keputusan rapat pada sore hari ini :

1. Komisi IV DPR RI menerima penjelasan yang disampaikan oleh Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian bahwa penebusan pupuk bersubsidi dapat dilakukan secara manual dengan memperlihatkan KTP bagi petani yang sudah terdaftar di e-RDKK namun belum mendapatkan Kartu Tani.

Anggota?

Pak Dirjen?

DIRJEN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN:

Setuju.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI/F-GERINDRA (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

(RAPAT : SETUJU)

2. Komisi IV DPR RI mendukung kebijakan kenaikan harga eceran tertinggi atau HET dengan syarat tidak terjadi penyimpangan HET, ketersediaan pupuk bersubsidi mencukupi, mudah diakses oleh petani, penyaluran pupuk bersubsidi sesuai dengan prinsip 6 tepat; dengan peningkatan pengawasan secara lebih efektif.

Anggota Komisi IV?

Mbak Luluk nggak ada?

F-PKB (LULUK NURHAMIDAH, M.Si.):

Karena poin 2 itu ada tertulis kalimat dengan syarat, nah inikan berarti perlu ada konsekuensi apabila syarat itu tidak terpenuhi misalnya masih terjadi kelangkaan pupuk, itu seperti apa? terima kasih.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI/F-GERINDRA (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Pak Dirjen mungkin ada pendapat Pak Dirjen mengenai konsep Nomor 2 bagaimana? apakah bisa disetujui?

F-PKS (drh. H. SLAMET):

Sekaligus tambahan usulan Pimpinan.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI/F-GERINDRA (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Sebentar, sebentar pak.

F-PKS (drh. H. SLAMET):

Iya masih menyangkut Nomor 2.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI/F-GERINDRA (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Silakan.

F-PKS (drh. H. SLAMET):

Iya terkait dengan peningkatan pengawasan secara lebih efektif itu perlu didefinisikan, siapa yang akan melakukan pengawasan? karena Komisi apa yang dibentuk di daerah itu tidak jalan, yang dari.

KETUA RAPAT:

Tambahannya nanti di bawah Pak Slamet.

F-PKS (drh. H. SLAMET):

Oke terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Termasuk *holding* juga harus bertanggung jawab.

F-PKS (drh. H. SLAMET):

Terima kasih Pimpinan.

DIRJEN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN:

Izin Pak Ketua.

Iya kalau syaratnya diganti tujuan, jadi dengan tujuan tidak terjadi penyimpangan HET dan seterusnya gitu.

Jadi kalau syarat itu sepertinya malah mengikat dan kalau syarat berarti ada sanksi tapi kalau di situ dihaluskan menjadi tujuan, dengan tujuan tidak terjadi penyimpangan HET dan seterusnya.

KETUA RAPAT:

Gini loh Pak Dirjen, kalau syarat itu tidak terpenuhi ya kita tidak mendukung Tujuannya kan begitu, bukan kita nakut-nakutin, gitu loh. Kita mendukung tapi dengan syarat tidak terjadi penyimpangan, kalau terjadi penyimpangan ya kita enggak dukung itu aja.

DIRJEN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN:

Setuju pak.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI/F-GERINDRA (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

(RAPAT : SETUJU)

3. Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah untuk mengkaji ulang perhitungan harga pokok produksi (HPP) pupuk bersubsidi agar benar-benar efisien dan tidak ada penyimpangan mulai pengadaan bahan baku hingga biaya distribusi kepada petani.

Komisi IV ?

F-PG (Ir. ICHSAN FIRDAUS):

Ketua.

Point 3, catatan saya hanya 1 saja bahwa kemudian saya setuju dengan kalimat ini tetapi tadi Pak Dirjen PSP mengatakan bahwa ada lebih dari 100 item efisiensi yang disampaikan, katanya begitu.

DIRJEN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN:

Izin Pak.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI/F-GERINDRA (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Silakan Pak.

DIRJEN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN:

Ada lebih kurang 100 item gitu ya, hanya yang diefisiensikan saya tidak hafal karena itu memang hasil audit BPK pak.

F-PG (Ir. ICHSAN FIRDAUS):

Nah maksud saya hasil item itu nanti saya minta kajian itu, itu disampaikan selambat-lambatnya sebelum Rapat Kerja dengan Menteri Pertanian di poin 3 ini, tapi artinya begini mengkaji-ulang, okelah itu audit BPK saya setuju karena BPK punya otoritas untuk itu, tapi hasil itu tolong sampaikan kekami pak, audit BPK itu atau ada kajian yang lain diantara Bapak, Bapak Ibu yang ada di depan ini, siapa tahu kemudian efisiensinya tidak hanya 5%. Tadi Bu Asdep mengatakan saya juga ragu.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI/F-GERINDRA (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Pak Dirjen apakah hitung-hitungannya sudah ada? kajian sudah ada?

F-PG (Ir. ICHSAN FIRDAUS):

100 item lebih kata Pak Sarwo tadi mengatakan.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI/F-GERINDRA (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Yang hasil dari BPK pak.

F-PG (Ir. ICHSAN FIRDAUS):

Artinya kasih ke kita tapi selambat-lambatnya.

DIRJEN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN:

Tapi yang dikaji pak, yang dikaji lebih kurang.

F-PG (Ir. ICHSAN FIRDAUS):

Selambat-lambatnya iya pak saya ngerti tapi diserahkan kajian, hasil kajian efisiensi itu hasil audit BPK disampaikan Komisi IV Sebelum Rapat Kerja dengan Menteri Pertanian. Saya minta itu datanya itu pak.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI/F-GERINDRA (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Bisa ditambahkan?

F-PG (Ir. ICHSAN FIRDAUS):

Atau begini aja masuk kesimpulan boleh nggak itu? tapi komitmennya adalah sebelum Raker tolong diberikan kepada Komisi IV hasil kajian itu.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI/F-GERINDRA (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Pak Dirjen bisa disampaikan ya sebelum Raker minggu depan.

F-PG (Ir. ICHSAN FIRDAUS):

Mungkin Bu Astrid juga punya hasil kajian lain di luar BPK boleh juga dikasih ke kami biar kami pada saat Raker dengan Menteri Pertanian kita ingin tahu berapa sebenarnya efisiensi produk yang ideal.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI/F-GERINDRA (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Sudah ada, ada Pak Ichsan.

F-PG (Ir. ICHSAN FIRDAUS):

Ada?

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI/F-GERINDRA (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Ada.

F-PG (Ir. ICHSAN FIRDAUS):

Sudah ada datanya?

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI/F-GERINDRA (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Iya maksudnya semua permintaan ini; data dan kelengkapan diminta sebelum Rapat Kerja.

F-PG (Ir. ICHSAN FIRDAUS):

Oh iya sudah. Oke, iya oke.

Saya catatan itu saja.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI/F-GERINDRA (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Anggota bisa disetujui?

F-PDIP (YOHANIS FRANSISKUS LEMA, S.IP., M.Si.):

Pak Budi.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI/F-GERINDRA (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Pak Fransiskus Lema.

F-PDIP (YOHANIS FRANSISKUS LEMA, S.IP., M.Si.):

Iya, tadi kan saya, saya ingat betul, saya ngomong tadi sudah dijawab bahwa sudah diaudit oleh BPK. saya menyangsikan BPK itu memiliki kompetensi teknis menyangkut produksi pupuk ini. Dengan demikian saya tadi kan sejak awal mengusulkan pelibatan *engineer* yang memang memahami persoalan soal ini untuk melakukan audit teknikal sehingga kita mendapatkan penjelasan yang kita harapkan menyangkut efisiensi ini pak.

F-PDIP (Ir. MINDO SIANIPAR):

Saudara Ketua.

Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Iya.

F-PDIP (Ir. MINDO SIANIPAR):

Menurut undang-undang BPK lah yang melakukan itu sama dengan apapun hasil BPS, itulah Undang-undang yang harus kita ikuti. Kau percaya tidak percaya itulah Undang-undang, kalau ada kecurigaan terhadap audit BPK, maka DPR bisa meminta BPK untuk audit investigasi tapi sudah ada tanda-tandanya itu. Oke kalau belum ada tanda-tanda dari kita untuk audit investigasi, jangan kita buat usulan-usulan seperti itu. Oke Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Maka tadi saya katakan, kami minta, minta daftar untuk membuat 1 ton pupuk membutuhkan apa saja komponennya? berapa uangnya? itu saja yang saya minta dulu karena BPK kan lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah

untuk mengawasi pembukuan, keuangan serta lain-lain. Jadi yang saya minta itu biaya produksi bahan baku, apa saja bahan bakunya? termasuk nanti Bapak, Bapak kalau sudah nggak ada Corona termasuk jalan-jalan ke luar negeri dengan alasan apa, apa, apa itu hak bapak-bapak semua.

F-PKS (drh. H. SLAMET):

Usul tambah redaksional berarti gitu Pimpinan?

KETUA RAPAT:

Nomor 2, Nomor 3 sekarang pak.

F-PKS (drh. H. SLAMET):

Kan masih HPP Pimpinan?

KETUA RAPAT:

Nomor 3 itu pak.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI/F-GERINDRA (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Sekarang Nomor 3 Pak Slamet.

F-PKS (drh. H. SLAMET) :

Oh iya maksud saya tadi menambahkan dengan apa yang diminta oleh Anggota secara umum disuarakan oleh itu dengan menyertakan data-data hasil BPK, itu maksudnya dinomor dua itu.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI/F-GERINDRA (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Pak Slamet ini nanti di point 10, dibelakang ada yang dirangkumkan semua permintaan Komisi IV, terima kasih.

Komisi IV point 3 bisa disetujui? setuju? Pak Dirjen?

(RAPAT: SETUJU)

4. Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah bersinergi dengan lembaga sosial masyarakat (LSM) bidang pertanian untuk meningkatkan pengawasan, penyaluran pupuk bersubsidi oleh PT Pupuk Indonesia *Holding Company* (PIHC) yang didukung dengan penegakan hukum yang diberlakukan baik kepada PIHC sebagai pelaksana maupun mitra distributornya.

F-PDIP (Ir. MINDO SIANIPAR):

Ketua.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI/F-GERINDRA (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Komisi IV?

Pak Mindo silakan pak.

F-PDIP (Ir. MINDO SIANIPAR):

Jadi yang musim sekarang ini datang ke Pemerintah, wartawan. Akhirnya diketahui wartawan sampai surat kabar, terakhir berubah trend ini kami dari LSM ini. Jangan kita tambah-tambah persoalan kita, ndak boleh ada kata-kata LSM disitu, berubah bahasanya tidak perlu pakai LSM-LSM itu.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI/F-GERINDRA (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Kalau begitu LSM nya mungkin bisa kita hilangkan?
Bersinergi dengan masyarakat saja gimana?

F-PDIP (YOHANIS FRANSISKUS LEMA, S.IP., M.Si.):

Stakeholder terkait.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI/F-GERINDRA (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Saya rasa masyarakat aja, semua orang juga bisa ikut mengawasi.

Saya ulangi Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah bersinergi dengan masyarakat untuk meningkatkan pengawasan, penyaluran pupuk bersubsidi oleh PT Pupuk Indonesia *Holding Company* (PIHC) yang didukung dengan penegakan hukum yang diberlakukan baik kepada PIHC sebagai pelaksanaan maupun mitra distributornya.

F-PG (Ir. ICHSAN FIRDAUS):

Ketua.

F-PAN (HAERUDIN, S.Ag, M.H.):

Pimpinan.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI/F-GERINDRA (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Pak Ichsan dulu pak.

F-PG (Ir. ICHSAN FIRDAUS):

Iya, Ketua begini di point 4 sebenarnya maksudnya adalah agar ada pelibatan masyarakat dalam mengawasi penyaluran pupuk subsidi tapi dengan kalimat masyarakat rasanya terlalu umum, apa harus jelas kan katanya kalau tidak salah ada pengawas pupuk kalau misalnya itu apa namanya KP3. KP3 itu, itu kan sebenarnya adalah representasi dari para stakeholder, sebenarnya.

Nah ini sebenarnya konteks adalah bagaimana penguatan posisi KP3 sebenarnya, nah artinya diberikan kewenangan KP3 ini untuk melakukan apa? apakah tindakan atau apa begitu maksud saya di point 4 ini? nah kalau memang KP3 ini, melalui KP3 misalnya tapi diberikan kewenangan lebih misalnya untuk kemudian meluruskan jika terjadi ada penyimpangan di lapangan. Tindakan itu tanpa kemudian melangkahi penegakan hukum tetapi ada konteks apa begitu maksud saya? itu yang mungkin maksudnya di point 4 itu. Itu Ketua terima kasih.

KETUA RAPAT:

Jadi gini Pak Ichsan, KP3 mau di tingkatin gimana pun gak ada gunanya kalau enggak ada duitnya. Operasionalnya dari mana? mau nggak Kabupaten Provinsi mengeluarkan uang? itu saja, permasalahannya begitu dia tangkap mau diapakan? ini kan masalah juga. 2021 baru dianggarkan kan? jadi selama ini dikasih mobil, nggak dikasih kuncinya, nggak dikasih bensinnya. Kalau lo mau jalan, lo dorong sendiri itu mobil, itulah.

Yang lain ini gimana Nomor 4?

F-PAN (HAERUDIN, S.Ag, M.H.):

Pak Ketua izin.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI/F-GERINDRA (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Pak Khaerudin.

F-PAN (HAERUDIN, S.Ag, M.H.):

Memangkan kalau dihitung yang siapa pun tanpa anggaran tidak akan jalan Ketua. Saya setuju dengan pernyataan Ketua. Yang kedua saya ingin lebih fokus kepada justru aparat terkait aja sekalian toh kalau ada pelanggan tetap Polisi.

KETUA RAPAT:

Didalam KP3 ada aparat terkait bapak; ada Polisi, ada Jaksa.

F-PAN (HAERUDIN, S.Ag, M.H.):

Iya inikan maksudnya tadi.

KETUA RAPAT :

Itu loh.

F-PAN (HAERUDIN, S.Ag, M.H.):

Ini begini maksud saya itu tambah masyarakat, tambah LSM itu nambah beban.

KETUA RAPAT:

Bukan, ini tidak ada LSM kan? sudah dihapus dengan masyarakat.

F-PAN (HAERUDIN, S.Ag, M.H.):

Nggak urutan pembicaraannya. Kedua dalam posisi pengawasan itukan ada KP3 yang dianggap oleh kita, lemah, tidak berdaya karena tidak ada anggaran. Nah kalau hari ini konteksnya dalam Nomor 4 ini Pemerintah dengan siapa bersinerginya? dengan aparat terkait tidak bisa dengan yang lain.

KETUA RAPAT:

Ini tujuannya kalau masyarakat mengadu, iya menjadi tanggung jawab distributor dan PIHC, itu tujuan nya bos.

F-PAN (HAERUDIN, S.Ag, M.H.):

Iya, iya tahu.

Paham.

KETUA RAPAT:

Paham?

Iya karena KP3 juga *Holding* nggak mungkin keluarin duit, karena takut juga holding nya kalau mengeluarkan duit nanti ada temuan, gw juga yang kena, paham?

F-PKB (LULUK NURHAMIDAH, M.Si.):

Saran bahasa aja kali ya?

Misalnya begini Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah untuk melibatkan peran serta masyarakat dalam meningkatkan pengawasan dan seterusnya.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI/F-GERINDRA (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Bagus saja Mbak Luluk, saya sih nggak ada masalah. Sebenarnya intinya semangatnya sama sih dua-duanya.

Coba Mbak Luluk bisa di, tadi bisa disebutkan lagi kata-katanya?

F-PKB (LULUK NURHAMIDAH, M.Si.):

Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah untuk melibatkan peran serta masyarakat dan seterusnya, untuk meningkatkan.

Itu partisipasif sih masyarakat itukan memang punya hak.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI/F-GERINDRA (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Gimana Komisi IV?

DIREKTUR UTAMA PT PUPUK INDONESIA *HOLDING COMPANY*:

Ini apakah, boleh bicara pak?

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI/F-GERINDRA (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Pak Dirut, ini.

DIREKTUR UTAMA PT PUPUK INDONESIA *HOLDING COMPANY*:

Ini saya mempertanyakan juga nih pak, bapak kalau penegakan hukum itu kan kalau ada yang bersalah itu loh pak dan dalam hal ini bukan hanya PIHC ataupun.. kepada pihak-pihak yang bersalah saja pak?jadi kepada seluruh pihak yang melakukan pelanggaran gitu loh, siapapun.

KETUA RAPAT:

Sekarang kira-kira yang anda maksudkan siapa yang salah? paling penunjukannya yang salah, distributor, agen, kios, hanya itukan pak? coba

bapak tunjukkan siapa yang salah selain itu? atau ada yang bodong dari Poktan atau Gapoktannya? atau e-RDKN nya yang nggak bener atau gimana? coba.

DIREKTUR UTAMA PT PUPUK INDONESIA *HOLDING COMPANY*:

Kalau kami bersalah, iya pasti ini tapi maksud saya inikan maksud saya langsung ke PIHC. maksudnya kepada pihak, semua pihak yang bersalah begitu.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Coba bapak bantu redaksi gimana?

DIREKTUR UTAMA PT PUPUK INDONESIA *HOLDING COMPANY*:

Penegakan hukum yang diberlakukan pada pihak yang bersalah gitu pak, yang melakukan pelanggaran gitu. Kepada semua pihak yang melakukan pelanggaran gitu pak.

F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):

Izin Pimpinan.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI/F-GERINDRA (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Bu Kiki.

F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):

Sebenarnya pak tidak ada yang salah sama kalimat itu karena kalau yang bapak bilang kepada setiap pihak yang melakukan pelanggaran apabila ditemukan di kemudian hari itu ada pihak-pihak yang tersangkut dengan permasalahan hukum pasti akan dilakukan penegakan hukum, siapapun orangnya. Jadi kata-kata kalimat penegakan hukum itu bukan hanya menunjukkan kepada PIHC saja, iya? *Law In Postman* yang dimaksud disitu, siapa pun pihak tapi di sini disampaikan supaya PIHC nya *stay on* apa *on the track* tapi masalah penegakan hukum pasti berlaku, *equality before the law* itu berlaku buat siapapun pak. Jadi nggak usah bapak takut untuk PIHC sendiri atau apa gitu.

DIREKTUR UTAMA PT PUPUK INDONESIA *HOLDING COMPANY*:

Kalau misalnya, iya kalau boleh di general kan dong bu?iya kalau misalnya nggak ditulis lebih baik mungkin pak.

KETUA RAPAT:

Di general kan maksudnya gimana?distributor, agen, kios, pengecer, masukan.

DIREKTUR UTAMA PT PUPUK INDONESIA *HOLDING COMPANY*:

Yang ini saja pak, yang terlibat. Bukan PIHC pak, jadi semua stakeholder yang terlibat.

KETUA RAPAT:

Iya siapa saja pak saya mau tahu?

DIREKTUR UTAMA PT PUPUK INDONESIA *HOLDING COMPANY*:

Bisa saja stakeholder daripada distributor kan kita nggak tahu pak.

F-PG (Ir. ICHSAN FIRDAUS):

Pak Ketua saya izin boleh?

Pak Sarwo saya mau tanya, yang ditugaskan untuk menyalurkan pupuk subsidi itu siapa pak?

DIRJEN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN:

PIHC.

F-PG (Ir. ICHSAN FIRDAUS):

Nah kalimat penyaluran pupuk bersubsidi itu berarti memang boleh PIHC kan pak?

DIRJEN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN:

Boleh.

F-PG (Ir. ICHSAN FIRDAUS):

Betul ya?
Yang menunjuk distributor siapa pak?

DIRJEN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN:

PIHC.

F-PG (Ir. ICHSAN FIRDAUS):

PIHC, artinya semua lini dari atas sampai distributor itu tanggung jawabnya adalah PIHC kan pak? harusnya kita kalimatnya adalah meningkatkan pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi. Yang menyalurkan pupuk subsidi adalah PIHC, betul kan Pak Sarwo? betulkan? yang menunjuk distributor itu adalah PIHC kan pak? yang menunjuk kios siapa pak? distributorkan? nah distributor itu yang menunjuk adalah PIHC artinya dari hulu sampai hilir penyaluran pupuk subsidi itu adalah tanggung jawab dari PIHC, itu Undang-undang atau Kepmen pak?

Pak pakai mic boleh pak.

DIRJEN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN:

Perpres 15, 2015.

F-PG (Ir. ICHSAN FIRDAUS):

Perpres, Perpres itu .

DIRJEN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN:

2013, sorry dan permendag

F-PG (Ir. ICHSAN FIRDAUS):

Artinya meningkatkan kawasan penyaluran pupuk bersubsidi, yang menyalurkan pupuk subsidi menurut Perpres yang disampaikan oleh Pak Dirjen PSP adalah PT Pupuk Indonesia *holding company* artinya wajar kalimat itu pak bukan oleh siapapun tapi tanggung jawab itu ada disitu artinya kita melibatkan masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap penyaluran, sekali lagi pengawasan terhadap penyaluran pupuk bersubsidi. Logika di point 4 itu adalah intinya di pengawasan penyaluran pupuk subsidi bahwa kemudian nanti PIHC menuju distributor, kesalahan didistributor iya betul bahwa di kalimat selanjutnya yang didukung dengan yang diperlakukan baik kepada PIHC sebagai pelaksana maupun mitra distributornya. Artinya distributornya dengan PIHC itu adalah bagian dari *supply chain* untuk penyaluran pupuk subsidi. Gitu pak kalimat dipoint 4 ini artinya wajar kalau kalimat itu bukan kemudian PIHC kemudian kita apa namanya hanya diawasi semutlak PIHC tapi dikalimat terakhir pak mitra distributornya karena menurut Perpres itu tugas penyaluran pupuk bersubsidi adalah PIHC, gitu pak terima kasih.

F-PDIP (DR. H. SUTRISNO, S.E., M.Si.):

Pimpinan. Pimpinan.

WAKIL KETUA KOMISI IV/F-GERINDRA (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Pak Sutrisno silakan pak.

F-PDIP (Dr. H. SUTRISNO, S.E., M.Si.):

Nah ini informasi saja, nah yang tadi saya sampaikan itu pelakunya adalah bandar beras, bandar gabah itu bukan termasuk struktur disitu sehingga lebih baik mungkin begini yang didukung dengan penegakan hukum yang diberlakukan pada pihak-pihak terkait.

Jadi tadi permintaan Pak Dirut supaya semua siapapun itu yang ditemukan bersalah, iya bukan cuman dari pihak PIHC itu dimasukkan. Jadi saya bisa terima tadi masukkan terakhir Pak Sutrisno, iya?jadi semua yang terkait.

F-PAN (HAERUDIN, S.Ag, M.H.):

Ketua.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI/F-GERINDRA (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Iya Pak Khaerudin.

F-PAN (HAERUDIN, S.Ag, M.H.):

Saya juga memahami bahasa dari Dirut PIHC bahwa itu mungkin merasa tendensius dan dalam bahasa hukum bisa lebih soft dan lebih ringkas adalah para pihak

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI/F-GERINDRA (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Para pihak yang terkait.

F-PAN (HAERUDIN, S.Ag, M.H.):

Iya gitu sudah.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI/F-GERINDRA (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Terima kasih Kang Khaerudin.
Mohon disesuaikan.

F-PDIP (YOHANIS FRANSISKUS LEMA, S.IP., M.Si.):

Pak Budi, sedikit.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI/F-GERINDRA (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Iya Pak Fransiskus Lema, banyak juga boleh Pak Fransiskus.

F-PDIP (YOHANIS FRANSISKUS LEMA, S.IP., M.Si.):

Iya begini, yang diawasi itu yang punya otoritas, kalau tidak punya otoritas untuk apa kita awasi, iya? jadi memang ini penegasan memang kita mau mengawasi PIHC salah satunya, kenapa? karena punya power; *power tends to corrupt absolute power corrupts absolutely* jadi biasa aja seperti DPR juga diawasi, nah tinggal ditambahkan sebagai pelaksana maupun yang tadi itu termasuk mengakomodir yang disampaikan oleh Pak Sutrisno tadi tetapi Pak Dirut kalau PIHC disebutkan di situ itu, menurut saya biasa saja karena punya otoritas resmi dan memang harus diawasi, begitu. Tidak berarti PIHC melakukan bias of power, tidak juga, iya punya otoritas ya diawasi, logis. Begitu Pak Budi.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI/F-GERINDRA (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Saya ngerti Pak Fransiskus Lema, iya saya rasa bukan kita tidak.. kita sama-sama mengerti semangat dari Nomor 4 ini kita tahu. Bukan kita mau menyulitkan PIHC tentu tidak, kita nyari kesalahan juga tidak, tapi ini untuk preventif untuk masa-masa yang akan datang jangan sampai terjadi lagi. Siapapun yang terbukti bersalah yaitu harus ada penegasan hukum, kan seperti itu. Jadi kalau saya boleh saya tawarkan, iya supaya kosakatanya enak juga, saya rasa seperti Pak Khaerudin saja tadi, para pihak yang terkait, toh PIHC juga terkait kalau memang bersalah, karena sudah tersebut diawal.

F-PG (Ir. ICHSAN FIRDAUS):

Iya point 4 begitu, oke iyalah? Pak Ketua? iya kepada para pihak yang terkait termasuk gitu.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI/F-GERINDRA (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Begini,begini.

ANGGOTA KOMISI IV DPR RI:

Jadi nggak usah pakai koma deh itu setelah yang diberlakukan.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI/F-GERINDRA (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Tadi Pak Ketua barusan memberikan alternatif lagi kalau mau, para pihak kita masukkan dalam kurung (PIHC, Distributor) bagaimana? cukup? Anggota? Pak Dirut?

F-PAN (HAERUDIN, S.Ag, M.H.):

Kan begini kasusnya Ketua, sorry.

Pak Sutrisno tadi menampilkan kasusnya, yang melanggar itu kan bukan hanya distributor, ada bandar yang lain yang tidak terlibat disitu, itu yang maksud tadi.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI/F-GERINDRA (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Siap, cukup? Pak Dirut? Pak Ketua?

KETUA RAPAT:

Sudah, sudah cukup, cukup ini sudah jelas kalau ada pelanggaran berarti ada penegakan hukum. Sudah cukup itu saja.

Pemerintah setuju?

PEMERINTAH:

Setuju.

KETUA RAPAT:

Dirut?

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI/F-GERINDRA (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

(RAPAT: SETUJU)

5. Komisi IV DPR RI menilai terdapat kelemahan dalam pelaksanaan kebijakan pupuk bersubsidi, untuk itu Komisi IV DPR RI meminta pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan operasional penyaluran yang mampu mengatasi masalah klasik distribusi mulai dari perencanaan sampai dengan mekanisme distribusi.

(RAPAT: SETUJU)

6. Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah segera melaporkan perhitungan kurang bayar Pupuk Bersubsidi periode 2017 sampai 2020 dan penyebabnya disertai dengan data dukung terkait.

Pemerintah?

(RAPAT: SETUJU)

7. Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah untuk mengkaji ulang komposisi pemberian Pupuk Bersubsidi dengan diimbangi pemberian pupuk organik yang lebih ramah lingkungan dan memperbaiki struktur tanah akibat penggunaan pupuk kimia yang terus menerus.

Komisi IV?

Pemerintah?

PEMERINTAH:

Iya setuju.

PIMPINAN KOMISI IV F-GERINDRA (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

(RAPAT: SETUJU)

8. Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah sipil Kementerian Pertanian untuk menyampaikan data laporan antara lain:
 - a. Timeline atau jadwal dalam penyelesaian pembagian Kartu Tani termasuk dengan penyelesaian pengadaan pengoperasian infrastruktur pendukungnya sampai pada tingkat lini 4.
 - b. Laporan penyaluran tambahan pupuk bersubsidi tahun 2020 senilai 3,1 triliun yang tidak mampu mengatasi kelangkaan pupuk di daerah-daerah.
 - c. Data stok pupuk dari lini 1 pabrik hingga lini 4 kios pengecer.

Komisi IV?

F-PG (Ir. ICHSAN FIRDAUS):

Deadlinenya kapan Ketua?

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI/F-GERINDRA (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Ini, itu nanti di point 10 Pak Ichsan.

Komisi IV setuju? Pemerintah?

PEMERINTAH:

Setuju.

KETUA RAPAT:

Disitu Komisi IV meminta Kementerian c.q Kementerian Pertanian dan PIHC karena yang punya data stok pupuk ini di c ini adalah PIHC.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI/F-GERINDRA (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Terima kasih Ketua.

Setuju Komisi IV?

ANGGOTA:

Setuju.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI/F-GERINDRA (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Pak Dirut?

(RAPAT : SETUJU)

KETUA RAPAT:

Saya ingatkan Pak Suwandi Kementerian Pertanian maupun PIHC kalau yang kami minta ini data belum tiba sebelum Rapat Kerja saya mau batalkan Rapat Kerjanya, apalagi ini pembahasan anggaran loh, inget ya? saya batalkan Rapat Kerjanya.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI/F-GERINDRA (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Mantap

9. Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah menyampaikan hasil kajian alternatif lain pemberian subsidi petani yang lebih berdampak langsung terhadap kesejahteraan petani.

Komisi IV? Pemerintah?

F-PKS (drh. H. SLAMET):

Apa tidak perlu tadi Pak Ketua usulan Pak Ketua Komisi langsung masuk kesitu bukan kajian Pemerintah tetapi menjadi bagian dari yang perlu dikaji.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI/F-GERINDRA (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Maksudnya skema tadi pemberian subsidi diakhir?

F-PKS (drh. H. SLAMET):

Iya langsung ke petani tadi, kepetaninya.

F-PDIP (Ir. MINDO SIANIPAR):

Pak Ketua.

Saya kira dalam hal ini harus hati-hati, banyak hal yang harus kita pikirkan, Forum sebentar ini langsung kita rubah, langsung diberikan kepada petani, itu tidak betul, iya hati-hati.

Coba kita minta evaluasi zamannya Suswono menjadi Menteri Pertanian pernah percobaan yang langsung ke petani di daerah Karawang menyangkut sekian hektar. Nah jadi berbasis itulah

KETUA RAPAT:

Saya masih ingat.

F-PDIP (Ir. MINDO SIANIPAR):

Masih ingat?

KETUA RAPAT:

Kartu Tani itu.

Jadi yang sembilan ini saya rasa sudah tepat menyampaikan hasil kajian, kajiannya apa sih? hasil kajian alternatif lain pemberian subsidi petani lebih berdampak langsung terhadap kesejahteraan petani. saya rasa hal ini sudah sangat tepat dikaji dulu baik oleh Kementerian Pertanian maupun dari Kemenkoekuin maupun yang lain.

Anggota?

F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):

Interupsi Pimpinan.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI/F-GERINDRA (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Iya.

F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):

Bahwa Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah menyampaikan hasil kajian kebijakan alternatif lain pemberian subsidi petani yang lebih berdampak langsung terhadap kesejahteraan petani. Karena kita bicara kebijakannya Pimpinan.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI/F-GERINDRA (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Coba saya baca ulang ya; Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah menyampaikan hasil kajian kebijakan alternatif lain pemberian subsidi petani yang lebih berdampak langsung terhadap kesejahteraan petani.

DIRJEN TANAMAN PANGAN:

Izin Pak Ketua.

Waktunya kapan pak diserahkan? karena kalau kajian sekarang ada cuman belum mendalam sekali alternatifnya subsidi langsung cuman diberi waktu besok untuk bikin kajian lagi kurang kayaknya pak.

KETUA RAPAT:

Pak kenapa kita nggak kasih waktu?

Kalau kami bilang seminggu, *you* enggak bakal bisa karena *you* harus koordinasi Menkoekuin sama Kementerian Keuangan itu loh atau kita masukkan selambat-lambatnya 3 bulan apa 6 bulan untuk periode akan datang di 2022. Kalau saya minta sebulan juga belum tentu bisa kok, kalau anda sendiri mau dipotong dananya 6 triliun nggak tahu, saya yang lebih tahu malah.

DIRJEN TANAMAN PANGAN:

Oke setuju pak Nomor 9.

F-PG (Ir. ICHSAN FIRDAUS):

Iya setuju berapa bulan pak dirjen? jadi jangan setuju dulu tapi berapa bulan.

KETUA RAPAT:

Dimasukkan saja berapa bulan hah?

F-PKS (Drh. H. SLAMET):

Kita dengarkan dulu dari Pemerintah sanggupnya berapa?

KETUA RAPAT:

Hah kalau 1 tahun enggak bisa digunakan 2022 bos, maka anda jangan ikut jalan-jalan melulu.

F-PAN (HAERUDIN, S.Ag, M.H):

masa persidangan saja Ketua.

DIRJEN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN:

6 bulanlah Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Oke masukkan 6 bulan.

F-PG (Ir. ICHSAN FIRDAUS):

Nggak kelamaan pak dirjen?

DIRJEN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN:

Nggak pak.

F-PG (Ir. ICHSAN FIRDAUS):

Sebenarnya kan Pak Wandu, izin Ketua.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI/F-GERINDRA (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Silakan Pak Ichsan.

F-PG (Ir. ICHSAN FIRDAUS):

Jadi Pak Dirjen TP mengatakan bahwa sebenarnya sudah ada tapi kurang mendalam, jadi didalamin saja dan itu tidak memerlukan waktu 6 bulan. 4 bulan juga cukup menurut saya gitu karena katanya sudah ada kajiannya di Kantor Menko Ekonomi juga sudah ada, jadi tinggal disinkronisasi. Memang problem kita ini koordinasi ini membutuhkan waktu lama 6 bulan koordinasi ini? ngeri juga saya, agak berat juga kalau koordinasi butuh waktu 6 bulan. Cukuplah 3 bulan menurut saya, 4 bulan pun maksimal gitu karena inikan tinggal koordinasi saja Pak Ketua. Terima kasih.

DIRJEN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN:

Izin Pak Ketua.

Disinikan selambat-lambatnya 6 bulan, kalau 3 bulan sudah selesai kita serahkan.

F-PG (Ir. ICHSAN FIRDAUS):

Kalau saya berpikir sebaliknya selambat-lambatnya 4 bulan, 2 bulan sudah selesai kan tidak ada masalahkan?

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI/F-GERINDRA (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Gimana Pak Dirjen?

DIRJEN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN:

Iya itu aja 6 bulan aja, 6 bulan biar hasilnya maksimal pak.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI/F-GERINDRA (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Pak Ichsan 6 bulannya bisa diterima?

F-PAN (HAERUDIN, S.Ag, M.H.):

Nggak papa Ketua, nanti tiap bulan kita tagih saja komitmen.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI/F-GERINDRA (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Baik.

KETUA RAPAT:

Yang paling penting hasilnya kajiannya baik dan bisa digunakan pada 2022, itu yang paling penting, iya?

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI/F-GERINDRA (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

(RAPAT : SETUJU)

Terakhir,

10. Komisi IV DPR RI meminta agar data laporan, berarti yang ini dicoret berarti? nah ini beda soalnya atau ada hasil kajian yang beda? itu dihapus maupun hasil kajian yang diminta tolong dihapus. Jadi Komisi IV DPR RI meminta agar data laporan diserahkan selambat-lambatnya 1 hari sebelum Rapat Kerja dengan Kementerian Pertanian.

KETUA RAPAT:

Saya enggak setuju kalau 1 hari, orang bahan rapat juga 3 hari harus diterima.

Gimana?eh kalian bisa kerja nggak ini masak buat 1 hari. Ada nggak aturan yang mengatakan tiga hari sebelum Rapat Kerja bahan sudah diterima?kok ini dimasukkan 1 hari?gimana kalian?

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI/F-GERINDRA (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Tiga hari sebelum.

F-PG (Ir. ICHSAN FIRDAUS):

Ketua.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI/F-GERINDRA A (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Silakan Pak Ichsan.

F-GOLKAR (Ir. ICHSAN FIRDAUS):

Saya koreksi dari para ahli hukum kalau kalimat ini Raker dengan Kementerian Pertanian untuk apa?apakah Raker nanti Masa Sidang berikutnya? Kalimatnya kita dalam masa sidang sekarang, iya sebelum Rapat Kerja dengan Kementerian Pertanian dalam masa sidang atau tanggalnya tanggal berapa? tanggal 25 Januari gitu.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI/F-GERINDRA (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Tolong dimasukkan tanggalnya.

F-PG (Ir. ICHSAN FIRDAUS):

Data dan laporan apa Ketua? data laporan di dalam kesimpulan ini yang merupakan bagian dari kesimpulan ini, data laporan apa kan belum jelas point 10 ini?

F-PAN (HAERUDIN, S.Ag, M.H.):

Ketua.

F-PG (Ir. ICHSAN FIRDAUS):

Tadi kan dipoint 2 juga kita minta data hasil kajian.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI/F-GERINDRA (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Sebentar, sebentar oke.

Saya terima itu, meminta agar seluruh data dan laporan yang diminta dalam Rapat Dengar Pendapat hari ini diserahkan selambat-lambatnya tiga hari sebelum Rapat Kerja dengan Kementerian Pertanian tanggal 25 Januari 2021.

F-PAN (HAERUDIN, S.Ag, M.H.):

Ketua.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI/F-GERINDRA (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Siap Kang Haerudin.

F-PAN (HAERUDIN, S.Ag, M.H.):

Inikan Nomor 10 itu adalah sepanjang kita Rapat Kerja dengan Pemerintah, Nomor 10 itu bukan hanya tanggal 25. Inilah hukumnya kalau kita rapat dengan Pemerintah mau Rapat Kerja kita punya data 3 hari sebelumnya karena kita butuh kajian pendalaman, terima kasih Ketua.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI/F-GERINDRA (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Oke jadi bisa disetujui?Kang Khaerudin?

F-PAN (HAERUDIN, S.Ag, M.H) :

Setuju.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI/F-GERINDRA (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Anggota?Pemerintah?

DIRJEN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN:

Setuju pak.

KETUA RAPAT:

(RAPAT : SETUJU)

Bapak Ibu yang kami hormati.

Sebelum kami menutup Rapat Dengar Pendapat hari ini, kami persilakan salah satu direjn dari Kementerian Pertanian untuk menyampaikan kata penutup, silakan.

DIRJEN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN:

Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.

Bapak Ketua dan Anggota Komisi IV DPR RI yang kami hormati dan kami banggakan.

Kami bersama teman-teman; Dirjen PSP, Dirjen Kepala BPSDM, Dirut PIHC, Bu Asdep dan Ketua Himbara dan seluruh jajaran kami yang hadir disini mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya atas saran dan masukan dalam RDP ini yang tentunya sangat bermanfaat bagi kami dan mudah-mudahan pelaksanaan kebijakan pupuk bersubsidi di 2021 ini akan berjalan lebih baik lagi dibanding dengan 2020.

Demikian sekali lagi kami ucapan terima kasih.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Jangan pakai kata akan, harus berjalan lebih baik, iya? saya nggak mau kalau bilang akan, akan, akan, nanti sampai kiamat akan terus nanti. Terima kasih dengan demikian berakhir sudah Rapat Dengar Pendapat pada hari ini, atas nama Pimpinan dan Anggota Komisi IV mohon maaf apabila selama kami memimpin rapat ini ada kekurangan, kekhilafan. Dengan

mengucapkan *alhamdulillah wabil alamin* Rapat Dengar Pendapat ini kami tutup.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

(RAPAT DITUTUP PUKUL 17.45 WIB)

a.n. KETUA RAPAT
SEKRETARIS RAPAT,

Ttd.

Drs. Achmad Agus Thomy
NIP.196508171988031002